

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

Nomor :

Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa:

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih, Dr. H. Rahmat Effendi dan H. Ahmad Syaikh, yang telah dilantik pada tanggal 10 Maret 2013, tepat saat Hari Jadi Kota Bekasi, perlu diubah karena RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 memuat informasi tentang sumberdaya yang diperlukan, keluaran serta dampak dari perencanaan pembangunan selama lima tahun yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja - rencana kerja SKPD dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berkaitan dengan hal tersebut seiring ditetapkan berbagai kebijakan nasional seperti adanya pergantian kepemimpinan nasional, yang membawa perubahan penting pada strategi serta arah dan kebijakan pembangunan nasional dengan Trisaktinya dan 9 (sembilan) agenda program pembangunan “Nawa Cita” dari presiden dan wakil presiden terpilih, Ir H. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini merupakan terjemahan dan operasionalisasi dari strategi dan agenda program presiden dan wakil presiden terpilih. Selain itu terjadi pelimpahan kewenangan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif yang perlu disesuaikan dengan kebijakan nasional tersebut. Selain dari itu, Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 juga digunakan sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 perubahan disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dengan mengintegrasikan program nasional, provinsi dan Kota Bekasi, serta mempertimbangkan dan menganalisis isu strategis internasional, nasional dan lokal.

Berdasarkan Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RPJMD dapat diubah apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan

tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini;

- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. Merugikan kepentingan nasional.

Selanjutnya, karena RPJMD ini berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum rencana pembangunan lima tahunan di 32 urusan bidang pemerintahan yang bersifat wajib dan bidang pemerintahan yang bersifat pilihan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka rumusan visi, misi dan indikatif program pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kota Bekasi, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.

Seiring dengan terjadinya perubahan yang mendasar dan hasil pengendalian dan evaluasi yang telah dilaksanakan, perubahan RPJMD perlu mengakomodasi beberapa hal antara lain:

- 1. Adanya peleburan, pemisahan dan penggabungan perangkat daerah sebagai akibat dari ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014;
- 2. Indikator kinerja pembangunan wilayah kecamatan se Kota Bekasi belum tertuang dalam Perda No.11 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018;
- 3. Penting dan perlunya penajaman permasalahan dan isu strategis yang sesuai dengan kondisi internasional, nasional, provinsi dan local (khas Kota Bekasi);
- 4. Perlunya penyesuaian program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah sehingga perlunya perubahan indikator kinerja utama yang lebih berorientasi pada hasil (*outcome*);

5. Pentingnya upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kota Bekasi yang berdasarkan pada hasil evaluasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007, Tambahan Lembaran negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- j. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- q. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
- r. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

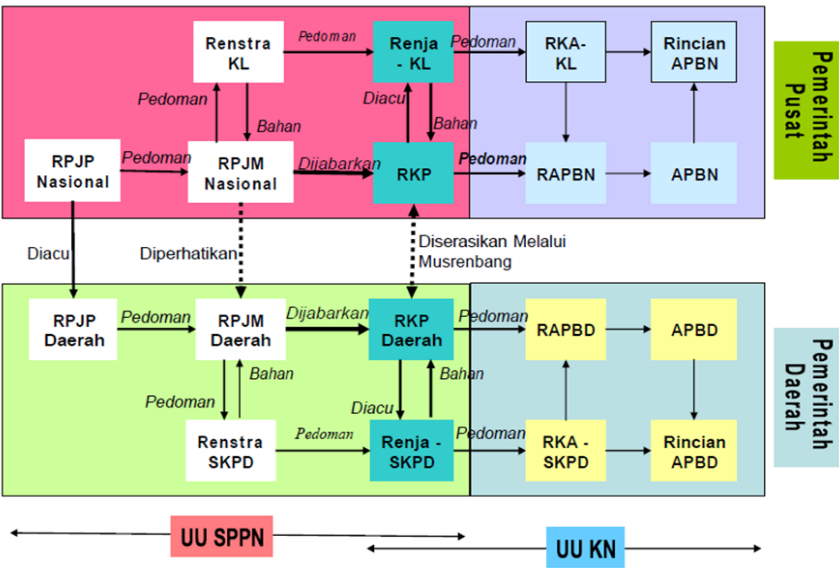
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat;
- y. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
- z. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
- aa. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi; dan
- bb. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;
- cc. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Seri D);
- dd. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Seri D);
- ee. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Seri D).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 Perubahan merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi dan RTRW Kota Bekasi, dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RTRW kabupaten/kota lain di sekitarnya. Rancangan RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan Renstra SKPD. Rancangan Renstra SKPD inilah yang menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD Kota Bekasi. RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya dijadikan pedoman dalam penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD Kota Bekasi, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan RPJMD Kota Bekasi 2013-2018.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawabnya serta pencapaian target kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja awal.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini merupakan panduan bagi semua pihak dalam melaksanakan RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018.

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013–2018 Perubahan ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD Kota Bekasi, dan Renja SKPD. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 Perubahan ini adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi, namun tetap mendukung tujuan nasional;
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);
4. Menetapkan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan menjadikan pedoman dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
5. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan.

BAB II

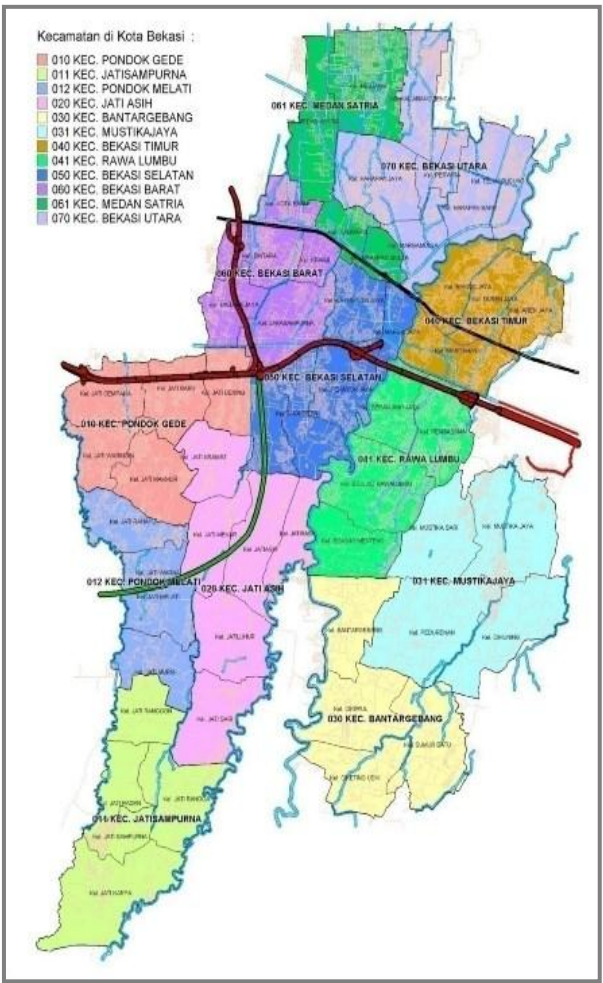
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 kilometer persegi, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- sebelah Timur : Kabupaten Bekasi;
- sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 2.1 Peta Geografis Kota Bekasi

Secara geografis wilayah Kota Bekasi berada pada posisi 106°48'28" hingga 107°27'29" Bujur Timur (BT) dan 06°10'06"-06°30'06" Lintang Selatan (LS).

Secara administratif Kota Bekasi terbagi atas 12 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, dan Kecamatan Bekasi Utara, seperti Gambar 2.1.

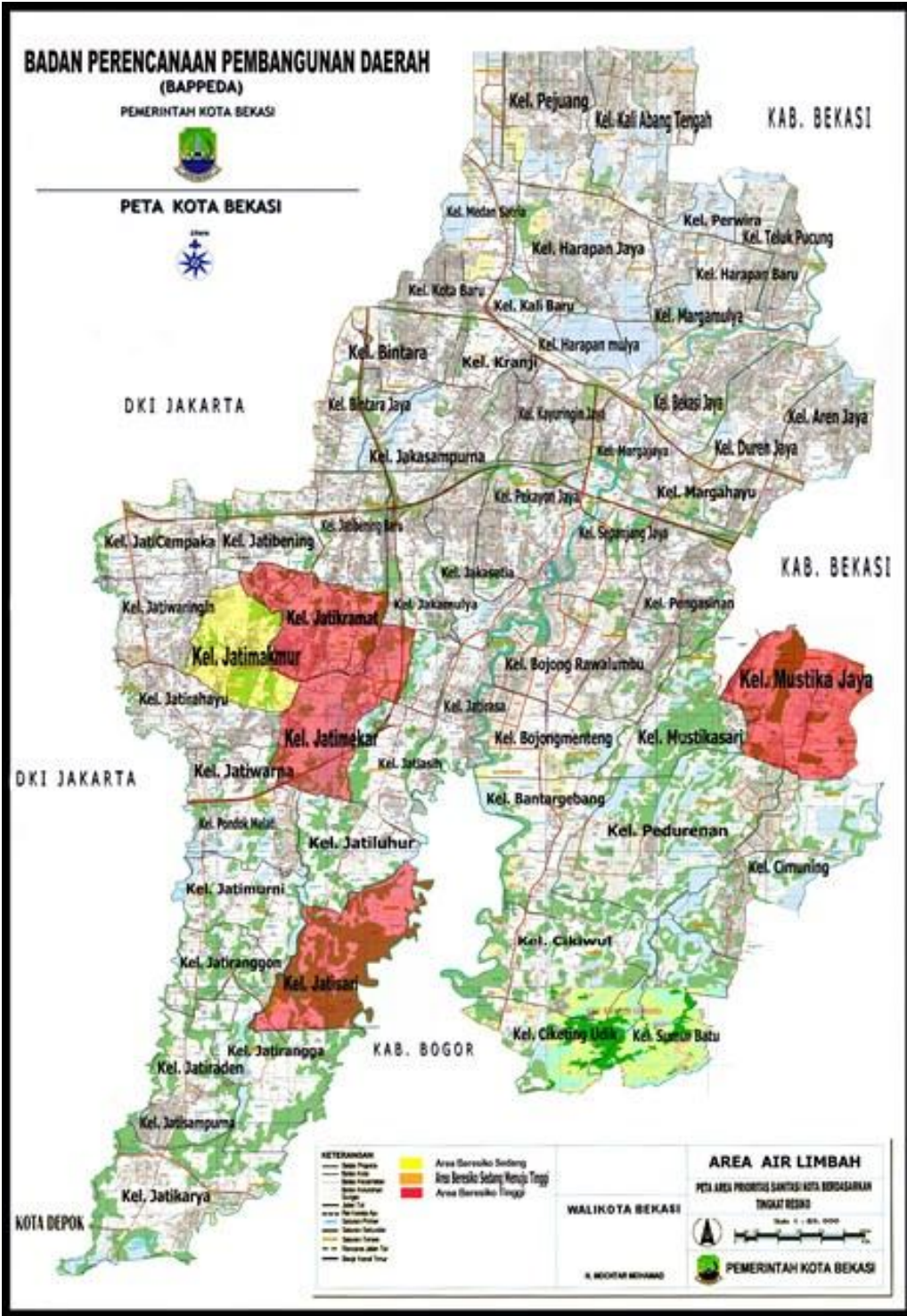
B. Topografi

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar, dengan kemiringan antara 0–2 persen. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 hingga 81 meter di atas permukaan air laut (dpl). Ketinggian kurang dari 25 meter berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondokgede. Sedangkan ketinggian antara 25–100 meter dpl berada di Kecamatan Bantargebang, Pondok Melati, dan Jatiasih.

Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah menyebabkan pada beberapa daerah sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat, sehingga sering merupakan langganan genangan air, yaitu ditemukan di beberapa kecamatan, seperti:

- Kecamatan Jatiasih, meliputi: Kelurahan Jatirasa, Jatimekar dan Jatikramat;
- Kecamatan Bekasi Timur, meliputi: Kelurahan Duren Jaya dan Aren Jaya;
- Kecamatan Rawalumbu, meliputi: Kelurahan Bojong Menteng dan Pengasinan;
- Kecamatan Bekasi Selatan, meliputi: Kelurahan Jakasetia, Pekayon Jaya, dan Marga Jaya;
- Kecamatan Bekasi Barat, meliputi Kelurahan Bintara Jaya dan Kota Baru; dan
- Kecamatan Pondok Melati, meliputi Kelurahan Jatirahayu.

Profil topografi kota seperti tersebut di atas secara tidak langsung berpengaruh terhadap penanganan air limbah, yang selama ini bertumpuk atau terkonsentrasi di beberapa kelurahan, seperti: Kelurahan Jatimakmur, Kelurahan Jatikramat, Kelurahan Jatimekar, dan Kelurahan Jatisari (Kecamatan Jatiasih), serta Kelurahan Mustika Jaya (Kecamatan Bekasi Timur).



Gambar 2.2 Peta Air Limbah Kota Bekasi

C. Geologi dan Jenis Tanah

Struktur geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh *pleistocene volcanic facies*. Struktur aluvium menempati sebagian kecil wilayah Kota Bekasibagian Utara. Sedangkan struktur *miocene sedimentary facies* terdapat di bagian Barat wilayah Kota Bekasi sepanjang perbatasan dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi di wilayah Selatan Kota Bekasi, tepatnya di daerah Jatisampurna, terdapat sumur gas. Sumur gas tersebut adalah

Sumur JNG-A dengan titik koordinat 106°55’8,687”BT dan 06°20’54,051”LS dan Sumur JNG-B dengan titik koordinat 106°55’21,155”BT dan 06°21’10,498”LS.

Keadaan tanah dapat membantu di dalam menentukan wilayah yang cocok untuk permukiman dengan mempertimbangkan aspek fisik yang meliputi kedalaman efektif, tekstur tanah, dan jenis tanah. Dengan kedalaman efektif tanah sebagian besar di atas 91 sentimeter, jenis tanah latosol dan aluvial, serta tekstur tanah didominasi sedang halus. Komposisi perbandingan berdasarkan luasnya antara lain: tekstur halus seluas 17.260 hektar (82 persen), tekstur sedang seluas 3.368 hektar (16 persen) dan tekstur kasar seluas 421 hektar (dua persen).

D. Hidrologi dan Klimatologi

Kondisi hidrologi Kota Bekasi dibedakan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan mencakup kondisi air hujan yang mengalir ke sungai-sungai. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi, dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan air (dpl).

Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi Sungai/Kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta Saluran Irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) serta wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi air permukaan Kali Bekasi saat ini tercemar oleh limbah industri yang terdapat di bagian Selatan wilayah Kota Bekasi (industri di wilayah Kabupaten Bogor).

Tabel 2.1
Profil Sungai Di Wilayah Kota Bekasi

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit m3/dtk)	
			Permukaan	Dasar		Maks	Min
1	Kali Cikeas	17,479	10.00	24.00	30.00	5.90	250.00
2	Kali Cilengsi	19,800	10.00	40.00	30.00	8.50	350.00
3	Kali Bekasi Hulu	11,425	10.00	50.00	30.00	14.40	375.00

4	Kali Bekasi Hilir	17,675	10.00	55.00	40.00	12.00	450.00
5	Kail Sunter	22,682	2.00	12.00	10.00	3.60	14.63
6	Kali Cakung	29,129	2.00	7.00	6.00	3.00	16.25
7	Kail Jambe - Kali Siluman	14,076	2.40	8.00	7.00	1.20	18.75
8	Kali Blencong	4,200	2.50	8.00	7.00	1.50	12.00
9	Kali Sasak Jarang / Narogong	1,003	1.70	6.00	5.00	0.80	9.35
10	Kali Bojong Rangkong	2,900	2.00	7.00	5.00	-	-
	Kali Irigasi:						
11	Primer Kali Malang	8,900	2.50	24.00	14.00	16.00	19.00
12	Saluran Rawa Baru	4,500	1.60	12.00	10.00	3.50	11.00
13	Saluran Bekasi Pangkal	2,700	1.70	12.00	10.00	4.50	10.20
14	Saluran Bekasi Utara	5,900	1.50	10.00	7.00	2.50	8.50
15	Saluran Pulo Timah	1,400	1.20	6.00	4.00	0.50	4.00
16	Saluran Tanah Tinggi	6,100	1.40	8.00	6.00	1.00	7.00
17	Saluran Bekasi Tengah	3,100	1.60	14.00	11.00	1.50	11.00
18	Saluran Pondok Ungu	4,900	1.60	11.00	8.00	1.00	9.50
19	Bogor Penggarutan	3,200	1.30	7.00	5.00	1.00	3.00
20	Kali Krupuk - Kali Batu	24,000	2.00	10.00	9.00	2.80	19.00
	Kali Empet/ Sal Rawa Tembaga	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Lebar dan kedalaman dihitung rata-ratanya

Sumber : Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, 2011

Hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bekasi pada tahun 2011 dibandingkan dengan Baku Mutu Air menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air serta dengan menggunakan Metode Storet guna mengetahui Status Mutu Air berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2005 dapat disimpulkan sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Status Kelas dan Mutu Air Sungai Utama
Di Kota Bekasi Tahun 2011

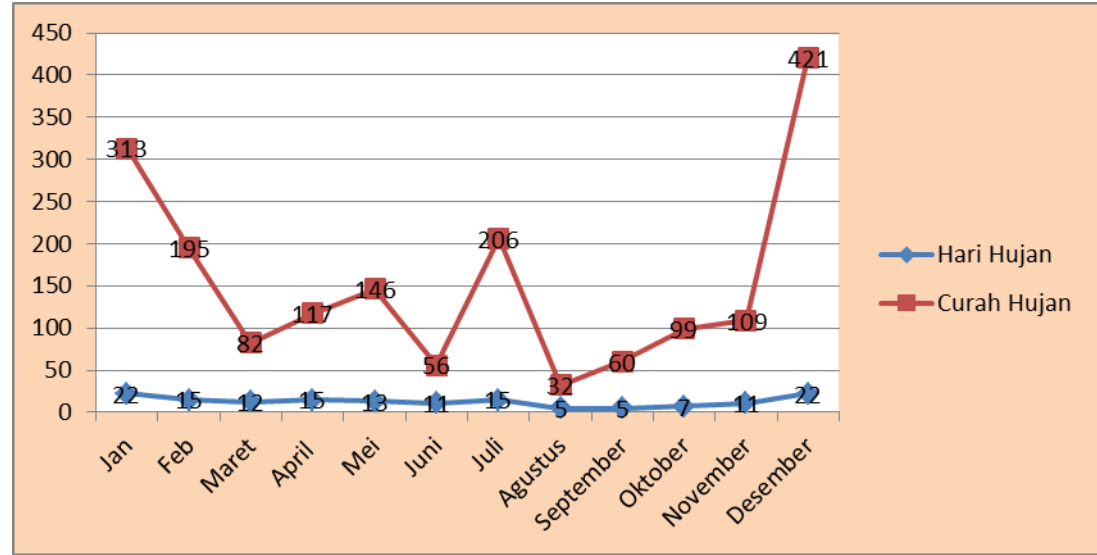
No	Nama Sungai	Kelas PP No. 82 Tahun 2001	Status Pergub Jabar No. 69/2005 (Metode Storet)
1.	Kali Cikeas	II	Cemar Sedang
2.	Kali Cileungsi	II	Cemar Sedang
3.	Kali Bekasi	II	Cemar Berat
4.	Kali Baru	II	Cemar Berat
5.	Saluran Sekunder	II	Cemar Sedang

Sumber : BPLH Kota Bekasi, 2011.

Kondisi air tanah di wilayah Kota Bekasi sebagian cukup potensial untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah Selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantargebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar.

Berdasarkan pengamatan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Tahun 2011 keadaan iklim di Kota Bekasi cenderung panas dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei, yaitu 90 milimeter dan jumlah hari hujan adalah 15 hari. Sedangkan jumlah curah hujan terendah terjadi bulan Agustus yaitu 40 milimeter dan jumlah hari hujan hanya satu hari.

Grafik 2.1
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan per Bulan
Di Kota Bekasi Tahun 2013



Sumber: KBDA 2014

Berdasarkan pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika Halim Perdana Kusuma Tahun 2013 keadaan iklim di Kota Bekasi cenderung panas dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu 519,1 milimeter. Sedangkan jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 83,6 milimeter dengan jumlah hari hujan sebanyak dua hari. Temperatur harian diperkirakan berkisar antara 24,3^o – 34,4^o Celcius. Kondisi temperatur yang tinggi tersebut mengakibatkan kondisi lingkungan dan ruangan sangat panas. Total curah hujan bulanan tahun 2010 rata-rata mencapai sekitar 2.438 milimeter dengan rerata kecepatan angin 8,37 kilometer/jam (minimal 5,4 kilometer/jam

dan maksimal 13,7 kilometer/jam), sementara rerata kelembaban udara tercatat sekitar 82 persen (minimal 68,9 persen dan maksimal 91,2 persen).

Berdasarkan pengamatan Perum Jasa Tirta II Bekasi -- sebagaimana dikutip dalam Kota Bekasi Dalam Angka 2014-- tahun 2013 keadaan iklim di Kota Bekasi cenderung masih panas dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yaitu 421 milimeter. Sedangkan jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 15 milimeter dengan jumlah hari hujan sebanyak lima hari.

Pola curah hujan di Kota Bekasi sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan topografi. Karena letak Kota Bekasi yang dilatarbelakangi oleh dataran rendah yang dibatasi oleh batas administrasi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi serta terletak agak jauh dari pantai Teluk Jakarta yang dipisahkan oleh batas administrasi Kabupaten Bekasi dengan wilayah Utara Kota Bekasi.

Tabel 2.3
Suhu Rata-Rata Bulanan Di Kota Bekasi Tahun 2011

Bulan	Kelembaban (%)			Temperatur (°C)			Kecepatan Angin (Km/Jam)		
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
Januari	93	70	82	34.8	26.4	24.3	15	7	9.9
Februari	93	75	84	34	23	24.4	14.6	6	9.8
Maret	93	75	81	34.6	24.9	32.5	8	4	4.8
April	93	54	74	35.6	24	34.4	8.4	6	6.2
Mei	94	73	82	34.9	25.1	33.3	18	6	11.3
Juni	91	76	82	34	23	34	6	2	4
Juli	79	57	90	33.6	23.8	31.7	18	6	9.6
Agustus	89	70	79	33.2	22	32.2	18	5	8.2
September	94	76	84	33.2	22.6	31.5	16	6	10.6
Oktober	93	63	82	34.4	21.6	32.1	15	6	9.3
Jumlah	91.2	68.9	82	34.23	23.64	31.04	13.7	5.4	8.37

Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika Halim Perdana Kusuma, 2011

Pola curah hujan di Kota Bekasi dipengaruhi oleh bentuk wilayah terutama kondisi morfologi regional yang relatif datar dengan kemiringan antara 0-2 persen, dengan bentuk miring kearah Utara serta ketinggian antara 0 – 25 meter dpl dengan daerah datar yang berawa. Jumlah curah hujan per tahun di Kota Bekasi relatif tidak cukup banyak. Musim hujan di Kota Bekasi

berlangsung pada bulan November sampai dengan bulan Mei. Umumnya musim hujan di Kota Bekasi berlangsung lebih lama dibandingkan dengan musim kemarau. Kondisi curah hujan di Kota Bekasi saat ini relatif tidak menentu, hal ini kemungkinan disebabkan oleh iklim musim, musim pancaroba dan hujan konversi (hujan lokal). Musim pancaroba jatuh pada bulan Maret dan Mei. Keadaan ini dipengaruhi oleh peredaran matahari yang menyebabkan terjadinya Daerah Konvergensi Antar Tropik (DKAT).

Akibat peredaran matahari pada saat suhu tinggi terjadi tekanan udara terhadap wilayah bersangkutan yang menyebabkan terjadinya angin yang membawa uap air yang jatuh sebagai hujan. Tipe iklim seperti ini menurut Metoda Schmidt & Fergusson (1951) adalah tipe A (basah) yang menggambarkan bulan basah lebih dari sembilan bulan dalam setahun.

E. Luas dan Sebaran Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, dan Kawasan Rawan Bencana

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, rencana pola penggunaan ruang di wilayah Kota Bekasi telah diatur sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3, dimana dengan basis wilayah kecamatan maka peta rencana pola ruang Kota Bekasi telah diatur menurut lokasi kantor pemerintahan, jaringan sungai dan perairan, jaringan jalan/transportasi, kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), kawasan lindung, dan kawasan budidaya.

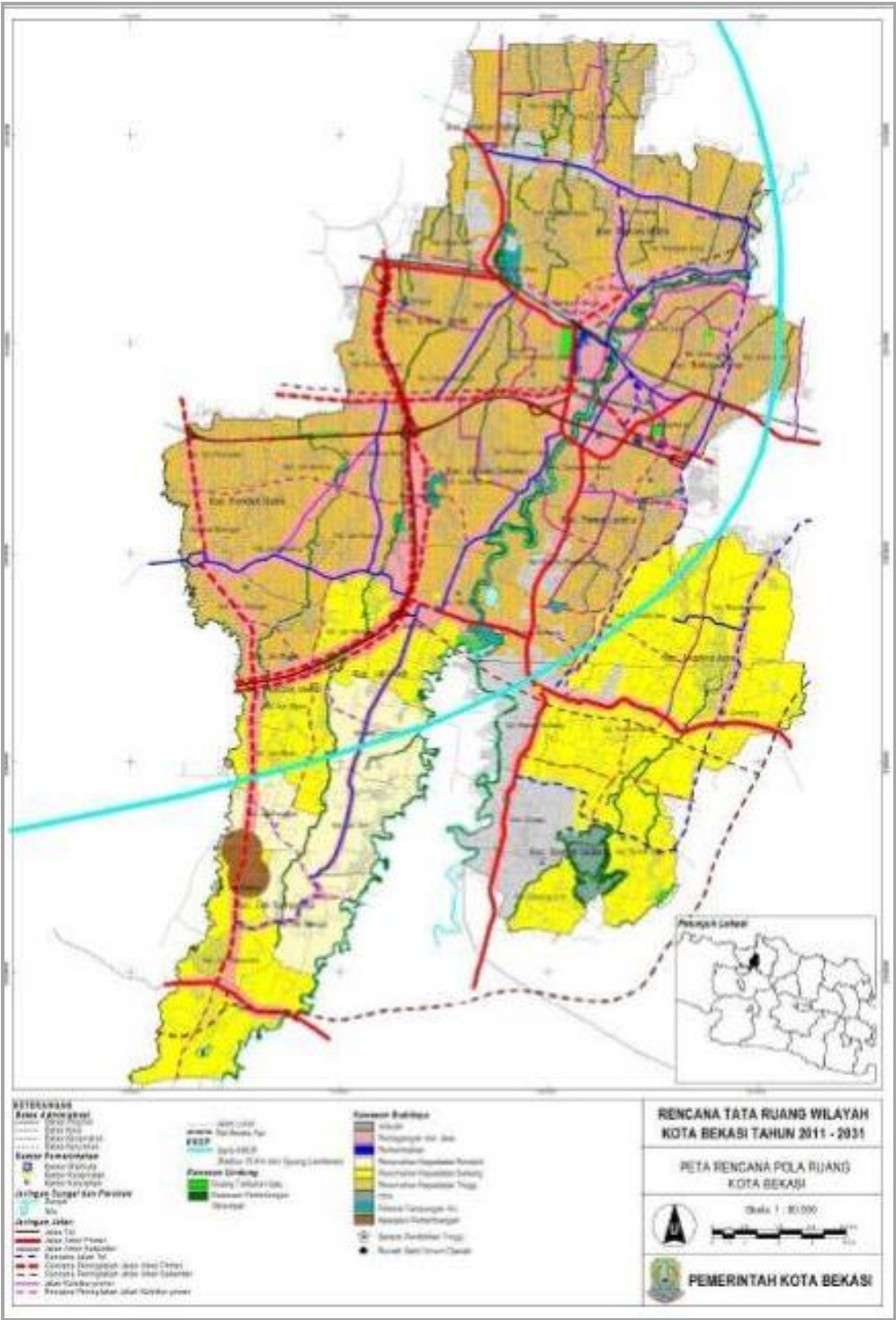
Kawasan Lindung

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bekasi terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat. Untuk itu, terdapat beberapa kebijakan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota Bekasi, yaitu:

- (1) membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung;

- (2) menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung.

Khususnya terkait dengan penetapan kawasan lindung, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, ditetapkan kawasan perlindungan setempat dan Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK).



Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bekasi

Kawasan perlindungan setempat meliputi: sempadan sungai, daerah sekitar situ, dan daerah tampungan air dan pengendali banjir. Penetapan kawasan lindung dan lokasinya di wilayah Kota Bekasi telah dirinci sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Rencana Kawasan Lindung Kota Bekasi Sesuai RTRW
Kota Bekasi Tahun 2011-2031

Kawasan Lindung		Lokasi
Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai	Kali Cikeas
		Kali Cileungsi
		Kali Bekasi
		Kali Sunter
		Kali Cakung
		Bantaran Sungai Cikiwul
	Daerah Sekitar Situ	Situ Rawalumbu
		Situ Rawagede
		Situ Rawa Pulo
	Tampungan Air dan Pengendali Banjir	Kawasan Karang Kitri
		Kawasan Harapan Baru Regensi
		Kawasan Taman Permata Cikunir
		Situ Uwong
		Kawasan Puri Gading
		Bendung Cikeas
		Kawasan Rawa Pulo
		Kelurahan Pengasinan
		Kawasan Rawa Pasung
		Kawasan Rawa Lele
		Jati Bening 2
		Situ Jati Bening
		Kawasan Kompleks Kodam Jaya
		Kawasan Bumi Bekasi 3
		Situ Rawalumbu
		Saluran Rawalumbu Hulu
		PHP Narogong
		Rawa Gede
		Cipendawa
		Desa Jatimulya
Ruang Terbuka Hijau Kota	Kawasan Penyangga	
	Hutan Kota	
	Taman Kota	
	Taman Lingkungan	
	Taman Rekreasi	
	Tempat Pemakaman Umum	
	Lap Olahraga/Lap Terbuka Hijau	
	Sempadan Jalan	
	Sempadan Sungai	
	Pulau Jalan	
	Sempadan Instalasi Bahaya	
	Sempadan Kereta Api	
	Taman Halaman Gedung	
	Taman Persil	
	Lahan Pekarangan	

Sumber: Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi.

Sedangkan RTHK meliputi: kawasan penyangga, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, taman rekreasi, tempat pemakaman umum, lapangan olahraga/lapangan terbuka hijau, sempadan jalan, sempadan sungai, pulau jalan, sempadan instalasi bahaya, sempadan kereta api, taman halaman gedung, taman persil, dan lahan pekarangan.

Kawasan Budidaya

Kota Bekasi didominasi oleh penggunaan lahan permukiman baik yang terstruktur maupun permukiman yang dibangun oleh individu masyarakat. Perkembangan kegiatan permukiman terstruktur beberapa tahun terakhir mengakibatkan bangkitkan kegiatan pendukung permukiman berupa perdagangan, jasa, dan kebutuhan fasilitas masyarakatnya.

Tabel 2.5
Klasifikasi Penggunaan Lahan Berdasarkan Kawasan
Di Kota Bekasi Tahun 2013

Jenis Penggunaan Lahan	Pusat Kota	Jati Sampurna	Pondok Gede	Bekasi Utara	Mustika Jaya	Kota Bekasi	
						Hektar	Persen
Perumahan	3.632,812	1.195,802	2.074,565	1.394,191	1.243,058	9.540,428	47,18 %
Komersial	288,117	86,264	123,894	92,578	93,501	684,354	3,39 %
Industri	124,813	36,054	58,399	324,198	233,535	776,999	3,84 %
Fasilitas Pelayanan	200,792	72,658	649,336	78,828	47,094	1.048,708	5,19 %
Kawasan Lindung	115,431	33,024	42,666	52,808	47,770	291,699	1,44 %
Transportasi	4,7000	-	-	3,562	2,334	10,596	0,05 %
Ruang Terbuka Hijau	217,847	50,812	296,654	76,963	131,811	774,088	3,83 %
Campuran	40,502	10,472	7,682	30,625	0,219	89,499	0,44 %
Pertanian (Lahan Kosong)	848,687	1.810,976	938,717	910,865	2.403,108	6.912,353	34,19 %
Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan	66,819	7,112	3,809	12,158	2,492	92,391	0,46 %
Jumlah (Hektar)	5.540,519	3.303,174	4.195,722	2.976,776	4.204,922	20.221,119	100,00 %
Jumlah (Persen)	27,40 %	16,34%	20,75 %	14,72 %	20,79 %	100,00 %	

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2014.

Disisi lain perkembangan Kota Jakarta menyebabkan Kota Bekasi yang berfungsi sebagai penyangga Kota Jakarta mendapat limpahan kegiatan baik berupa industri, perdagangan, dan jasa serta permukiman itu sendiri.

Permukiman

Secara umum perkembangan permukiman di Kota Bekasi mengarah pada terbentuknya kawasan-kawasan permukiman baru berskala besar yang dikembangkan oleh pengembang swasta, terutama di daerah Bantargebang, Jatisampurna, dan di kawasan sebelah Utara Kota Bekasi.

Adapun permukiman yang dibangun secara individu tersebar merata di semua kecamatan di Kota Bekasi. Permukiman di Bekasi bagian Selatan merupakan permukiman dengan kepadatan yang masih rendah. Secara umum profil dan sebaran kawasan permukiman di Kota Bekasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

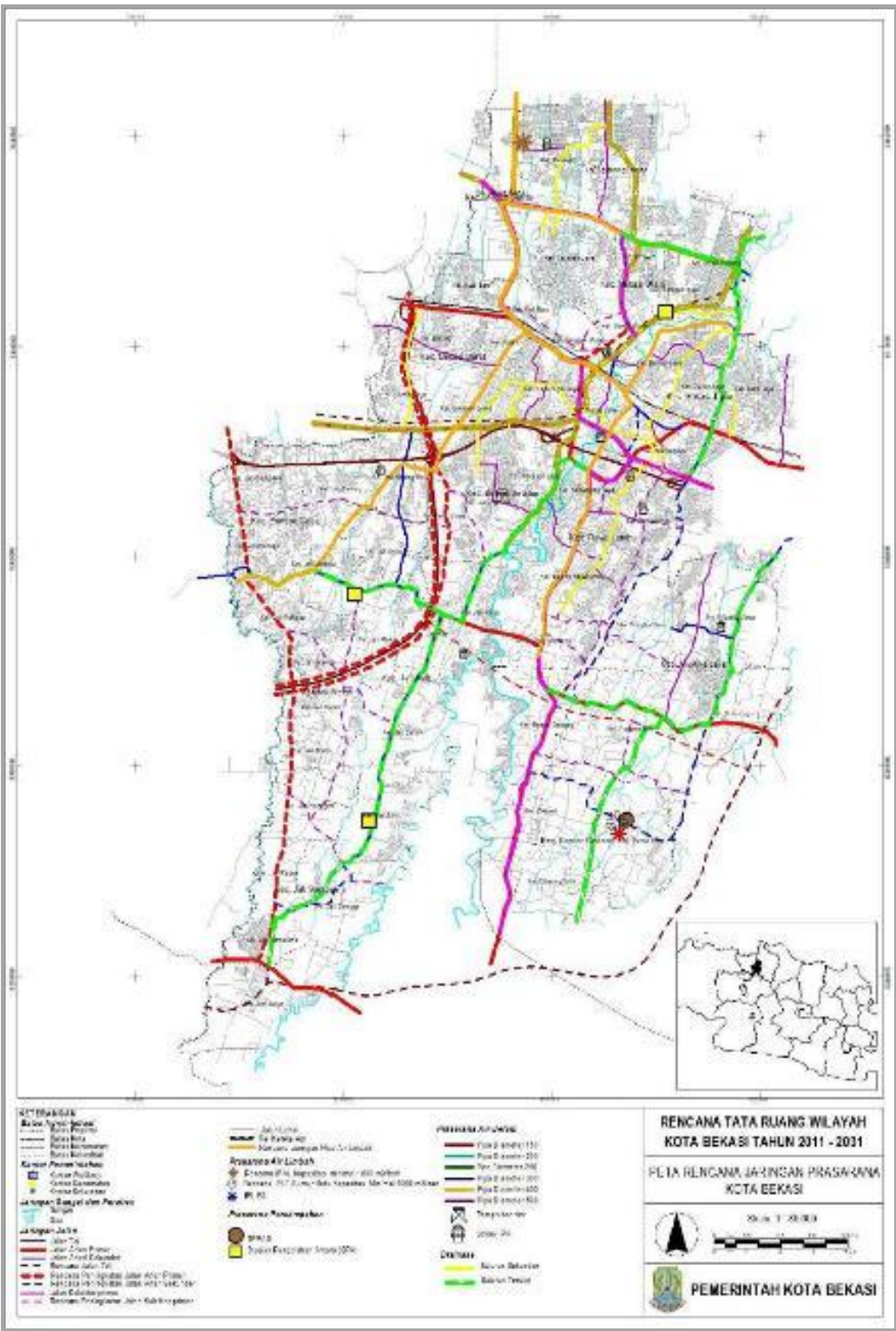
- Permukiman dengan kepadatan tinggi, banyak ditemui Kecamatan Pondokgede, Pondok Melati, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur dan Kecamatan Rawalumbu.
- Permukiman dengan kepadatan sedang, berkembang di Kecamatan Bekasi Utara, Medan Satria, Jatisampurna, dan Kecamatan Jatiasih.
- Permukiman dengan kepadatan rendah banyak ditemukan di sekitar Kecamatan Bantargebang, Mustikajaya serta sebagian Kecamatan Jatiasih.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031, rencana jaringan prasarana di wilayah Kota Bekasi telah di atur sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4.

Dengan basis data kecamatan, pengaturan jaringan prasarana yang dibangun dan dikembangkan di Kota Bekasi sudah memperhatikan lokasi kantor pemerintahan, jaringan sungai dan perairan, jaringan jalan, jaringan prasarana air limbah, jaringan prasarana persampahan, dan jaringan prasarana drainase.

Sebagai wilayah yang dilalui oleh 12 aliran sungai, Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap luapan air sungai di musim penghujan dan dampak dari meningkatnya debit air pada induk sungai-sungai tersebut di daerah hulu. Tabel 2.6

menunjukkan luasan daerah terkena banjir di Kota Bekasi tahun 2013. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sekitar 10 persen wilayah Kota Bekasi terkena dampak banjir besar yang terjadi di wilayah Jabotabek dan sekitarnya.



Gambar 2.4 Peta Rencana Jaringan Prasarana Kota Bekasi

Daerah Titik Banjir dan Genangan

Beberapa titik banjir dan genangan di atas terkait dengan sistem drainase yang diterapkan. Beberapa kelurahan yang selama ini memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya ancaman bencana banjir di Kota Bekasi antara lain sebagai berikut:

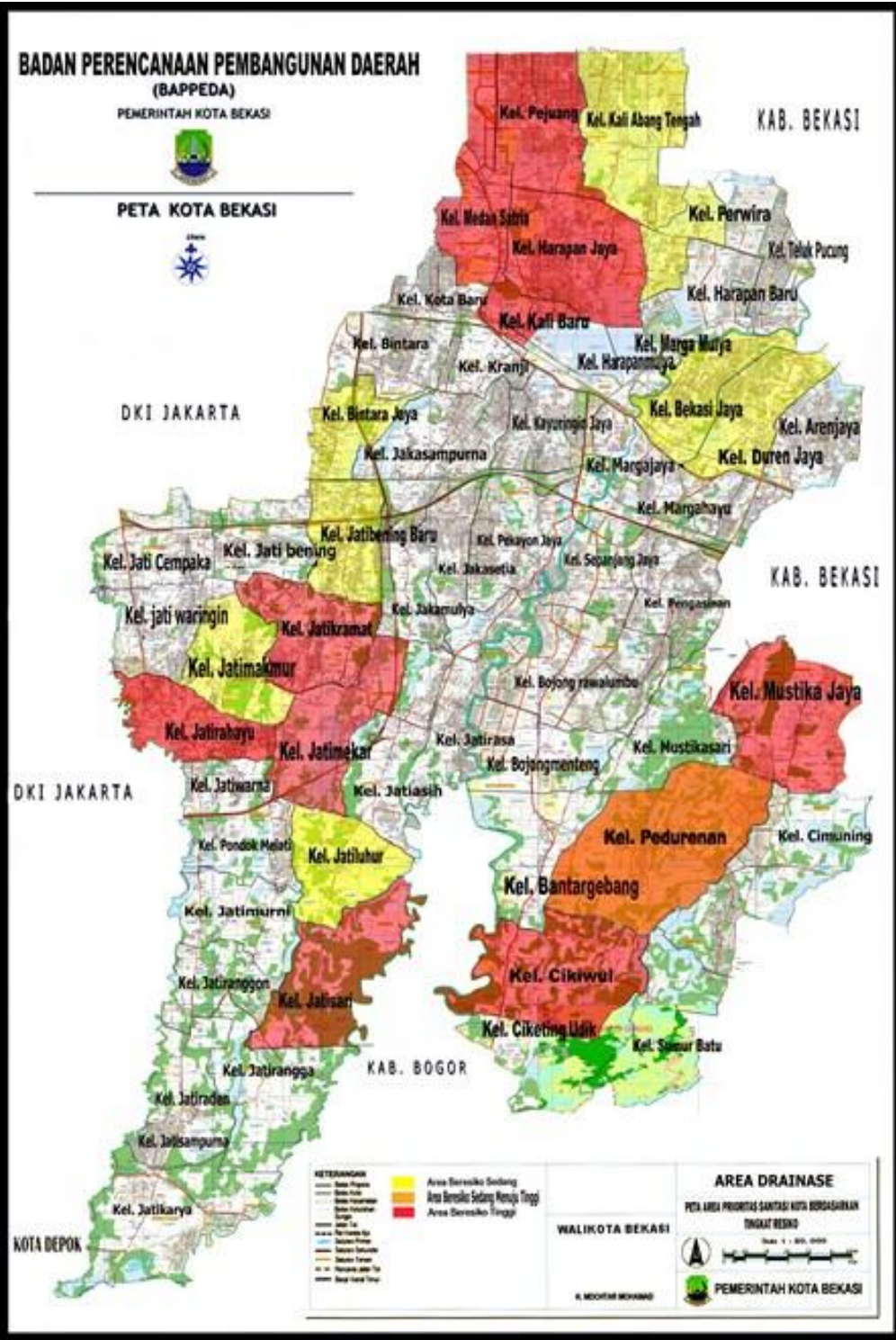
- Kecamatan Bekasi Utara, meliputi: Kelurahan Harapan Jaya;
- Kecamatan Medansatria, meliputi: Kelurahan Pejuang, Medansatria, dan Kalibaru.
- Kecamatan Jatiasih, meliputi: Kelurahan Jatikramat, Jatimekar, dan Jatisari;
- Kecamatan Mustikajaya meliputi: Kelurahan Mustikajaya;
- Kecamatan Bantargebang, meliputi: Kelurahan Cikiwul; dan
- Kecamatan Pondok Melati, yaitu di Kelurahan Jatirahayu.

Tabel 2.6
Data Luasan Bencana Banjir Di Kota Bekasi
Tahun 2013

Kecamatan	Luas /Area		Kelurahan	Wilayah Banjir	
	Ha	%		%	Ha
Pondokgede	1.629	7,74 %	5	10%	160
Jatisampurna	1.449	6,88 %	5	-	-
Pondok Melati	1.857	8,82 %	4	10%	190
Jatiasih	2.200	10,45 %	6	15%	330
Bantargebang	1.704	8,10 %	4	-	-
Mustika Jaya	2.473	11,75 %	4	-	-
Bekasi Timur	1.349	6,41 %	4	20%	270
Rawalumbu	1.567	7,44 %	4	15%	240
Bekasi Selatan	1.496	7,11 %	5	20%	300
Bekasi Barat	1.889	8,97 %	5	15%	280
Medan Satria	1.471	6,99 %	4	10%	150
Bekasi Utara	1.965	9,33 %	6	10%	200
Kota Bekasi	21.049	100 %	56	10,072%	2.120

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2013.

Sedangkan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustikajaya merupakan Area Berisiko Sedang menuju Tinggi. Gambar 2.5 secara jelas menginformasikan kondisi sistem drainase tersebut.



Gambar 2.5 Peta Drainase Kota Bekasi

Selanjutnya Tabel 2.7 memperlihatkan ketinggian dan lama genangan yang terjadi selama bencana banjir yang terjadi pada tahun 2013. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel tersebut, Kecamatan Jatiasih merupakan wilayah dengan genangan paling luas yaitu 330 hektar dengan rata-rata lama genangan adalah 26,5 jam dan rata-rata ketinggian genangan mencapai 148,75 sentimeter. Sedangkan rata-rata ketinggian

genangan yang terjadi di Kota Bekasi adalah 90,81 sentimeter dengan rata-rata lama genangan adalah 18,24 jam.

Tabel 2.7
Data Jumlah Sebaran Lokasi Banjir Di Kota Bekasi
Tahun 2013

No	Lokasi Banjir	Kelurahan	Ketinggian Genangan (cm)	Lama Genangan (jam)	Luas Genangan (ha)
A.	Kecamatan Jatiasih				330
1.	Perumahan Villa Jatirasa	Jatirasa	120,00	24,0	
2.	Perumahan Pd. Gede Permai	Jatirasa	250,00	38,0	
3.	Perumahan Kemang IFI	Jatirasa	200,00	24,0	
4.	Perumahan PPA Jatiasih	Jatirasa	150,00	24,0	
5.	Perumahan Pd. Mitra Lestari	Jatirasa	100,00	24,0	
6.	Perumahan Graha Indah	Jatimekar	50,00	24,0	
7.	Komplek Nasio	Jatimekar	70,00	24,0	
8.	IKIP	Jatikramat	250,00	30,0	
		Rata-rata	148,75	26,5	
B.	Kecamatan Pondok Gede				160
1.	Perumahan Antilop	Jaticempaka	100,00	24,0	
2.	Perumahan Jatibening Baru II	Jatibening Baru	150,00	24,0	
3.	Perum Jatibening Baru (AL)	Jatibening	100,00	20,0	
4.	Perumahan Duta Indah	Jatimakmur	60,00	12,0	
5.	Perumahan Sari Gaperi	Jatimakmur	70,00	12,0	
6.	Perumahan Cahaya Kemang	Jatimakmur	100,00	24,0	
7.	Perumahan Villa Bougenvile	Jatibening Baru	40,00	12,0	
		Rata-rata	88,57	18,28	
C.	Kecamatan Pondok Melati				190
1.	Perumahan Candra Lama	Jatirahayu	50,00	12,0	
2.	Perumahan Candra Baru	Jatirahayu	50,00	12,0	
		Rata-rata	50,00	12,0	
D.	Kecamatan Bekasi Selatan				300
1.	Perumahan Jaka Kencana	Jakasetia	60,00	12,0	
2.	Pangkalan Bambu – Giant	Marga Jaya	250,00	48,0	
3.	Perumahan Galaxy	Jakamulya	70,00	8,0	
4.	Perumnas II	Kayuringin	40,00	10,0	
5.	Perumahan BSK	Kayuringin	60,00	24,0	
6.	Perumahan Depnaker	Jakasetia	150,00	36,0	
		Rata-rata	105,00	23,0	
E.	Kecamatan Bekasi Barat				280
1.	Mas Naga	Bintara	70,00	12,0	
2.	Jatiluhur	Jakasampurna	80,00	12,0	
3.	Perumahan Harapan Baru II	Kotabaru	90,00	12,0	
4.	Perumahan Persada Kemala	Jakasampurna	60,00	12,0	
		Rata-rata	75,00	12,0	

No	Lokasi Banjir	Kelurahan	Ketinggian Genangan (cm)	Lama Genangan (jam)	Luas Genangan (ha)
F.	Kecamatan Rawalumbu				240
1.	Perumahan Kemang Pratama	Bj.Rawalumbu	50,00	10,0	
2.	Rawalumbu Utara	Pengasinan	100,00	24,0	
3.	Narogong	Pengasinan	70,00	18,0	
4.	Perumahan PHP II	Pengasinan	120,00	24,0	
		Rata-rata	85,00	19,0	
G.	Kecamatan Bekasi Timur				270
1.	Perumnas III	Aren Jaya	70,00	24,0	
2.	Perumahan Durenjaya	Duren Jaya	80,00	24,0	
3.	Perumahan Danita	Bekasi Jaya	80,00	24,0	
4.	Perumahan wisma Jaya	Aren Jaya	50,00	12,0	
5.	Kartini	Margahayu	100,00	30,0	
6.	Perumahan Karang Kitri	Margahayu	100,00	30,0	
7.	Margahayu	Margahayu	100,00	30,0	
8.	Unisma	Margahayu	100,00	8,0	
		Rata-rata	85,00	22,75	
H.	Kecamatan Bekasi Utara				200
1.	Kelurahan Perwira	Perwira	40,00	20,0	
2.	Kelurahan Teluk Pucung	Teluk Pucung	250,00	24,0	
3.	Kelurahan Harapan Mulya	Harapan Mulya	40,00	12,0	
		Rata-rata	110,00	18,67	
I.	Kecamatan Medan Satria				150
1.	Rawa Pasung	Kalibaru	80,00	12,0	
2.	Perumahan Harapan Indah	Pejuang	70,00	12,0	
3.	Kelurahan Pejuang	Pejuang	60,00	12,0	
		Rata-rata	70,00	12,0	
	Jumlah Sebaran Lokasi Banjir Kota Bekasi		90,81	18,24	2.120

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2013.

F. Demografi

Perkembangan penduduk Kota Bekasi dari segi kuantitas memang cukup mengesankan bila dilihat dari tingkat perkembangan dari tahun ke tahun, mengingat Kota Bekasi sebagai kota penyeimbang Ibukota DKI Jakarta sekaligus Ibukota Negara.

Sejak dibentuk sebagai Kotamadya pada tanggal 10 Maret 1997, mulanya penduduk Kota Bekasi hanya berjumlah 1.471.477 jiwa yang terdiri dari laki-laki 740.467 jiwa dan penduduk perempuan sekitar 731.010 jiwa. Namun pada tahun 2013, berdasarkan BPS Kota Bekasi jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2.592.819 jiwa. Jumlah ini ternyata meningkat selama

dua tahun terakhir, yaitu jadi 2.523.032 jiwa pada 2012 dari 2.422.922 jiwa tahun 2011. Seperti terlihat pada tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kota Bekasi Tahun 2013

Kecamatan	Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pondok Gede	137.953	137.118	275.071
Jatisampurna	61.365	61.659	123.024
Pondok Melati	72.110	71.604	143.714
Jatiasih	112.840	110.323	223.163
Bantargebang	57.099	51.496	108.595
Mustikajaya	100.877	99.404	200.281
Bekasi Timur	130.922	126.343	257.265
Rawalumbu	116.652	117.847	234.499
Bekasi Selatan	109.386	108.975	218.361
Bekasi Barat	147.265	142.478	289.743
Medan Satria	88.438	86.799	175.237
Bekasi Utara	174.268	169.598	343.866
Jumlah	1.309.175	1.283.644	2.592.819

*Sumber: Data Proyeksi BPS Kota Bekasi
Data Hasil SP 2010.*

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Kota Bekasi tahun 2013 cenderung seimbang, jumlah penduduk laki-laki tercatat 1.309.175 jiwa (50,49 persen) dan jumlah penduduk perempuan tercatat 1.283.644 jiwa (49,51 persen). Dengan kata lain *sex ratio* Kota Bekasi tahun 2013 adalah 101,99 dengan kepadatan penduduk tercatat 10.510 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan sebaran wilayahnya, Kecamatan Bekasi Timur merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 18.603 jiwa/kilometer persegi dan Kecamatan Bantargebang adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah dengan tingkat kepadatan sebesar 5.082 jiwa/kilometer persegi.

Di samping itu, bila diperhatikan lebih cermat, terjadi pemusatan kepadatan penduduk pada beberapa wilayah Kota Bekasi. Terdapat lima kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Barat,

Bekasi Timur, Pondokgede, dan Rawalumbu, yang dihuni oleh 55,66 persen jumlah penduduk Kota Bekasi, sementara lima kecamatan tersebut hanya memiliki luas wilayah sekitar 39,90 persen dari luas wilayah Kota Bekasi secara keseluruhan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis dari unsur-unsur laju pertambahan dan unsur-unsur yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasikan kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Bekasi, pada tahun 2013 pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi adalah sebesar minus 5,22 persen, sedangkan pertumbuhan penduduk paling tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat terjadi pada tahun 2011 dimana pada tahun tersebut pertumbuhan penduduk Kota Bekasi adalah sebesar 17,44 persen, jauh dibandingkan tahun sebelumnya maupun dibandingkan angka pertumbuhan penduduk nasional.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan
Kota Bekasi Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan
2009	1.882.869	-
2010	2.084.420	9,67%
2011	2.447.930	14,85%
2012	2.334.142	- 4,65 %
2013	2.212.345	- 5,22 %

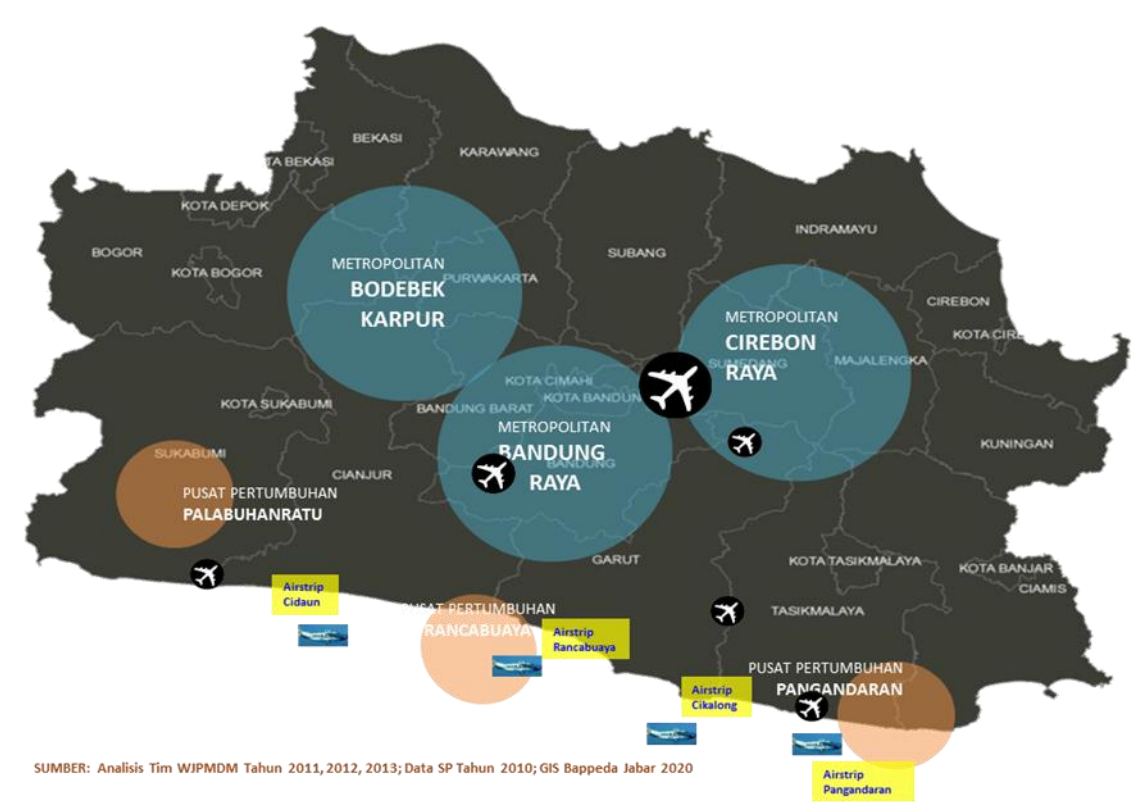
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2014.

G. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu

WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung, berikut potensi masing-masing wilayah. Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur menurut Pasal 11 ayat (1) merupakan pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jawa Barat dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan. Wilayah ini mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, dan sebagian Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Cipanas).

Gambar 2.6 Tiga Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat

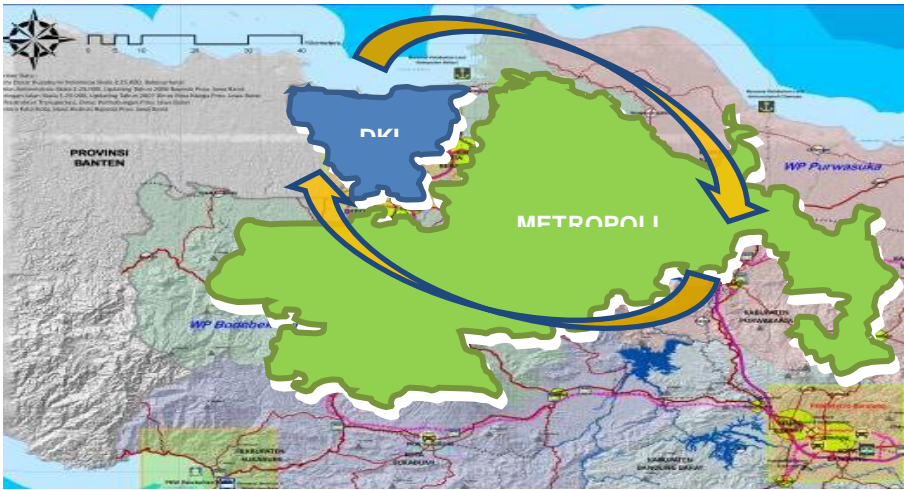


Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat, dikenal Metropolitan Bodebekkarpur wilayah Metropolitan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai satu kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat,

aglomerasi lahan terbangun, aglomerasi penduduk yang mencakup 11,6 juta jiwa yang terletak di 82 kecamatan di 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu: Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, sebagian wilayah Kabupaten Bogor, sebagian wilayah Kabupaten Karawang, dan sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta, dengan total luas 314,840 hektar.

Menurut konsep Twin Metropolitan Bodebek Karpur – DKI Jakarta, metropolitan ini dikembangkan sebagai Metropolitan Mandiri dengan sektor unggulan **Industri Manufaktur, Jasa, Keuangan, serta Perdagangan, Hotel, dan Restoran**, sebagaimana karakteristik setiap metropolitan yang diisyaratkan oleh peraturan daerah di atas, yaitu:

- (1) memiliki aktivitas perkotaan yang mandiri;
- (2) memiliki ciri khas yang berbeda;
- (3) memiliki manajemen metropolitan yang mandiri; dan
- (4) siap dalam kompetisi sosial-ekonomi yang sehat.



Gambar 2.7 Konsep Twin Metropolitan Bodebek Karpur-DKI Jakarta

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Pemerataan Ekonomi

Terdapat tiga fokus penting dari subaspek pemerataan ekonomi, yaitu: informasi tentang PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, dan Laju Inflasi.

PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.10 dan Tabel 2.11 menunjukkan nilai PDRB Kota Bekasi dan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Kota Bekasi berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013. Berdasarkan kedua tabel tersebut, terlihat bahwa sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Bekasi selama empat tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Bekasi lebih didominasi oleh perkembangan sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran tersebut. Sedangkan Grafik 2.3 menunjukkan perkembangan PDRB Kota Bekasi berdasarkan harga konstan tahun 2008 hingga tahun 2013 dimana terlihat bahwa perkembangan PDRB Kota Bekasi selalu menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif sejak tahun 2008 hingga tahun 2013.

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2013
(Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2009		2010		2011		2012		2013	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Pertanian	271,780.41	3.40	318,617.63	17.23	341,293.59	7.12	368,027.43	7.83	400,857.11	8.92
2. Pertambangan & Penggalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Industri Pengolahan	13,499,050.01	1.16	15,092,960.96	11.81	17,168,824.03	13.75	19,367,481.93	12.81	21,728,779.31	12.19
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1,159,616.13	10.86	1,364,063.54	17.63	1,607,057.35	17.81	1,792,140.25	11.52	2,085,213.81	16.35
5. Bangunan	1,146,303.07	4.99	1,218,520.17	6.30	1,376,312.87	12.95	1,719,379.26	24.93	2,058,943.65	19.75
6. Perdag., Hotel & Restoran	9,640,712.00	11.67	11,077,001.17	14.90	12,491,927.52	12.77	14,281,124.34	14.32	16,377,799.46	14.68
7. Pengangkutan & Komunikasi	2,676,363.38	13.27	3,137,586.29	17.23	3,572,443.06	13.86	3,937,103.94	10.21	4,343,739.02	10.33
8. Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan	1,199,729.96	8.69	1,360,572.83	13.41	1,566,220.34	15.11	1,763,489.80	12.60	1,855,360.86	5.21
9. Jasa-Jasa	1,881,832.89	11.99	2,109,742.78	12.11	2,404,729.15	13.98	2,628,637.06	9.31	3,028,966.50	15.23
Produk Domestik Regional Bruto	31,475,387.86	6.60	35,679,065.36	13.36	40,528,807.92	13.59	45,857,384.00	13.15	51,879,661.73	13.13

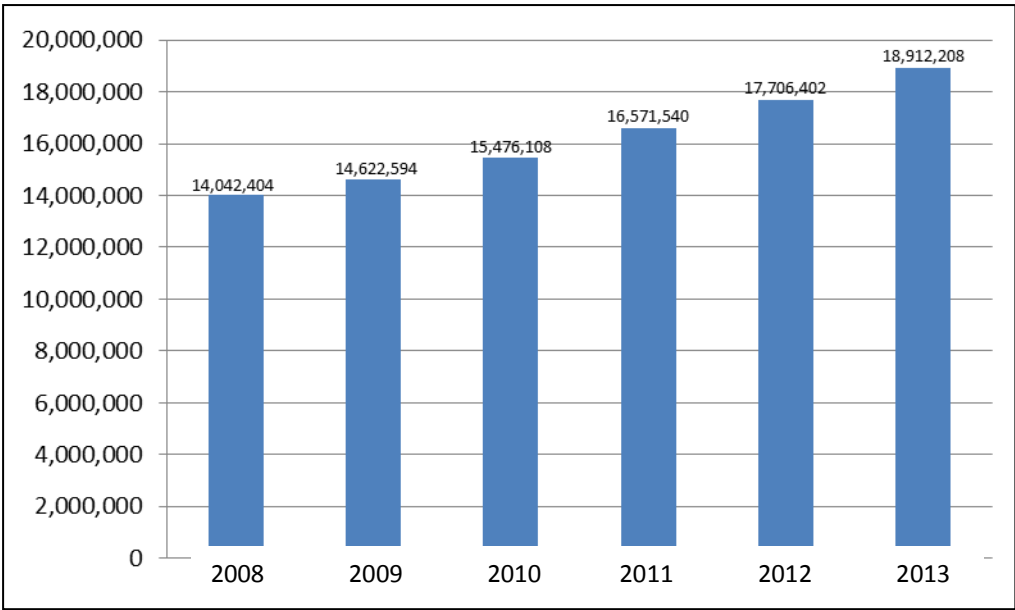
Sumber: BPS Kota Bekasi 2014.

Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013
(Juta Rupiah)

No	Sektor	2009		2010		2011		2012		2013	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.	Pertanian	130,852.55	-0.54	132,840.89	1.52	135,205.37	1.78	135,523.23	0.24	137,668.36	1.58
2.	Pertambangan dan Penggalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Industri Pengolahan	6,344,557.00	-0.69	6,539,235.91	3.07	6,868,059.82	5.03	7,297,552.02	6.25	7,703,204.62	5.56
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	562,665.48	9.76	627,784.60	11.57	696,315.14	10.92	755,784.52	8.54	814,639.75	7.79
5.	Konstruksi	542,548.82	2.52	564,793.32	4.10	620,425.47	9.85	695,464.0	12.09	796,721.4	14.56
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,148,715.64	6.84	4,424,414.17	6.65	4,782,974.62	8.10	5,170,903.30	8.11	5,595,956.62	8.22
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1,366,629.78	16.75	1,550,992.54	13.49	1,707,287.22	10.08	1,763,143.75	3.27	1,860,411.35	5.52
8.	Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan	596,092.77	5.75	646,580.76	8.47	704,351.80	8.93	765,229.50	8.64	826,450.36	8.00
9.	Jasa-jasa	930,531.69	7.81	989,465.94	6.33	1,056,920.67	6.82	1,122,801.67	6.23	1,177,155.50	4.84
Produk Domestik Regional Bruto		14,622,593.73	4.13	15.476.108,13	5,84	16.571.540,11	7,08	17.706.401,97	6,85	18.912.207,95	6,81

Sumber: BPS Kota Bekasi 2014.

Grafik 2.3
Perkembangan PDRB Kota Bekasi Tahun 2008-2013



PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara (daerah). Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara (atau PDRB bagi daerah) dengan jumlah penduduk negara (daerah) tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Jadi untuk melakukan perhitungan PDRB per kapita adalah dengan membagi nilai total PDRB (ADHB atau ADHK) terhadap jumlah penduduk yang ada pada periode perhitungan PDRB per kapita tersebut. Dengan menggunakan perhitungan PDRB per kapita maka dapat diperkirakan pendapatan rata-rata penduduk di Kota Bekasi setiap tahunnya, walaupun dalam perhitungan PDRB per kapita tidak diperhatikan ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Perkembangan PDRB per kapita Kota Bekasi tahun 2008 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.12. Terlihat dalam kurun waktu enam tahun terakhir, yaitu tahun 2008 hingga tahun 2013, PDRB per kapita Kota Bekasi selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif baik dari sisi PDRB ADHB maupun dari sisi ADHK.

Tabel 2.12
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Bekasi
Tahun 2010-2013

Tahun	PDRB per Kapita (ADHB)	PDRB per Kapita (ADHK)
2010	35.679.065,36	15.476.108,13
2011	40.528.807,92	16.571.540,11
2012	45.857.384,00	17.706.401,97
2013	51.879.659,73	18.912.207,95

Sumber: BPS Kota Bekasi , 2014.

Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Laju inflasi Kota Bekasi sejak bulan Januari tahun 2008 hingga bulan Januari tahun 2013 disajikan pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13
Laju Inflasi (%) Kota Bekasi Tahun 2008-2013
(menurut bulan)

Bulan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Januari	0,63	-0,40	1,10	0,85	0,74	1,49
Februari	1,63	0,59	0,65	0,18	-0,14	0,67
Maret	0,07	-0,18	-0,48	-0,09	0,16	0,49
April	1,24	-0,53	0,07	-0,95	0,14	-0,04
Mei	1,07	0,27	0,27	0,08	-0,04	0,48
Juni	1,24	0,01	0,74	0,51	0,51	1,48
Juli	1,99	0,44	2,16	0,56	0,83	4,06
Agustus	0,66	0,53	0,60	0,49	1,05	1,73
September	1,13	0,78	0,07	0,20	0,06	-1,20
Oktober	-0,17	0,23	-0,09	0,25	-0,29	-0,15
November	1,02	0,02	0,53	0,53	-0,12	-0,12
Desember	-0,82	0,17	1,02	0,79	0,52	0,30
Tahunan	10,10	2,63	7,88	3,45	3,46	9,19

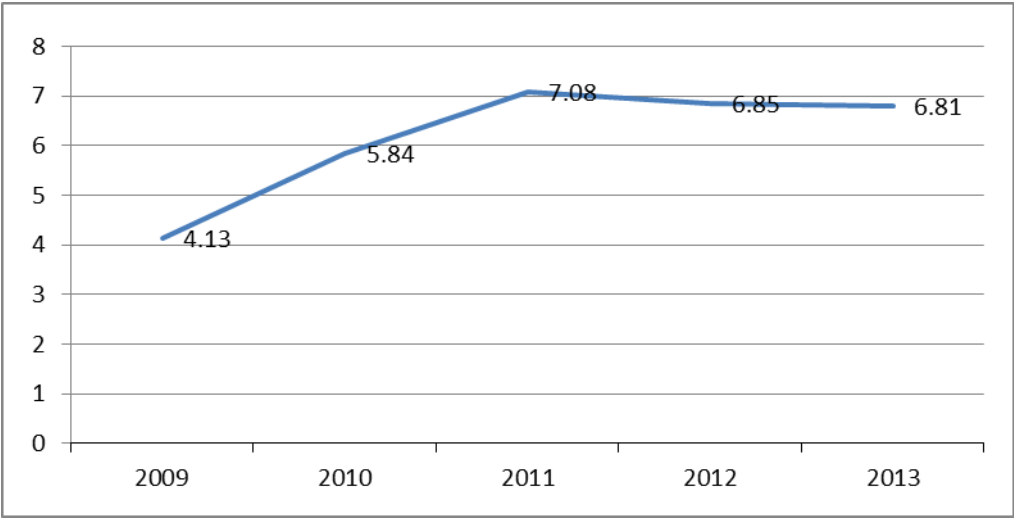
Sumber: BPS RI,2013; Berita Resmi Statistik BPS Kota Bekasi, Februari 2014

Laju inflasi Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008 hingga 2013 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Tahun 2008 tercatat angka inflasi sebesar 10,10 persen, turun drastis menjadi hanya 2,63 persen di tahun 2009, meningkat menjadi 7,88

persen, turun lagi dua tarun berikutnya menjadi 3,45 persen tahun 2011 dan 3,46 persen tahun 2012. Pada tahun 2013 angka inflasi Kota Bekasi meningkat tajam menjadi 9,19 persen.

Berdasarkan data PDRB Tahun 2009-2013, pertumbuhan ekonomi mengalami pola yang berbeda. Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2013 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 2.4
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi
Tahun 2009-2013



Sektor yang mengalami laju pertumbuhan paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya adalah sektor bangunan sebesar 14,56 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian yaitu pada tahun 2012 pertumbuhannya 0,24 persen dan pada tahun 2013 pertumbuhannya 1,58 persen.

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa pertumbuhan perekonomian Kota Bekasi periode Tahun 2009 - 2011 menunjukkan *trend* yang meningkat. Dimulai dengan laju pertumbuhan ekonomi 4,13 persen, pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi meningkat menjadi 5,84 persen dan pada tahun 2011 perekonomian Kota Bekasi kembali meningkat, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi secara nasional yaitu 7,08 persen. Namun pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi terkoreksi menjadi 6,85 persen

dan kembali terkoreksi 0,04 persen di tahun 2013 menjadi 6,81 persen.

B. Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa fokus penting dari sub aspek kesejahteraan masyarakat, adalah: IPM, APK, APM, Angka Kematian Bayi dan Kematian Ibu, Balita Gizi Buruk, Ketenagakerjaan.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (bisa juga digunakan untuk Daerah). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah adalah negara/daerah maju, negara/ daerah berkembang ataukah negara/daerah terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian rata-rata suatu negara (daerah) menurut komposit 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu sebagai berikut:

- (1) hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran;
- (2) pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar dan menengah atau *gross enrollment ratio*; dan
- (3) standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam Kemampuan Daya Beli (*Purchasing Power Parity*).

Selama lima tahun ke belakang, Kota Bekasi memiliki capaian IPM yang sangat baik dan selalu berada di atas rata-rata nilai IPM Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Pada tahun 2008, IPM Kota Bekasi tercatat sebesar 75,73 di atas pencapaian Provinsi Jawa Barat sebesar 71,12 dan Nasional sebesar 71,17. Sedangkan pada tahun 2013 nilai IPM Kota Bekasi telah meningkat menjadi 77,67 melonjak cukup signifikan dibandingkan dengan pencapaian

tahun sebelumnya sebesar 77,17. Tabel 2.14 menunjukkan angka IPM Kota Bekasi, dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia selama kurun waktu 2008-2013.

Tabel 2.14
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bekasi,
Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2008-2013

Wilayah	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kota Bekasi	75,73	76,11	76,36	76,68	77,17	77,67
Prov. Jawa Barat	71,12	71,64	72,29	72,73	73,11	73,58
Indonesia	71,17	71,76	72,27	72,27	72,87	73,81

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2015 dan Kota Bekasi Dalam Angka 2014.

a. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan dalam pengukuran IPM terdiri dari dua indikator utama, yaitu angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah penduduk dewasa.

- Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah porsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD;
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media; dan
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

AMH didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.AMH Kota Bekasi pada tahun 2008 adalah sebesar 98,46 persen dan angka ini terus meningkat dalam tahun-tahun berikutnya, hingga pada tahun 2011 AMH Kota Bekasi mencapai 98,56 persen.

Tabel 2.15
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bekasi
Tahun 2008-2013

Tahun	Angka Melek Huruf
2008	98,46 %
2009	98,49 %
2010	98,51 %
2011	98,56 %
2012	98,57 %
2013	98,60 %

Sumber: BPS Kota Bekasi 2014.

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir(TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu.

Angka rata-rata lama sekolah Kota Bekasi sejak tahun 2008 hingga tahun 2014 berada di atas angka 10 tahun dimana pada tahun 2008 angka rata-rata lama sekolah Kota Bekasi adalah 10,19 tahun, dan terakhir tahun 2014 tercatat sebesar 10,83 tahun (jauh lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 10,23).

Tabel 2.16.
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah
Di Kota Bekasi (2008-2013)

Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah
2008	10,19
2009	10,52
2010	10,53
2011	10,58
2012	10,84
2013	10,85

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2014.

b. Indeks Kesehatan

- Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate = ASDR*)

yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS.

Angka harapan hidup Kota Bekasi selama enam tahun ke belakang menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif, dimana pada tahun 2008 angka harapan hidup penduduk Kota Bekasi adalah 69,52 tahun sedangkan pada tahun 2013 angka harapan hidup penduduk Kota Bekasi adalah 70,16 tahun, dimana angka ini selalu lebih tinggi daripada angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.

Tabel 2.17
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Bekasi, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2008-2013

Wilayah	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kota Bekasi	69,52	69,58	69,64	69,70	69,76	70,16
Jawa Barat	67,80	68,00	68,20	68,40	68,60	68,80
Indonesia	68,08	68,47	68,89	69,32	69,87	70,07

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2014; Bappenas 2014.

c. Indeks Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan atau lebih sering disebut dengan indeks standar hidup layak atau indeks kemampuan daya beli dihitung berdasarkan data turunan dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk setiap tahun dengan penyesuaian terhadap kemampuan daya beli masyarakat (*purchasing power parity/ppp*). Indeks standar hidup layak menggambarkan tingkat kekuatan penduduk dalam mengakses kebutuhan hidupnya di suatu wilayah sebagai *proxi* dari kesejahteraan penduduk dalam perhitungan IPM.

Tabel 2.18

**Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Masyarakat
Kota Bekasi Tahun 2008-2013**

Tahun	Konsumsi Per Kapita
2008	639,930
2009	641,200
2010	643,920
2011	646,920
2012	650,450
2013	653,792

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2014.

Pengeluaran per kapita Kota Bekasi dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan yang positif, dimana pada tahun 2008 pengeluaran per kapita penduduk Kota Bekasi adalah sebesar Rp 639,930 dan meningkat menjadi Rp 653,792 pada tahun 2013.

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia tujuh hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Tabel 2.19 menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2011 untuk seluruh jenjang pendidikan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa angka partisipasi kasar Kota Bekasi selama kurun waktu tersebut mengalami fluktuasi yang berarti, terutama pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Bekasi
Tahun 2008-2013

No.	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	APKSD/MI	118,20	118,27	118,00	106,82	112,44	121,80
2.	APKSMP/MTs	94,53	99,60	91,95	84,65	92,23	91,75
3.	APKSMA/MA/SMK	65,65	75,10	71,02	69,92	72,45	89,88

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2014.

Pada tahun 2008, APK SD/MI adalah sebesar 118,20 persen yang kemudian meningkat tahun 2009 menjadi 118,27 persen, namun kemudian menurun pada tahun 2010 menjadi 118,00 persen, tahun 2011 menjadi 106,82 persen, tahun 2012 meningkat menjadi 112,44, dan tahun 2013 menjadi 121,80. Begitu pula pada jenjang SMP/MTs dimana pada tahun 2008 APK untuk jenjang SMP/MTs adalah 94,53 persen, meningkat pada tahun 2009 menjadi 99,60 persen, namun turun pada tahun 2010 menjadi 91,95 persen, tahun 2011 menjadi 84,65, kembali meningkat tahun 2012 menjadi 92,23 dan tahun 2013 turun lagi menjadi 91,75. Hal yang sama juga terjadi pada APK untuk jenjang SMA dan sederajat dimana pada tahun 2008 nilai APK Kota Bekasi untuk jenjang tersebut adalah 65,65 persen, meningkat pada tahun 2009 menjadi 75,10 persen, namun kembali turun pada tahun 2010 menjadi 71,02 persen, tahun 2011 menjadi 69,92 persen, naik kembali pada tahun 2012 menjadi 72,45 dan tahun 2013 menjadi 89,88.

Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 - 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 - 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika

dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah.

Tabel 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Bekasi
Tahun 2008-2013

No.	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	APM SD/MI	99,64	99,66	99,62	99,99	99,99	99,99
2.	APM SMP/MTs	90,75	91,75	89,85	82,96	90,39	90,38
3.	APM SMA/MA/SMK	62,70	63,32	68,49	69,75	71,00	85,34

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2014.

APM Kota Bekasi menunjukkan fluktuasi pada kurun waktu 2008 hingga 2013 dimana pada tahun 2008, APM SD/MI adalah 99,64 persen yang kemudian terus meningkat hingga tahun 2013 menjadi 99,99 persen. Namun APM SMP/MTs yang pada tahun 2008 tercatat sebesar 90,75 persen meningkat hingga pada tahun 2009 menjadi 91,75 persen. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2013 menjadi 90,38 persen. Sedangkan APM SMA/MA/SMK dan yang sederajat cenderung menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu dari 62,70 persen pada tahun 2008 menjadi 85,34 persen pada tahun 2013.

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi *endogen* atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat

selama kehamilan. Kematian bayi *eksogen* atau kematian *post neo-natal*, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Tabel 2.21
Angka Kematian Ibu (Kasus)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Kematian Ibu Hamil	7	4	6	9	5
Kematian Ibu Bersalin	7	10	8	12	18
Kematian Ibu Nifas	6	6	4	7	6
Jumlah	20	20	18	28	29

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2010-2012; Kota Bekasi Dalam Angka 2013, 2014

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian *Post-Neo Natal* dan angka kematian anak serta balita berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak balita.

Tabel 2.22
Penyebab Kematian Ibu

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Pendarahan	2	8	3	5	4
Emboli Air Ketuban	-	3	1	-	2
<i>Eklampsia</i>	7	2	3	2	5
Hipertensi dlm Kehamilan	-	1	2	2	1
Asma	1	1	-	1	4
Jantung	1	1	2	3	2
Sesak	-	1	-	-	-
<i>Bronkopneumia</i>	-	1	-	-	-

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Lainnya	9	2	7	15	11
Jumlah	20	20	18	28	29

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2010-2012; Kota Bekasi Dalam Angka 2013, 2014

Angka kematian ibu melahirkan di atas masih cukup tinggi meskipun kecenderungannya stagnan di angka tertentu. Umumnya kematian ibu disebabkan oleh pendarahan, eklampsia, hipertensi dalam kehamilan, jantung, dan sebab-sebab lainnya.

Kemudian, untuk Jumlah kasus kematian bayi di Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2009-2013 cenderung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2009 angka kematian bayi per 1.000 kelahiran adalah 1,08 yang kemudian meningkat pada tahun 2010 menjadi 1,56 dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2011 menjadi 0,93. Tabel 2.23 menunjukkan perkembangan angka kematian bayi di Kota Bekasi selama kurun waktu 2009-2013.

Tabel 2.23
Banyaknya Kelahiran dan Kematian Bayi di Kota Bekasi

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Kelahiran Hidup	39,540	41,516	45,329	41,516	45,329
Jumlah Kematian Bayi	43	65	42	65	42
Jumlah	39,583	41,581	45,371	41,581	45,371
Kematian bayi/1.000 kelahiran	1,08	1,56	0,93	1,56	0,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2014

Balita Gizi Buruk

Kasus balita gizi buruk adalah jumlah kasus balita dalam kondisi gizi buruk yang berhasil di data oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

Tabel 2.24
Kasus Balita Gizi Buruk

Kecamatan	2009	2010	2011	2012	2013
Pondok Gede	91	47	52	13	26
Jati Sampurna	44	23	25	20	9
Pondok Melati	77	6	15	10	5
Jatiasih	50	93	92	51	56

Bantargebang	74	33	18	26	26
Mustika Jaya	94	6	15	9	9
Bekasi Timur	133	68	33	21	21
Rawalumbu	107	28	16	17	14
Bekasi Selatan	39	44	21	25	39
Bekasi Barat	69	39	31	22	6
Medansatria	34	69	19	6	2
Bekasi Utara	321	53	70	45	49
Kota Bekasi	1.133	509	407	265	262

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2010-2014.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.24 di atas terlihat bahwa kasus kejadian balita gizi buruk di Kota Bekasi sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan angka yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Tahun 2009 tercatat jumlah kasus balita gizi buruk sebanyak 1.133 kasus, yang menurun pada tahun 2010 menjadi 509 kasus, tahun 2011 menjadi 407 kasus, terus turun drastis pada dua tahun berikutnya, yaitu tahun 2012 menjadi 265 kasus, dan terakhir tahun 2013 menjadi 262 kasus balita gizi buruk. Perkembangan yang semakin menurun ini menunjukkan sebuah kondisi yang baik bagi kesehatan dan pemenuhan gizi balita di Kota Bekasi. Namun bukan hal yang mudah untuk dapat menghilangkan sama sekali kasus balita gizi buruk ini karena sangat terkait dengan berbagai aspek di masyarakat seperti tingkat pendidikan orang tua dan keluarga, pola makan dan pemenuhan gizi di keluarga termasuk pada budaya yang berkembang di masyarakat.

Ketenagakerjaan

- Rasio Penduduk yang Bekerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup

bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif.

Tabel 2.25 menunjukkan data penduduk Kota Bekasi berdasarkan status bekerja atau tidaknya. Dalam hal ini penduduk Kota Bekasi dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja, dimana penduduk angkatan kerja dibagi menjadi penduduk bekerja dan penduduk mencari kerja (tidak bekerja). Pada kategori ini, 90,41 persen dari penduduk angkatan kerja di Kota Bekasi pada tahun 2013 atau 1.052.582 jiwa adalah termasuk ke dalam kelompok penduduk bekerja, dan 9,59 persen dari penduduk angkatan kerja atau 111,669 jiwa penduduk Kota Bekasi pada tahun 2013 termasuk ke dalam kelompok penduduk mencari kerja (tidak bekerja).

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Bekerja Kota Bekasi
Tahun 2013

Kegiatan	Penduduk	%
1. Angkatan Kerja	1.164.251	61,53
a. Bekerja	1.052.582	90,41
b. Mencari Kerja	111.669	9,59
2. Bukan Angkatan Kerja	728.004	38,47
a. Sekolah	241.247	33,14
b. Mengurus Rumah Tangga	424.165	58,26
c. Lainnya	62.592	8,60
Jumlah	1.892.255	100,00

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2014

Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di Kota Bekasi. Pemerintahan Kota Bekasi dapat terselenggara dengan baik apabila Pemerintah Kota dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta sanggup menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama satu tahun terhadap 10.000 penduduk.

Tingkat kriminalitas di Kota Bekasi selama kurun waktu 2008-2013 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, walaupun demikian *trend* menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2008 tercatat terdapat 1.921 tindak kriminalitas di Kota Bekasi, angka ini kemudian meningkat drastis menjadi 3.619 kasus pada tahun 2009 (meningkat hampir dua kali lipat, 88,39 persen), tahun 2010 meningkat menjadi 3.989(10,22 persen), tahun 2011turun 9,35 persen menjadi 3,616 kasus, tahun 2012 meningkat sedikit menjadi 3.648 (0,89 persen), dan terakhir tahun 2013 kembali turun 2,60 persen menjadi 3.553.

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Kriminalitas di Kota Bekasi
Tahun 2008-2013

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pembunuhan	0	7	7	6	3	4
2.	Penganiayaan	108	204	189	210	256	261
3.	Penganiayaan Ringan	-	-	-	40	31	-
4.	Perampokan	24	67	43	354	70	-
5.	Pencurian	298	467	764	955	813	894
6.	Perkosaan	5	7	2	2	1	4
7.	Penipuan	448	484	462	559	598	652
8.	Penggelapan	212	272	198	223	256	269
9.	Peras Ancam	40	41	29	60	59	62
10.	Pengrusakan	52	50	36	41	52	44

11.	Penculikan	5	2	7	4	5	4
12.	Penyerobotan Tanah	41	14	31	21	26	25
13.	Pemalsuan Surat	48	35	45	45	33	41
14.	Narkotika	474	461	511	360	325	295
15.	Lain-lain	162	1.508	1.665	736	1.120	998
Jumlah		1.921	3.619	3.989	3.616	3.648	3.553

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2014.

d. Kemiskinan

Indikator utama kemiskinan menurut Bappenas dapat dilihat dari: (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. Sementara menurut Bank Dunia, indikator kemiskinan adalah: (1) kepemilikan tanah dan modal yang terbatas; (2) terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota; (3) perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat; (4) perbedaan sumberdaya manusia dan sektor ekonomi; (5) rendahnya produktivitas; (6) budaya hidup yang jelek; (7) tata pemerintahan yang buruk; (8) dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan cara ini dapat dihitung *headcount index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Garis kemiskinan tersebut terdiri atas GKM dan GKNM. Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi, di antaranya adalah padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Bekasi pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami jumlah dan persentase penurunan yang relatif kecil. Pada tahun 2011 persentase penurunan adalah sebesar 1,40 persen atau setara dengan 2.071 jiwa penduduk miskin. Lalu pada tahun 2012 persentase penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi adalah sebesar 4,94 persen atau setara dengan 7.211 Jiwa penduduk miskin. Berikut adalah jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Bekasi dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.27
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 – 2013

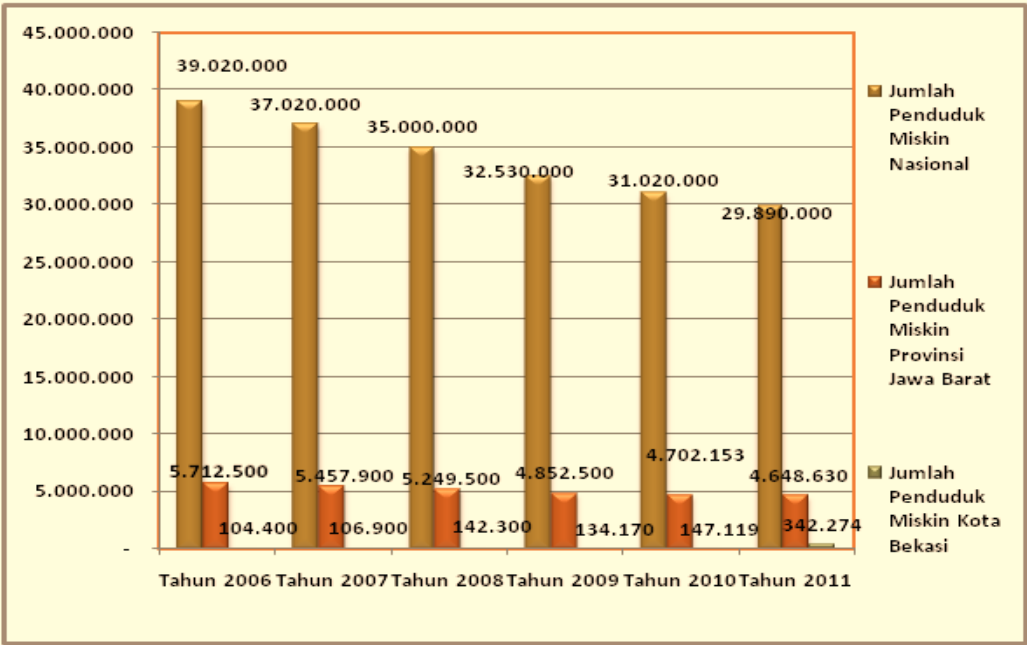
No.	Kabupaten/Kota	2010		Garis Kemiskinan	2011		Garis Kemiskinan	2012		Garis Kemiskinan	2013		Garis Kemiskinan
		Pdk miskin	%		Pdk miskin	%		Pdk miskin	%		Pdk miskin	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Kab. Bogor	477.100	9,97	214,338	470,524	9.65	235,682	451.014	8.83	252,542	499.131	9.54	271,970
2.	Kab. Sukabumi	249.500	10,65	184,127	246,108	10.28	214,191	234.615	9.79	227,741	222.822	9.24	240,188
3.	Kab. Cianjur	310.900	14,32	202,438	306,649	13.82	235,202	292.219	13.18	250,032	267.887	12.02	264,580
4.	Kab. Bandung	296.200	9,30	217,452	292,155	8.99	228,092	279.488	8.33	241,947	271.732	7.94	256,733
5.	Kab. Garut	335.600	13,94	180,406	330,905	13.47	202,350	315.785	12.72	213,707	320.888	12.79	226,308
6.	Kab. Tasikmalaya	214.500	12,79	186,126	211,598	12.36	209,238	201.508	11.76	222,594	199.346	11.57	237,114
7.	Kab. Ciamis	158.400	10,34	208,960	156,283	9.98	233,528	147.762	9.63	251,624	133.013	8.62	270,515
8.	Kab. Kuningan	152.400	14,68	200,171	150,268	14.20	230,251	142.257	13.70	245,476	139.353	13.34	261,858
9.	Kab. Cirebon	333.300	16,12	230,346	328,637	15.56	262,374	311.332	14.96	281,027	307.218	14.65	300,990
10.	Kab. Majalengka	181.100	15,52	263,377	178,566	14.98	300,741	168.617	14.46	326,962	164.908	14.07	353,727
11.	Kab. Sumedang	141.400	12,94	230,637	139,422	12.48	239,009	132.895	11.87	249,315	127.406	11.31	260,160
12.	Kab. Indramayu	276.000	16,58	264,576	272,139	16.01	301,788	257.259	15.44	325,787	251.132	14.99	350,455
13.	Kab. Subang	198.300	13,54	234,803	195,526	13.06	243,311	185.421	12.49	257,543	185.441	12.35	272,854
14.	Kab. Purwakarta	90.300	10,57	226,118	89,037	10.22	236,314	85.010	9.57	251,132	83.599	9.28	271,270
15.	Kab. Karawang	260.200	12,21	266,597	256,658	11.80	288,001	245.063	11.11	310,751	238.573	10.69	335,273
16.	Kab. Bekasi	161.700	6,11	271,901	159,536	5.93	300,013	153.063	5.25	328,244	157.663	5.20	361,510
17.	Kab. Bandung Barat	222.900	14,68	216,388	219,782	14.22	227,988	209.936	13.35	241,892	206.018	12.92	256,789
18.	Kota Bogor	90.200	9,47	278,530	88,938	9.16	305,870	84.782	8.48	331,955	83.300	8.19	360,518
19.	Kota Sukabumi	27.700	9,24	284,339	27,312	8.95	334,735	26.049	8.42	370,633	25.166	8.05	411,523
20.	Kota Bandung	118.600	4,95	279,784	116,941	4.78	292,104	111.437	4.55	314,721	117.713	4.78	340,355

No.	Kabupaten/Kota	2010		Garis Kemiskinan	2011		Garis Kemiskinan	2012		Garis Kemiskinan	2013		Garis Kemiskinan
		Pdk miskin	%		Pdk miskin	%		Pdk miskin	%		Pdk miskin	%	
21.	Kota Cirebon	35.500	12,00	251,375	35,003	11.56	284,543	33.237	11.10	307,812	31.887	10.54	334,439
22.	Kota Bekasi	148.000	6,30	332,849	145,929	6.12	365,721	139.842	5.56	403,033	137.831	5.33	449,026
23.	Kota Depok	49.600	2,84	310,279	48,906	2.75	358,259	46.973	2.46	397,687	45.912	2.32	443,302
24.	Kota Cimahi	40.100	7,40	280,155	39,539	7.15	293,143	37.732	6.68	318,871	32.276	5.63	347,234
25.	Kota Tasikmalaya	131.500	20,71	263,177	129,759	19.98	293,985	122.962	18.94	317,037	112.163	17.19	337,841
26.	Kota Banjar	14.800	8,47	193,305	14,692	8.21	219,541	13.948	7.79	234,687	12.795	7.11	250,311
	Jawa Barat	4,716.000	10.93	230,445	4,650,810	10.57	226,097	4,430.203	9.88	242,104	4,375.172	9.61	276,825

Sumber : BPS Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008-2010

Sementara menurut data dari BPS Kota Bekasi, lonjakan jumlah penduduk miskin terjadi pada periode 2010. Penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Bekasi pada tahun 2010 mengalami jumlah dan persentase kenaikan yang cukup besar. Pada tahun 2010 persentase kenaikan adalah sebesar 6,30 persen atau setara dengan 148.000 jiwa penduduk miskin. Lalu pada tahun 2011 persentase penurunan jumlah keluarga miskin di Kota Bekasi adalah sebesar 6,12 persen atau setara dengan 145.949 jiwa penduduk miskin, dan dari tahun 2010 ke tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,56 persen (atau berkurang 8.158 jiwa).

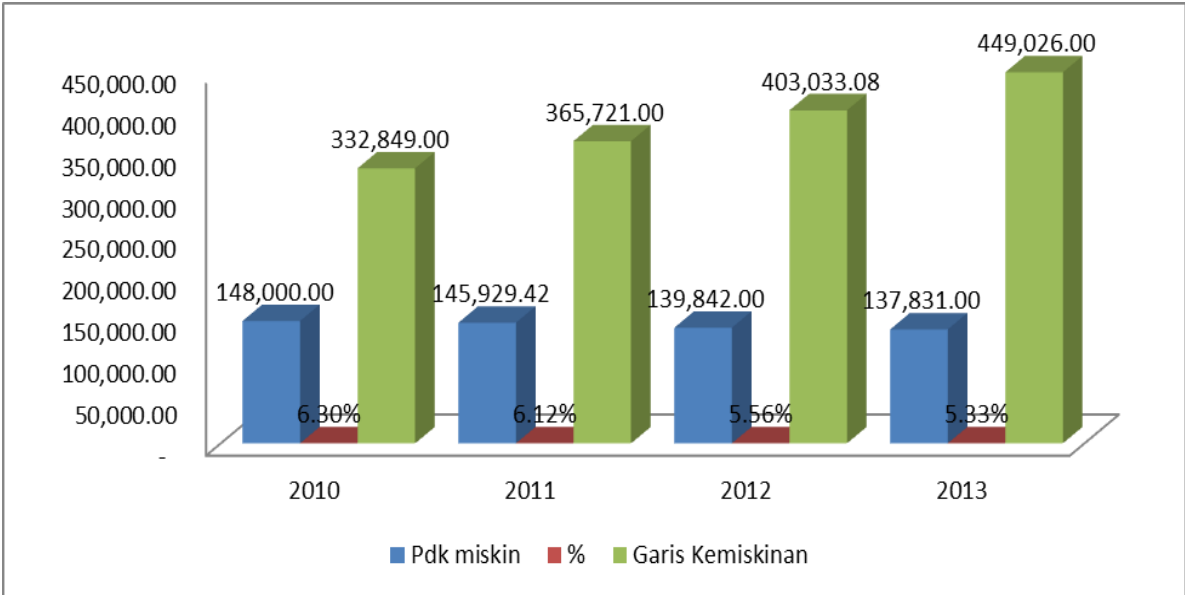
Grafik 2.6
Perbandingan Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi Tahun 2006 – 2011



Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010, BPS, PPLS Tahun 2011 BPS, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010), Indikator Kesejahteraan Daerah Jawa Barat – diolah kembali oleh TKPKD Kota Bekasi.

Berikutnya disajikan gambaran perkembangan kondisi kemiskinan Kota Bekasi tahun 2010 – 2012. Garis kemiskinan Kota Bekasi pada tahun 2012 sebesar Rp 403.303,-

Grafik 2.7
Kondisi Kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2010 – 2013



Sumber: BPS Kota Bekasi

Tabel 2.28
Kondisi Kemiskinan Kota Bekasi 2010 – 2013

No.	Kemiskinan	Satuan	2010	2011	2012	2013
1.	Tingkat Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km ²	11.326	11.655	11.986	12.318
2.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	148.000	145.929	139.808	137.800
3.	Presentase Penduduk Miskin	Persen	6,30	6,12	5,55	5,32
4.	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Ruta	37.744	36.482	34.680	34.680
5.	Garis Kemiskinan	Rupiah	332.849	365.721	403.003	449,026

Sumber: BPS Kota Bekasi 2014

2.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Layanan Urusan Wajib

Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.29
Jumlah Gedung Sekolah di Kota Bekasi Tahun 2008-2013

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	SD/MI						
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah	638	638	638	627	685	693
1.2.	Rasio Gedung-Murid	1:40	1:40	1:40	1:41	1:38	N/A
2.	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah Gedung Sekolah	190	207	201	209	209	212
2.2.	Rasio Gedung-Murid	1:43	1:42	1:42	1:40	1:40	N/A

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2014.

Rasio Guru-Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.30 menunjukkan jumlah guru dan rasio guru-murid di Kota Bekasi pada tahun 2008–2013, dimana terlihat pada tingkat Sekolah Dasar, sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 selalu terjadi peningkatan rasio guru-murid, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah guru yang signifikan terutama pada tahun 2011 dan 2012.

Tabel 2.30
Jumlah Guru dan Murid di Kota Bekasi Tahun 2008-2013

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	SD/MI						
1.1.	Jumlah Guru	7.023	7.257	7.636	10.595	11.597	10.869
1.2.	Jumlah Murid	220.381	231.331	233.608	240.938	253.537	255.849
1.3.	Rasio Guru-Murid	1 : 3,2	1 : 3,1	1 : 3,3	1 : 4,4	1 : 4,6	N/A
2.	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah Guru	3.135	4.120	5.217	3.960	5.004	4.086
2.2.	Jumlah Murid	76.376	77.054	80.385	81.754	90.190	91.034
2.3.	Rasio Guru-Murid	1 : 4,1	1 : 5,3	1 : 6,5	1 : 4,8	1 : 5,6	N/A

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2014

Sedangkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, peningkatan rasio guru-murid terjadi pada selang waktu antara tahun 2008-2010 hingga mencapai rasio 6,49 persen, sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan rasio guru murid menjadi 4,84 persen. Hal ini lebih disebabkan oleh penurunan jumlah guru yang signifikan pada tahun 2011.

Ketersediaan Prasarana dan Sarana Kesehatan

Ketersedian prasarana dan sarana kesehatan mengindikasikan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit menggambarkan daya tampung sarana dan prasarana kesehatan terhadap pasien. Sedangkan jumlah tenaga medis menggambarkan tingkat keterlayanan layanan medis di Kota Bekasi.

Jumlah puskesmas di Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013 cenderung tetap, tidak terjadi penambahan jumlah puskesmas,tetap 31 unit. Sedangkan puskesmas pembantu mengalami peningkatan jumlah pada tahun 2009 menjadi berjumlah 28 unit yang sebelumnya berjumlah 25 unit pada tahun 2008, bertambah lagi tahun 2012 menjadi 29, namun turun menjadi 24 unit tahun 2013.Untuk rumah sakit, sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 telah bertambah 11 unit rumah sakit di Kota Bekasi. Jumlah tenaga medis meningkat cukup signifikan dari tahun 2008 hingga 2013. Tercatat tahun 2008 di Kota Bekasi hanya terdapat 726 orang tenaga medis di Kota Bekasi, tahun 2011 meningkat menjadi 4.688 orang, dan tahun 2013 meningkat drastis menjadi 8.424 orang.

Tabel 2.31
Jumlah Prasarana dan Sarana Kesehatan di Kota Bekasi
Tahun 2008-2013

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Puskesmas	31	31	31	31	31	31
2.	Jumlah Pustu	25	28	28	28	29	24
3.	Jumlah Rumah Sakit	28	29	38	38	38	39
4.	Jumlah Tenaga Medis	726	777	4.289	4688	6.016	8.424

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Transportasi dan Kemacetan

Bentuk pelayanan publik lain yang cukup signifikan dirasakan masyarakat Kota Bekasi adalah transportasi publik. Meskipun sudah tersedia cukup banyak sarana layanan transportasi, seperti: angkutan kota, bus kota, kereta *commuter line* yang terintegrasi dengan Jakarta, dan sebagainya, harus diakui bahwa pengguna kendaraan pribadi berupa roda dua maupun roda empat masih cukup mendominasi. Rasio volume terhadap kapasitas (*Volume to Capacity* atau *VC Ratio*) Kota Bekasi saat ini sebesar 0,83 persen, menduduki keempat sampai dengan keenam termacet bersama Surabaya (0,83 persen) dan Depok (0,83 persen), dan setelah yang termacet Bogor (0,86 persen), DKI Jakarta (0,85 persen), dan Bandung (0,85 persen), serta masih di atas Tangerang (0,82 persen) dan Medan (0,76 persen). Menurut Kementerian Perhubungan (2014), *VC Ratio* ini menggambarkan perbandingan antara volume jalan dengan kapasitas kendaraan yang menggunakan. Rasio di atas 0,70 persen berarti kondisi jalan tersebut padat.

Kemacetan di Kota Bekasi menyebabkan rata-rata kecepatan kendaraan hanya 21,86 kilometer/jam, keenam terlambat setelah Bandung (14,3 kilometer/jam), Bogor (15,32 kilometer/jam), Jakarta (<20 kilometer/ jam), Surabaya (21 kilometer/jam), dan Depok (21,4 kilometer/jam), serta di atas Tangerang (22 kilometer/jam) dan Medan (23,4 kilometer/ jam). Sebagaimana tujuh kota lainnya yang termasuk kota-kota termacet, penyebab kemacetan di Kota Bekasi menurut data yang dihimpun Kementerian Perhubungan adalah: penyempitan jalan (40 persen), kecelakaan (25 persen), cuaca buruk (15 persen), kawasan perkantoran (10 persen), dan sisanya masing-masing lima persen karena kurangnya lampu lalu lintas dan adanya acara khusus atau lainnya.

Selain itu, sebesar 19,82 persen penduduk Kota Bekasi berumur lima tahun ke atas atau sebanyak 460.069 jiwa merupakan penduduk komuter yang berkegiatan di luar Kota Bekasi. Sedangkan komuter yang berasal dari luar kota Bekasi dan

berkegiatan di Kota Bekasi sebanyak 132.000 jiwa. Moda transportasi utama yang paling banyak digunakan untuk pergi dan pulang ke/dari tempat kerja adalah sepeda motor, kendaraan umum, dan mobil.

Tabel 2.32
Banyaknya Moda Transportasi Yang Digunakan Komuter Untuk Pergi Ke Tempat Kegiatan Tahun 2013

Moda Transportasi Untuk Pergi Ke Tempat Kegiatan	Jumlah	Persentase
Jalan Kaki	0	0,00
Sepeda	699	0,15
Sepeda Motor	238.284	51,79
Mobil	92.960	20,21
Kendaraan Umum	52.529	11,42
Kereta	31.373	6,82
Bus/Transjakarta/APTB	5.439	1,18
Kendaraan Jemputan	37.656	8,18
Lainnya	1.129	0,25
Jumlah	460.069	100,00

Sumber: BPS Kota Bekasi 2014

Komuter yang menggunakan roda dua untuk pergi 51,79 persen, sedangkan untuk pulang 50,67 persen, yang menggunakan transportasi umum untuk pergi sebesar 19,42 persen dan untuk pulang sebesar 20,78 persen, dan yang saat pergi menggunakan mobil sebesar 20,21 persen dan untuk pulang sebesar 18,60 persen.

Tabel 2.33
Banyaknya Moda Transportasi Yang Digunakan Komuter Untuk Pulang Dari Tempat Kegiatan Tahun 2013

Moda Transportasi Untuk Pulang Dari Tempat Kegiatan	Jumlah	Persentase
Jalan Kaki	1.256	0,27
Sepeda	699	0,15
Sepeda Motor	233.120	50,67
Mobil	85.587	18,60
Kendaraan Umum	58.772	12,77
Kereta	31.373	6,82
Bus/Transjakarta/APTB	5.439	1,18
Kendaraan Jemputan	42.694	9,28
Lainnya	1.129	0,25
Jumlah	460.069	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Data di atas menunjukkan bahwa untuk mobilitasnya, penduduk komuter lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan moda transportasi umum. Hal ini mempunyai potensi menambah tingkat kemacetan di Kota Bekasi.

B. Urusan Pilihan

Investasi

Investasi merupakan salah satu cara percepatan pertumbuhan perekonomian yang dapat diandalkan oleh Kota Bekasi, mengingat penanaman modal oleh pihak swasta akan turut mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain dimana *trickle down effect* yang dihasilkan oleh pertumbuhan investasi yang positif sangatlah besar dan memberikan manfaat yang baik bagi Kota Bekasi. Pertumbuhan investasi di Kota Bekasi dapat dilihat melalui beberapa indikator, indikator pertama untuk mengukur tingkat pertumbuhan investasi di Kota Bekasi adalah jumlah pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) setiap tahunnya.

Tabel 2.34
Perkembangan Jumlah Perusahaan Yang Mendapat SIUP
Di Kota Bekasi Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Januari	208	331	-	227	82
Februari	200	437	535	469	360
Maret	252	395	225	353	364
April	259	394	395	298	392
Mei	227	251	388	339	384
Juni	246	316	280	112	304
Juli	235	205	316	435	373
Agustus	217	286	217	266	151
September	223	124	197	245	257
Oktober	184	280	299	364	279
Nopember	256	347	210	364	324
Desember	489	287	277	517	447
Jumlah	2.996	3.653	3.339	3.989	3.717

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2014.

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, pemohon SIUP mengalami peningkatan total sebanyak 721 buah (24,07 persen), yaitu dari 2.996 buah menjadi 3.717 buah. Pada tahun 2009 ke

2010 terjadi peningkatan pemohon SIUP sebesar 21,93 persen, tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi penurunan 8,6 persen, tahun 2011 ke 2012 meningkat 19,47 persen, dan dari 2012 ke 2013 turun 6,82 persen.

Selain melalui jumlah pemohon perizinan usaha, indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan investasi di Kota Bekasi adalah nilai investasi dari masing-masing kategori industri yang terdapat di Kota Bekasi. Tabel 2.35 menunjukkan nilai investasi dari masing-masing kategori industri di Kota Bekasi selama kurun waktu 2008-2013.

Tabel 2.35
Nilai Investasi Berdasarkan Kategori Industri di Kota Bekasi
Tahun 2008-2013

Tahun	Industri Logam, Mesin, dan Elektronika	Industri Agro dan Hasil Hutan	Industri Kimia
2008	120.790.972.000	14.466.090.000	33.675.920.000
2009	60.364.363.480	827.365.165.423	428.294.864.572
2010	81.553.560.000	96.089.703.000	76.939.250.000
2011	45.511.400.000	43.019.916.000	57.500.000.000
2012	73.520.057.664	38.525.235.200	47.381.500.000
2013	58.997.211.890	29.460.238.000	44.060.216.000

Sumber: KBDA Kota Bekasi 2014, BKPM Kota Bekasi, 2014.

Pada Tabel 2.35 tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah invetasi yang sangat signifikan pada kategori industri kimia dimana pada tahun 2008 nilai investasi pada jenis industri ini hanya berjumlah Rp 33.675.920.000 sedangkan pada tahun 2013 nilai investasi pada jenis industri ini mencapai Rp 44.060.216.000.

Begitu pula *trend* pada jenis industri agro dan hasil hutan yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2013. Namun di lain pihak, justru terjadi penurunan nilai invetasi pada jenis industri logam, mesin dan elektronik dimana pada tahun 2008 nilai investasinya mencapai Rp 120.790.972.000 sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi Rp 58.997.211.890.

2.5. Gambaran Capaian RPJMD Tahun 2008-2013

Sebagai informasi awal, berikut disampaikan gambaran capaian RPJMD Kota Bekasi periode sebelumnya, yaitu tahun 2008-2013. Untuk itu dalam subbab ini perlu disampaikan review atas informasi dimaksud, yang secara representatif dapat dicermati dari Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun terakhir pada periode tersebut, yaitu LKPJ Kepala Daerah Tahun 2013.

LKPJ Walikota Bekasi Tahun Anggaran 2013 kiranya dapat disikapi dan ditindaklanjuti secara bijaksana dan komprehensif sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi Kota Bekasi yang dinamis. Situasi dan kondisi tersebut cukup berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2013-2018. Selain itu, selama kurun waktu berjalan, perubahan paradigma pemerintahan dan peraturan perundang-undangan turut pula mempengaruhi kebijakan daerah dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun berkat kemauan, kerja keras dan loyalitas aparatur penyelenggara pemerintahan Kota Bekasi dan didukung peran serta seluruh komponen masyarakat, para wakil rakyat, instansi vertikal terkait, berbagai program dan kegiatan dapat terlaksana dan diupayakan menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 merupakan pencerminan dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2008-2013. Berbagai program prioritas dilaksanakan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bekasi dengan mengakomodir berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program prioritas pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu program prioritas yang harus diupayakan peningkatannya pada tahun anggaran yang akan datang baik dari segi anggaran maupun kualitas pengelolaan dan pelaksanaannya sehingga mutu dan pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin meningkat dalam rangka mewujudkan "Bekasi Sehat, Cerdas dan Ihsan" yang

kemudian disempurnakan dalam Visi Pembangunan Kota Bekasi 2013-2018, yaitu “Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ikhsan”. Terhadap program dan kegiatan yang belum terealisasi dengan maksimal menjadi bahan pertimbangan sebagai program prioritas pada tahun yang akan datang.

Sebagai tambahan, perlu diinformasikan bahwa selama Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan apresiasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui prestasi atau raihan penghargaan sebagai berikut:

1. Penghargaan 20 besar kota/kabupaten se-Indonesia penerima Indonesia *Digital Society Award* (ISDA) dalam Kategori *Overall-Society* dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI;
2. Juara Harapan 2 Pelayanan Informasi melalui *Website* Pemerintah dalam Anugerah Media Humas 2013 dari Kementerian Komunikasi dan Informasi RI;
3. Peringkat Pertama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Penghargaan atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja (AKIP) dengan Predikat nilai “CC” (cukup baik/memadai) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
5. Penghargaan BMPS Pusat terkait Penerapan *PPDB Online* 100%;
6. Pemenang Utama *Indonesia Road Safety Award 2013* untuk kategori Kota Metropolitan;
7. Penghargaan sebagai Badan Publik Terbaik ke-3 dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat;
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Terbaik 2 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
9. Penghargaan Penyelenggaran Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terbaik Ke 2 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

10. Penghargaan Terbaik Klaster 2 Manajemen Kepegawaian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
11. Juara 2 Lomba *Road Safety Partnership Action* dari Dirlantas Polda Metro Jaya;
12. Juara 1 Gelar Teknologi Tepat Guna dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
13. Penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) kepada Dr. H. Rahmat Effendi sebagai Walikota Bekasi atas Rekor Kota yang Memiliki Gugus Tugas Perlindungan Anak Tingkat RT/RW terbanyak.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan keuangan Kota Bekasi dilakukan dengan mengacu kepada peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pemerintah Daerah Kota Bekasi telah melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk dapat mengetahui potensi sumberdaya keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi selama lima tahun ke belakang beserta kebijakan umum yang menjadi acuannya. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi terdiri dari tiga komponen, yaitu kinerja pengelolaan pendapatan daerah, kinerja pengelolaan belanja daerah, kinerja pengelolaan pembiayaan daerah, serta neraca daerah.

A. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, komponen pendapatan daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, yang dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

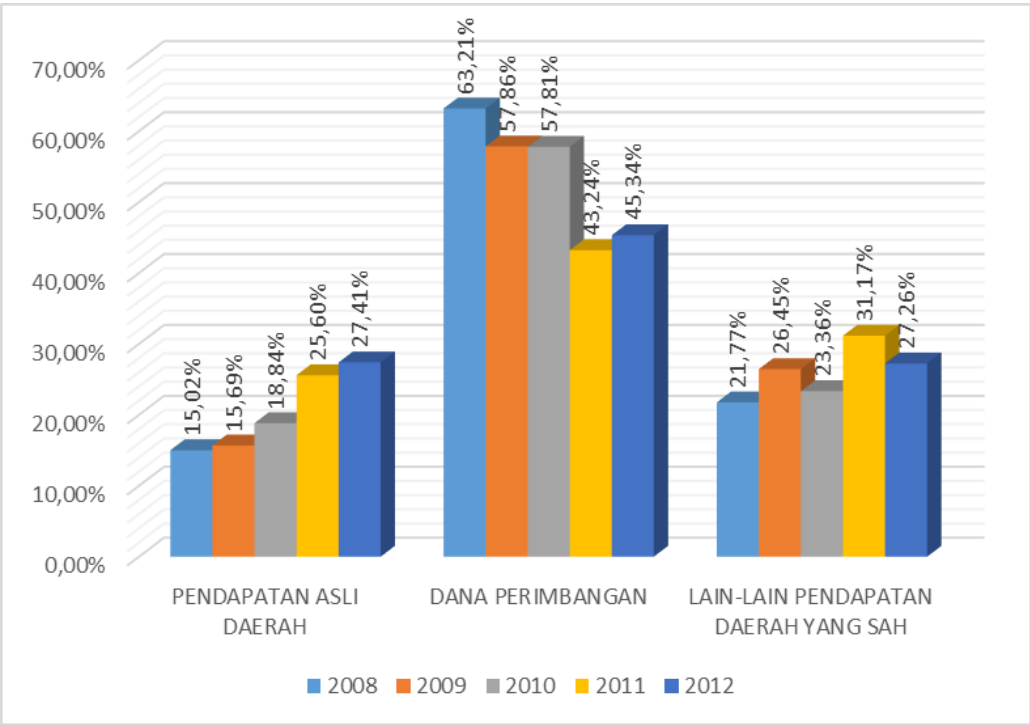
Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bekasi selama lima tahun ke belakang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2012 mencapai 22,43%, atau dengan kata lain pendapatan daerah Kota Bekasi pada tahun 2012 meningkat hingga 112,13% dibandingkan dengan pendapatan daerah pada tahun 2008. Realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi tahun 2008 hingga tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Perkembangan pendapatan daerah sebagaimana yang terjadi selama lima tahun ke belakang merupakan sebuah capaian yang baik dimana dalam lima tahun tersebut porsi PAD dapat meningkat dari 15,02% terhadap pendapatan daerah pada tahun 2008 menjadi 27,41% terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2012, sedangkan di lain sisi porsi pendapatan daerah Kota Bekasi yang berasal dari Dana Perimbangan mengalami tren penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2008 yang

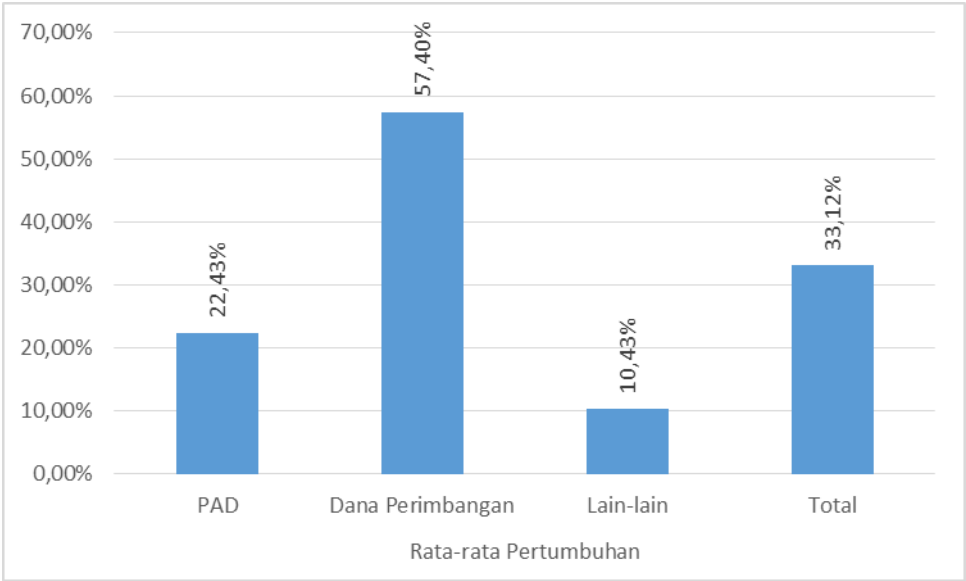
berkontribusi sebesar 63,21% terhadap total pendapatan daerah menjadi hanya sebesar 45,34% terhadap total pendapatan di tahun 2012, dimana hal ini menggambarkan kemampuan Kota Bekasi untuk semakin mandiri dari tahun ke tahun dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan. Grafik 3.1 menunjukkan perkembangan porsi setiap komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi.

Bila dilihat dari pertumbuhan rata-rata setiap tahun dari masing-masing komponen pendapatan daerah, maka dapat terlihat bahwa PAD memberikan kontribusi pertumbuhan rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan komponen pendapatan daerah lainnya. Tercatat bahwa selama kurun waktu tahun 2008-2012, PAD Kota Bekasi mengalami pertumbuhan sebesar 57,40% per tahun, sedangkan dana perimbangan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 10,43% per tahun dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata 33,12% per tahun, sehingga pendapatan daerah Kota Bekasi selama kurun waktu tersebut mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,43% per tahun. Grafik 3.2 memperlihatkan tingkat pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah selama kurun waktu 2008-2012.

Grafik 3.1
Porsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2008 – 2012



Grafik 3.2
Pertumbuhan Rata-Rata Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Tahun 2008-2012



Sebagai catatan, pada tahun 2011 terjadi peningkatan PAD yang cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan ada peraturan perundang-undangan yaitu ditetapkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana pada Undang-undang tersebut pengelolaan pendapatan BPHTB dan PBB menjadi kewenangan daerah dan menjadi bagian dari PAD dimana sebelumnya merupakan bagian dari dana perimbangan bagi hasil pajak.

B. Kinerja Pengelolaan Belanja tahun 2008-2012

Komponen belanja daerah Kota Bekasi terdiri dari:

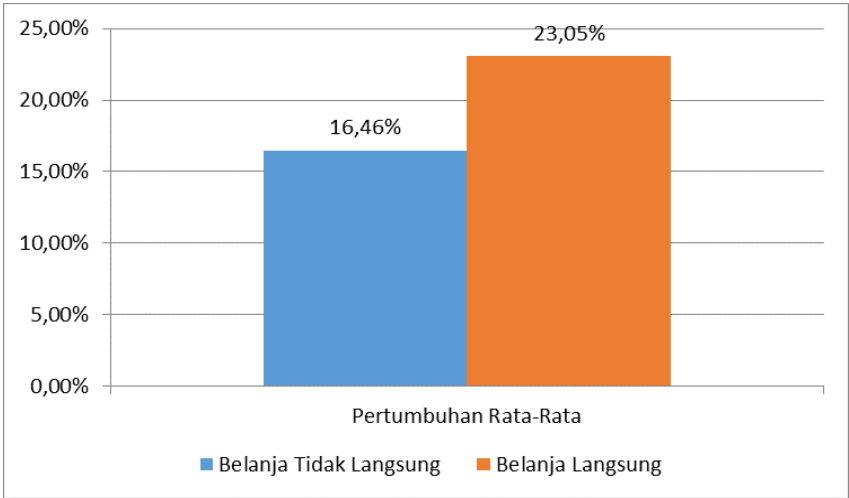
1. Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pada sisi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2012, Kota Bekasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata peningkatan belanja daerah Kota Bekasi selama kurun waktu tersebut tercatat sebesar 19,83% per

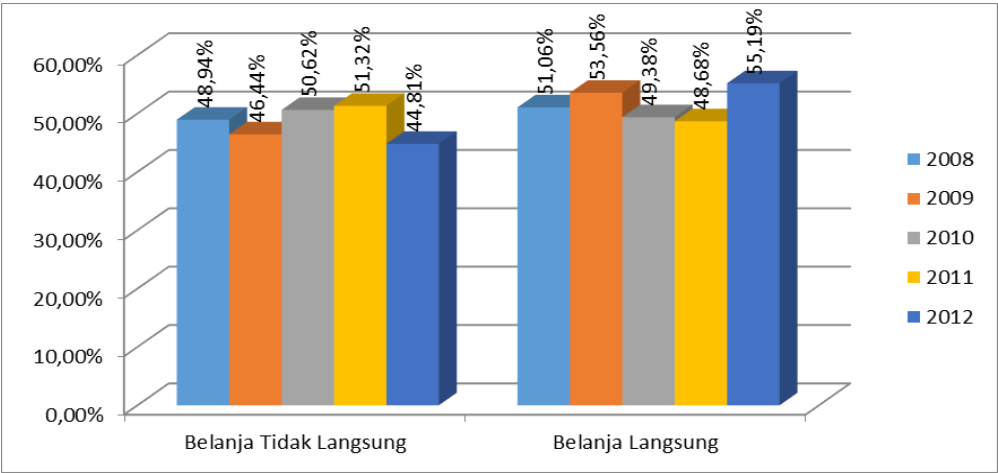
tahun. Sedangkan bila dilihat dari jenis belanja-nya, Peningkatan tertinggi terjadi pada Belanja Langsung dimana rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung Kota Bekasi adalah sebesar 23,05% per tahun dimana rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kota Bekasi hanya sebesar 16,46% per tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan belanja daerah Kota Bekasi lebih banyak dipengaruhi oleh peningkatan Belanja Langsung. Grafik 3.3 menunjukkan pertumbuhan rata-rata belanja Kota Bekasi per tahun selama kurun waktu tahun 2008-2012.

Bila diihat dari porsi masing-masing belanja terhadap total belanja daerah Kota Bekasi, terjadi tren penurunan Belanja Tidak Langsung, dimana pada tahun 2008 porsi Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah Kota Bekasi adalah sebesar 48,94% namun pada tahun 2012 Belanja Tidak Langsung hanya memberikan kontribusi sebesar 44,81% dari total Belanja Daerah Kota Bekasi. Sedangkan di lain sisi, terjadi tren peninngkatan Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Kota Bekasi, dimana pada tahun 2008 Belanja Langsung berkontribusi sebesar 51,06% terhadap total Belanja Daerah dan meningkat menjadi sebesar 55,19% dari total Belanja Daerah Kota Bekasi. Grafik 3.3 menunjukkan porsi setiap komponen belanja terhadap total Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 2008-2012.

Grafik 3.3
Pertumbuhan Rata-Rata Belanja Daerah Kota Bekasi
Tahun 2008-2012



Grafik 3.4
Porsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap
Belanja Daerah Kota Bekasi
Tahun 2008-2012



Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2008 s.d tahun 2012 Kota Bekasi

NO	KOMPONEN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH					Rataan Pertumbuhan
		2008	2009	2010	2011	2012	
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	190.044.512.359,00	231.674.925.185,00	298.584.837.239,00	568.344.278.997,00	735.485.659.293,00	57,40
	Hasil Pajak Daerah	78.715.128.234,00	99.031.556.174,00	150.822.290.606,00	375.978.082.270,00	497.833.031.022,00	106,49
	Hasil Retribusi Daerah	62.152.761.439,00	69.771.347.679,00	29.159.708.515,00	40.075.055.899,00	45.990.847.615,00	-5,20
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.638.267.307,00	5.338.487.926,00	7.286.273.514,00	7.420.041.890,00	8.701.219.586,00	27,83
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	45.538.355.379,00	57.533.533.406,00	111.316.564.604,00	144.871.098.938,00	182.960.561.070,00	60,35
II	DANA PERIMBANGAN	799.679.143.747,00	854.402.676.930,00	916.219.421.376,00	960.002.856.824,00	1.216.694.015.646,00	10,43
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	202.358.158.747,00	208.881.699.930,00	257.961.475.376,00	184.165.626.824,00	256.758.124.646,00	5,38
	Dana Alokasi Umum	590.144.385.000,00	630.392.977.000,00	647.082.121.000,00	736.741.305.000,00	935.205.053.000,00	11,69
	Dana Alokasi Khusus	7.176.600.000,00	15.128.000.000,00	11.175.825.000,00	39.095.925.000,00	24.730.838.000,00	48,92
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	275.393.322.578,00	390.672.398.047,00	370.174.784.639,00	692.004.400.962,00	731.461.580.009,00	33,12
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192.073.260,00	-
	Dana Darurat	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	223.046.725.318,00	302.682.912.747,00	189.933.882.139,00	333.566.961.713,00	429.476.609.169,00	18,51
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4.075.458.400,00	16.867.707.000,00	89.423.123.000,00	277.188.149.720,00	174.552.873.000,00	836,60
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	45.771.138.860,00	71.121.778.300,00	90.817.779.500,00	81.249.289.529,00	124.240.024.580,00	34,29
	JUMLAH	1.265.116.978.684,00	1.476.750.000.162,00	1.584.979.043.254,00	2.220.351.536.783,00	2.683.641.254.948,00	22,43

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2013

Tabel 3.2
Realisasi Belanja APBD Kota Bekasi Tahun 2008-2012

NO		URAIAN	2008*	2009*	2010*	2011*	2012**	Rataan Pertumbuhan
I		BELANJA TIDAK LANGSUNG	614,280,969,770.00	697,347,642,408.00	806,633,956,705.00	1,016,853,732,775.00	1,119,940,660,974.00	16,46
		Belanja Pegawai	515,726,051,940.00	596,890,683,755.00	727,377,013,776.00	857,301,301,365.00	984,813,917,433.00	18,19
		Belanja Bunga	374,392,650.00	336,973,353.00	300,551,888.00	264,130,432.00	228,307,675.00	-7,80
		Belanja Hibah	28,511,188,750.00	49,523,500,000.00	31,930,832,000.00	84,904,101,609.00	111,205,587,773.00	58,01
		Belanja Bantuan Sosial	42,125,466,000.00	44,702,638,000.00	39,962,400,000.00	68,403,290,000.00	22,170,129,824.00	-9,47
		Belanja Bantuan Keuangan	27,543,870,430.00	5,893,847,300.00	7,016,934,041.00	5,205,013,249.00	671,946,196.00	-19,51
		Belanja Tidak Terduga	-	-	46,225,000.00	775,896,120.00	850,772,073.00	580,17***
II		BELANJA LANGSUNG	640,886,754,569.00	804,207,570,385.00	786,813,001,490.00	964,491,068,872.00	1,379,618,882,980.00	23,,05
		Belanja Pegawai	61,261,178,950.00	94,130,550,008.00	110,005,839,647.00	146,157,871,064.00	144,381,601,000.00	27,14
		Belanja Barang & Jasa	274,740,409,015.00	367,573,969,750.00	401,486,211,286.00	494,429,432,257.00	498,051,079,622.00	16,26
		Belanja Modal	304,885,166,604.00	342,503,050,627.00	275,320,950,557.00	323,903,765,551.00	737,186,202,358.00	28,36
		JUMLAH	1,255,167,724,339.00	1,501,555,212,793.00	1,593,446,958,195.00	1,981,344,801,647.00	2,499,559,543,954.00	19,83

Sumber : Bidang Anggaran BPKAD, 30 Januari 2013

* Hasil Audit BPK

** Belum Audit BPK

C. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah merupakan salah satu komponen yang wajib disertakan di dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kode akun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas dana. Tabel 3.3 menunjukkan pertumbuhan neraca daerah Kota Bekasi tahun 2013 hingga tahun 2014.

Secara keseluruhan, kondisi aset Kota Bekasi di tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 9,81 persen. Pertumbuhan aset ini lebih banyak didominasi oleh pertumbuhan aset pada investasi jangka panjang yang meningkat sebesar 37,43 persen dan pertumbuhan aset tetap yang meningkat sebesar 9,84 persen pada tahun 2014. Sedangkan pada sisi aset lancar yang terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan mengalami penurunan sebesar 8,32 persen pada tahun 2014.

Pada sisi kewajiban, jumlah kewajiban pada neraca daerah Kota Bekasi tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan dimana terjadi penurunan kewajiban sebesar 21,42 persen. Penurunan jumlah kewajiban ini disebabkan penurunan yang signifikan pada jumlah hutang jangka pendek yang menurun hingga 21,58 persen.

Perkembangan neraca daerah Kota Bekasi sebagaimana kondisi diatas menunjukkan kondisi sangat baik dimana pada sisi aset terjadi peningkatan cukup besar hingga 9,81 persen dan pada sisi kewajiban terjadi penurunan sangat signifikan hingga mencapai 21,42 persen.

Tabel 3.3
Neraca Pertumbuhan Aset Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013 dan 2014

URAIAN	(Dalam Rupiah)	
	2013	2014
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	401,195,433,046,820	714,952,492,542,370
Kas di Bendahara Penerimaan	0	57,114,750
Kas di Bendahara Pengeluaran	990,141,866.00	399,527,578.00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	0	0
Kas di RSUD Bekasi	13,320,734,123.00	16,550,470,097.00
Kas di Puskesmas	0	15,506,873,826.00
Piutang		
Piutang Pajak	378,961,530,941,400	191,059,253,196,100
Piutang Retribusi	1,800,551,694,700	1,433,693,059,440
Piutang Dana Bagi Hasil	71,742,650,151.00	0
Piutang Dana Alokasi Umum	0	0
Piutang Dana Alokasi Khusus	0	0
Piutang Lain-lain	18,935,006,329,590	20,783,481,232,090
Persediaan	22,426,821,259,780	24,244,830,137,820
JUMLAH ASET LANCAR	909,372,869,412,290	984,987,736,418,820
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0	0
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0	0
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0	0
Investasi dalam Surat Utang Negara	0	0
Investasi Non Permanen Lainnya	6,454,372,257,760	7,195,763,957,670
Jumlah Investasi Non Permanen	6,454,372,257,760	7,195,763,957,670
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	141,917,106,057,820	196,717,533,097,510
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0	0
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0	0
Investasi Permanen Lainnya	0	0
Jumlah Investasi Permanen	141,917,106,057,820	196,717,533,097,510
Jumlah Investasi Jangka Panjang	148,371,478,315,580	203,913,297,055,180
ASET TETAP		
Tanah	1,263,598,705,680.00	1,232,636,330,490.00

URAIAN	(Dalam Rupiah)	
	2013	2014
Peralatan dan Mesin	701,172,378,520.59	793,160,004,927.99
Gedung dan Bangunan	1,524,212,186,412.60	1,883,098,730,346.60
Jalan, Jaringan dan Instalasi	2,136,492,503,874.99	2,534,962,712,706.99
Aset Tetap Lainnya	61,015,365,538.60	66,020,115,886.40
Konstruksi dalam Pengerjaan	263,548,488,459.00	25,587,659,131.00
Akumulasi Penyusutan	0	
Jumlah Aset Tetap	5,950,039,628,485.78	6,535,465,553,488.98
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0	0
Jumlah Dana Cadangan	0	0
ASET LAINNYA		
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	337,680,000	354,580,000.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tak Berwujud	14,908,447,840.00	19,058,178,840.00
Aset Lain-lain	59,213,744,829,810	32,975,824,270,450
Jumlah Aset Lainnya	74,459,872,669,810	52,388,583,110,450
JUMLAH ASET	7,082,243,848,883,460	7,776,755,170,073,430
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	480,000,00	0
Utang Bunga	0	0
Utang Pajak	0	0
Bagian Lancar Utang lancar Jangka Panjang	312,369,878.80	312,369,878.80
Pendapatan Diterima dimuka	0	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	41,963,791,329.39	32,906,955,771.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	42,276,161,208.19	33,219,325,649.80
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS DANA		
Ekuitas Dana Lancar		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	410,240,594,252,820	746,952,936,446,370
Pendapatn yang Ditangguhkan	4,836,417,996,000.00	513,542,347
Cadangan Untuk Piutang	471,439,739,116,690.00	213,276,427,487,630
Cadangan Untuk Persediaan	22,426,821,259,780.00	24,244,830,137,820
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang Jangka Pendek	(41,847,344,421,190.00)	(33,219,325,649,800.00)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	867,096,228,204,100	951,768,410,769,020
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	148,371,478,315.58	203,913,297,055.18

URAIAN	(Dalam Rupiah)	
	2013	2014
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5,950,039,628,485.78	6,535,465,553,488.98
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	74,459,872,669.81	52,388,583,110.45
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang	(1,093,294,575.80)	(780,924,697.00)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	6,171,777,684,895.37	6,790,986,508,957.61
Ekuitas Dana Cadangan		
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	0	0
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0	0
JUMLAH EKUITAS DANA	7,038,873,913,099.47	7,742,754,919,726.63
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7,082,243,848,883.46	7,776,755,170,073.43

Sumber: BPKAD Kota Bekasi 2014

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Tahun 2008 - 2012

Kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu diarahkan pada upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendukung upaya mengurangi ketergantungan Keuangan Daerah pada bantuan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat terlihat dari data yang ditampilkan pada bagian kinerja keuangan masa lalu di atas, dimana dalam kurun waktu lima tahun ke belakang, terjadi peningkatan porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi, sedangkan di lain sisi terjadi penurunan porsi pendapatan yang berasal dari dana perimbangan.

Dari sisi belanja aparatur, selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2012, telah terjadi penurunan belanja yang bersifat pemenuhan kebutuhan aparatur dimana pada tahun 2010 pemenuhan kebutuhan aparatur memiliki porsi sebesar 48,16% dari total pengeluaran pemerintah daerah, sedangkan pada tahun 2012 porsi tersebut menurun menjadi 41,28% dari total pengeluaran daerah. Walaupun dari sisi jumlah belanja aparatur terjadi peningkatan, namun perununan porsi tersebut menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pada kebutuhan non-aparatur di dalam APBD Kota Bekasi semakin lama semakin menurun. Tabel 3.4 menunjukkan porsi belanja untuk pemenuhan aparatur Kota Bekasi selama tahun 2010 hingga tahun 2012

Tabel 3.4
Porsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bekasi
Tahun 2010-2012

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2010	867,078,799,439.00	1,800,338,890,917.00	48.16
2	Tahun 2011	1,054,454,270,201.00	2,230,586,386,243.17	47.27
3	Tahun 2012	1,215,208,353,175.35	2,943,725,386,799.61	41.28

Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2013

Tabel 3.5
Defisit Riil Anggaran Kota Bekasi
Tahun 2010-2012

NO	Uraian	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1,582,441,084,726.90	2,220,351,556,783.36	2,683,413,176,455.00
2.	Belanja Daerah	1,593,446,958,195.00	1,981,344,801,647.00	2,499,559,543,954.00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21,118,315,181.00	47,095,686,302.00	33,575,071,938.00
	Defisit riil	(32,124,188,649.10)	191,911,068,834.36	150,278,560,563.00

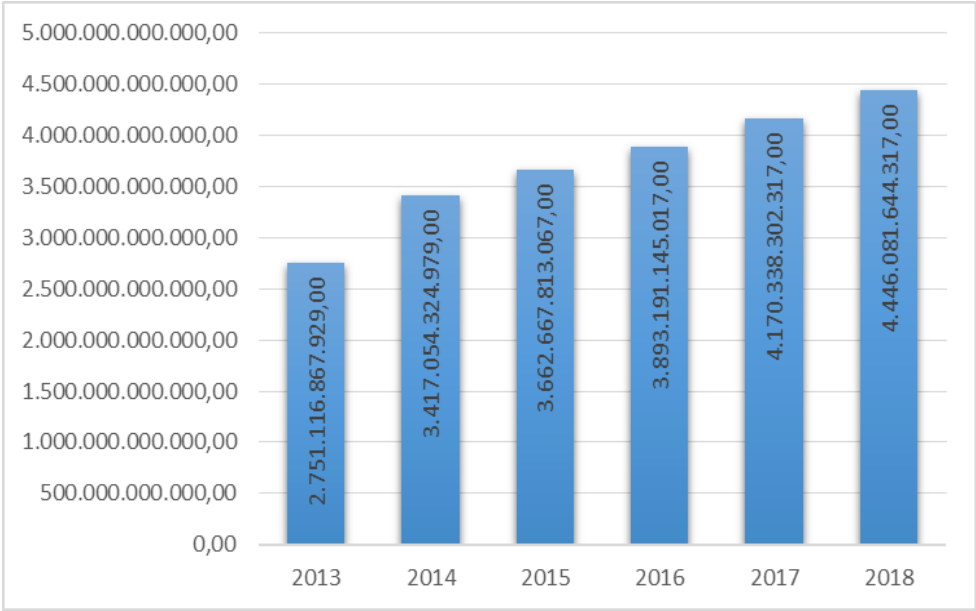
Sumber: BPKAD Kota Bekasi, 2013

3.3. Rencana Kebijakan Pengelolaan Keuangan

A. Proyeksi Pendapatan Kota Bekasi 2013-2018

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Grafik 3.5. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah ini disusun dengan memperhatikan pertumbuhan pendapatan Kota Bekasi selama beberapa tahun ke belakang juga potensi pendapatan daerah yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi selama lima tahun ke depan.

Grafik 3.5
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018



Pada tahun 2016, pendapatan daerah Kota Bekasi diproyeksikan menjadi Rp. 3.893.191.145.017,00 atau bertumbuh sebesar 6,29%. Pada tahun 2017 dan 2018, pendapatan daerah Kota Bekasi diproyeksikan bertumbuh masing-masing sebesar 7,12% dan 6,61% dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 pendapatan daerah Kota Bekasi telah berada di atas angka 4 Triliyun Rupiah. Proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Untuk mencapai proyeksi diatas, beberapa kebijakan yang akan dilakukan dimasa depan antara lain adalah:

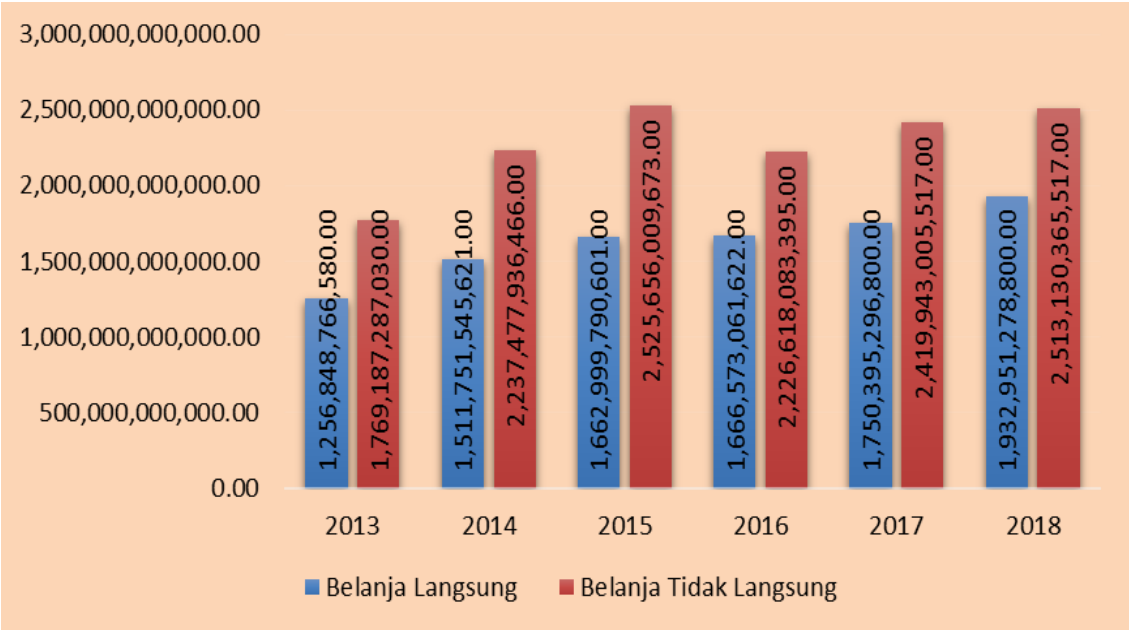
1. Peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, terutama pada pos BPHTB dan PBB.
2. Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah.
3. Identifikasi objek-objek wajib pajak dan objek retribusi.
4. Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah secara lebih profesional dan *marketable*.
5. Intensifikasi pendapatan melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi
6. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.

B. Belanja

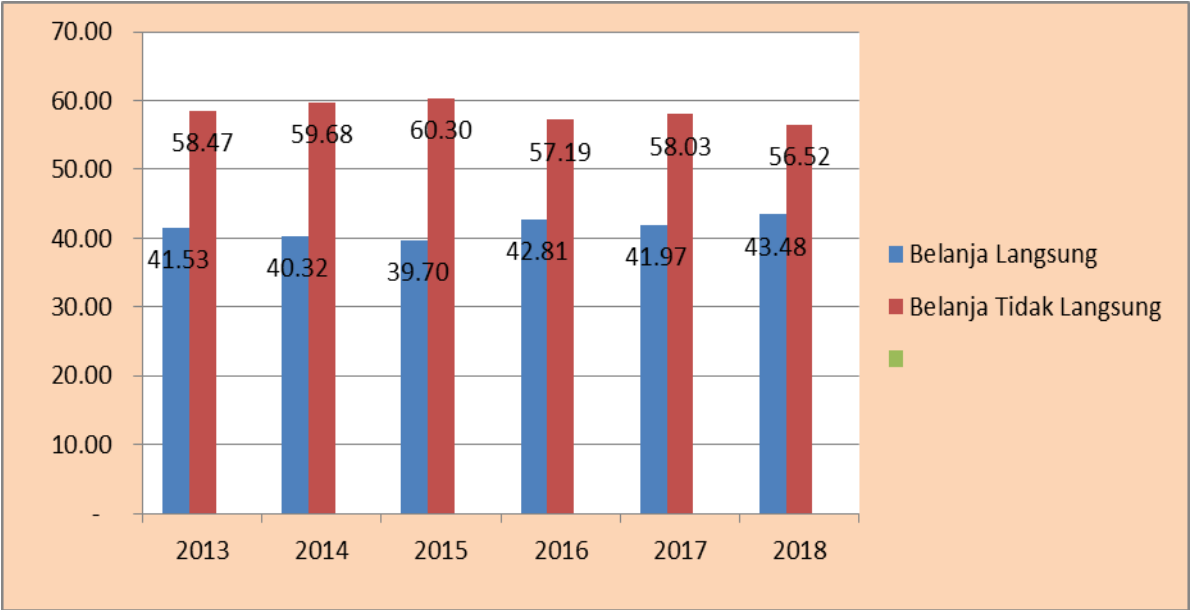
Penyusunan proyeksi belanja daerah Kota Bekasi dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan pendapatan Kota Bekasi selama lima tahun ke depan dan juga kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam menutupi defisit anggaran yang mungkin terjadi. Namun kebijakan fiskal daerah selama lima tahun ke depan diarahkan agar tidak terjadi defisit penganggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu, belanja daerah Kota Bekasi disusun dengan menggunakan asumsi pertumbuhan yang sama dengan yang terjadi pada pendapatan daerah Kota Bekasi.

Atas dasar kebijakan perencanaan penganggaran diatas, belanja daerah Kota Bekasi pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar Rp. 3.749.229.482.087,00 dan bertumbuh hingga pada tahun 2018 menjadi Rp. 4.446.081.644.317,00. Proyeksi belanja daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 3.7, sedangkan distribusi belanja daerah Kota Bekasi berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada grafik 3.6.

Grafik 3.6.
Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 (dalam milyar rupiah)



Grafik 3.7.
Grafik Porsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap
Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018



Terjadi pertumbuhan Belanja Daerah rata-rata sekitar 10,73 persen per tahun, dengan rincian:

- Tahun 2014 terjadi peningkatan belanja daerah sebesar 23,90 persen, yaitu menjadi Rp 3.749.229.482.087,00 dari Rp 3.026.036.053.610,00 pada tahun sebelumnya;
- Tahun 2015 terjadi peningkatan belanja daerah sebesar 11,72 persen, yaitu dari Rp 3.749.229.482.087,00 pada tahun 2014 menjadi Rp 4.188.655.800.274,00;
- Tahun 2016 diperkirakan terjadi peningkatan belanja daerah yang cukup konservatif untuk APBD Kota Bekasi, yaitu sebesar 2,09 persen, dari sebesar Rp 4.188.655.800.274,00 pada tahun 2015 diproyeksikan akan menjadi Rp 4.276.384.769.572,00;
- Tahun 2017 diperkirakan terjadi peningkatan belanja daerah yang cukup signifikan sebesar 7,94 persen, yaitu dari angka proyeksi sebesar Rp 4.276.384.769.572,00 pada tahun 2016 diperkirakan akan menjadi Rp 4.615.843.824.708,10; dan
- Tahun 2018 diperkirakan terjadi peningkatan belanja daerah yang juga cukup signifikan sebesar 8,00 persen, yaitu dari angka

proyeksi sebesar Rp 4.615.843.824.708,10 pada tahun 2017 diperkirakan akan menjadi Rp 4.985.274.891.140,75.

Komposisi Belanja Daerah Kota Bekasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) secara konsisten didominasi oleh Belanja Langsung, dan selama kurun waktu lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan yang konsisten. Tercatat angka 58,47 persen pada tahun 2013 menjadi 59,68 persen (2014), 60,30 persen (2015), 60,80 persen (2016), 61,96 persen (2017), dan terakhir menjadi 63,10 persen pada tahun 2018.

Hal penting yang perlu diketengahkan adalah bahwa dari tahun ke tahun dominasi Belanja Langsung pada struktur Belanja Daerah Kota Bekasi sungguh merupakan indikasi kegiatan pemerintah daerah yang semakin *pro-growth*. Sebaliknya, mengecilnya proporsi Belanja Tidak Langsung -- yang terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga-- dalam postur Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 menggambarkan *trend* semakin efisiennya kegiatan pembangunan. Dari tahun ke tahun tercatat angka Belanja Tidak Langsung menurun terus dari 41,53 persen pada tahun 2013 menjadi 40,32 persen pada tahun 2014 dan 39,70 persen pada tahun 2015, lalu menjadi 39,20 persen pada tahun 2016, berikutnya menjadi 38,04 persen pada tahun 2017, dan akhirnya menjadi 36,90 persen pada tahun 2018.

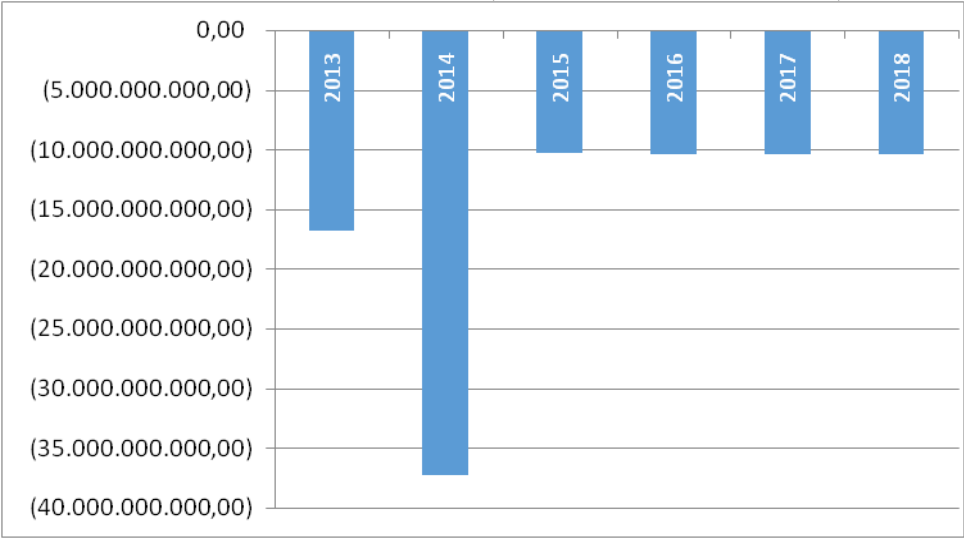
C. Pembiayaan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, komponen Pembiayaan Daerah Kota Bekasi terdiri dari: Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018), kinerja Pembiayaan Daerah Kota Bekasi selalu menunjukkan kondisi defisit. Hal ini terjadi karena tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan yang dihitung dalam Neraca Daerah selama kurun waktu tersebut. Angka defisit pembiayaan diasumsikan konstan dalam kurun waktu 2015-2018, yaitu sebesar minus Rp 10.430.369.800,00. Angka ini relatif membaik jika

dibandingkan dengan besaran defisit tahun 2014 sebesar Rp 37.295.988.121,00. Kinerja Pembiayaan Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun dapat diikuti pada Grafik 3.8 berikut:

Grafik 3.8
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 (dalam milyar rupiah)



Sama dengan kedua penjelasan sebelumnya, untuk menganalisis pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Bekasi ini untuk kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2018) digunakan angka proyeksi, dan diasumsikan besarannya tetap seperti tahun sebelumnya (2015). Dengan menggunakan acuan tahun awal 2013 dengan nilai Pembiayaan Daerah sebesar minus Rp 16.830.369.800,00 maka terjadi pertumbuhan rata-rata selama lima tahun, yaitu sebesar 10,73 persen per tahun.

Tabel 3.6
Pertumbuhan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018

NO	TAHUN ANGGARAN	BESARAN PEMBIAYAAN		
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	TOTAL
1.	2013	0,00	16.830.369.800,00	(16.830.369.800,00)
2.	2014	0,00	37.295.988.121,00	(37.295.988.121,00)
3.	2015	0,00	10.430.369.800,00	(10.430.369.800,00)
4.	2016	0,00	10.430.369.800,00	(10.430.369.800,00)
5.	2017	0,00	10.430.369.800,00	(10.430.369.800,00)
6.	2018	0,00	10.430.369.800,00	(10.430.369.800,00)

Dalam perhitungan pertumbuhan dan proyeksi Pendapatan daerah tersebut beberapa pos belum dimasukkan dalam penghitungan atau tidak diproyeksinya, seperti: Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Hibah, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Begitu pula untuk pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, penghitungannya pada tiga tahun terakhir (2016-2018) diasumsikan tetap, sama dengan tahun 2015 sebesar Rp 143.047.538.000,00 lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp 144.456.312.316,00. Kemudian untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, selama tiga tahun terakhir (2016-2018) perolehan diasumsikan tetap, yaitu Rp 952.336.721.317,00 sama dengan tahun 2015.

Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018

	URAIAN	2013*	2014*	2015**	2016**	2017**	2018**
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	969.741.298.062,21	1.205.265.728.279,60	1.091.585.050.967,61	1.259.636.929.820,14	1.458.209.547.005,90	1.693.195.324.449,06
	Hasil Pajak Daerah	723.514.857.889,00	845.771.913.123,00	847.246.861.833,56	1.028.431.662.975,26	1.211.590.472.733,93	1.429.421.439.015,19
	Hasil Retribusi Daerah	44.396.460.569,00	50.386.438.478,00	56.215.924.929,89	62.388.528.471,25	69.393.311.704,99	77.344.489.823,25
	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	11.371.037.252,00	11.745.573.968,00	11.739.955.560,90	13.118.179.604,88	14.697.011.031,28	16.508.515.409,50
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	192.271.099.612,02	297.339.410.500,55	149.382.308.643,26	155.698.558.768,76	162.528.751.535,70	169.920.880.201,12
	DANA PERIMBANGAN	1.193.018.165.096,00	1.286.650.122.476,00	1.407.184.934.164,55	1.546.159.784.639,40	1.700.107.308.236,11	1.870.640.609.337,57
	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	98.504.538.764,00	98.750.776.627,00	117.234.360.293,00	117.234.308.293,00	117.234.308.293,00	117.234.308.293,00
	Dana Alokasi Umum	1.051.235.707.000,00	1.133.417.253.000,00	1.289.950.625.871,55	1.428.925.476.346,40	1.582.872.999.943,11	1.753.406.301.044,57
	Dana Alokasi Khusus	18.669.315.000,00	21.426.024.000,00	0.00	0.00	0.00	0,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	674.674.514.515,00	988.447.276.973,00	517.062.366.021,76	563.552.303.963,71	614.226.336.320,45	669.461.031.589,29
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	435.281.396.155,00	614.453.342.270,00	517.062.366.021,76	563.552.303.963,71	614.226.336.320,45	669.461.031.589,29
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174.552.873.000,00	252.836.721.000,00	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	64.840.245.360,000	110.837.213.703,00	-	-	-	-
	JUMLAH	2.750.609.367.929,00	3.458.418.652.972,00	3.015.832.351.153,92	3.369.349.018.423,25	3.772.543.191.562,45	4.233.296.965.375,92

*) Hasil Audit BPK **) Berdasarkan proyeksi pendapatan

Tabel 3.8
Proyeksi Belanja Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG			1.662.999.790.601,00	1.666.573.061.622,00	1.750.395.296.800,00	1.932.951.278.800,00
Belanja Pegawai	306.530.354.430	335.149.910.729	1.585.984.415.801,00	1.589.557.686.822,00	1.667.227.347.000,00	1.843.477.352.000,00
Belanja Bunga	194.880.507	120.138.622	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
Belanja Hibah	87.670.003.277	65.547.098.467	45.657.192.000,00	45.657.192.000,00	49.309.767.000,00	54.240.744.000,00
Belanja Bantuan Sosial	27.933.692.500	22.271.620.000	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	27.500.000.000,00	28.875.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan			1.058.182.800,00	1.058.182.800,00	1.058.182.800,00	1.058.182.800,00
Belanja Tidak Terduga	1.531.212.875	2.762.804.789	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG			2.525.656.009.673,00	2.226.618.083.395,00	2.419.943.005.517,00	2.513.130.365.517,00
Belanja Langsung Penunjang Urusan			236.912.707.500,00	272.000.000.000,00	299.200.000.000,00	329.120.000.000,00
Belanja Urusan			2.288.743.302.173,00	1.954.618.083.395,00	2.120.743.005.517,00	2.184.010.365.517,00
JUMLAH	2.499.559.813.954,00	2.959.889.954.879,00	4.188.655.800.274,00	3.893.191.145.017,00	4.170.338.302.317,00	4.446.081.644.317,00

Asumsi pertumbuhan belanja = pertumbuhan pendapatan daerah

Tabel 3.9
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018

NO	KOMPONEN	2013*	2014*	2015**	2016**	2017**	2018**
I	PENDAPATAN	2.960.580.369.588	3.458.418.652.972	3.015.832.351.153,92	3.369.349.018.423,25	3.772.543.191.562,45	4.233.296.965.375,92
II	BELANJA	2.959.889.954.879	3.107.838.415.647	2.996.905.832.844,20	3.348.203.928.622,54	3.748.867.768.171,62	4.206.729.980.478.69
	Defisit / Surplus	690.774.709	350.580.237.325	18.926.518.309	21.145.089.800,71	23.675.423.390,83	26.566.984.897,23
III	PEMBIAYAAN (NETTO)	410.240.594.252,82	374.428.224.364,82	(10.430.369.800,00)	(10.430.369.800,00)	(10.430.369.800,00)	(10.430.369.800,00)

*) Hasil Audit BPK **) Proyeksi

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Kota Bekasi merupakan salah satu Kota terbesar dalam kawasan Jabodetabek dengan posisi strategis karena berdekatan dengan Ibukota Jakarta. Kondisi ini membuat Bekasi memiliki potensi, peluang sekaligus tantangan yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan. Bab ini memaparkan isu-isu strategis utama terkait pembangunan Kota Bekasi. Isu strategis Kota Bekasi bertitik tolak hasil identifikasi permasalahan dan harapan utama seluruh pemangku kepentingan terkait pembangunan Kota Bekasi. Isu strategis yang dibahas dalam bab ini menjadi landasan pelaksanaan pembangunan jangka menengah di Kota Bekasi. Isu strategis pembangunan Kota Bekasi tersebut kemudian diterjemahkan dan diselaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan dalam beberapa tahun ke depan (dibahas pada bab selanjutnya).

Dalam bab ini diuraikan dua hal penting, yaitu (1) permasalahan utama pembangunan daerah, dan (2) isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan daerah adalah kesenjangan harapan (*gap expectation*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah pada dasarnya terkait dengan Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada Bab II, dimana hasil analisis dan interpretasi data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah disajikan, dianalisis dan diidentifikasi permasalahannya. Permasalahan tersebut diuraikan secara kuantitatif maupun kualitatif dan dibandingkan dengan Standar atau Indikator Nasional, Regional maupun Internasional.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan terjadi dengan kondisi sebenarnya yang terdapat di daerah tersebut. Permasalahan muncul dari

persepsi pemangku kepentingan utama hasil pembangunan daerah yakni masyarakat pada umumnya, tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, tokoh perempuan, lembaga swadaya masyarakat, maupun Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD). Permasalahan pembangunan pada umumnya terjadi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat terjadi antara lain karena tidak teroptimalkannya sumberdaya pembangunan yang tersedia dan tidak teratasinya kelemahan yang membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya ancaman yang tidak terantisipasi dan mempengaruhi kinerja pembangunan serta adanya peluang yang tidak dimanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Isu strategis Kota Bekasi adalah hasil identifikasi kelemahan utama yang tidak diatasi, kekuatan utama yang belum didayagunakan secara optimal, peluang utama yang belum dimanfaatkan optimal, dan ancaman utama yang belum diantisipasi maksimal.

Isu strategis adalah pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan.

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan Kota Bekasi
- 2) Merupakan hasil benang merah pengelompokan dari identifikasi berbagai permasalahan pembangunan Kota Bekasi dalam satu tema masalah tertentu
- 3) Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan Kota Bekasi lainnya

- 4) Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target pembangunan Kota Bekasi di berbagai bidang
- 5) Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kota Bekasi
- 6) Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kota Bekasi
- 7) Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kota Bekasi yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi
- 8) Merupakan bagian dari tema atau prioritas utama dari pemenuhan janji politik Kepala Daerah Kota Bekasi

Metode penentuan isu strategis yang telah diterapkan di Kota Bekasi menggunakan:

- 1) Survei permasalahan untuk menjaring aspirasi mengenai permasalahan dan isu-isu pembangunan. Survei dilakukan melalui pengisian kuesioner secara *on paper* dan *online* Hasilnya adalah identifikasi ribuan permasalahan pembangunan Kota Bekasi di berbagai bidang.
- 2) *Focused Group Discussion* untuk mendiskusikan hasil aspirasi permasalahan dan isu-isu pembangunan ke dalam kelompok-kelompok permasalahan dan isu-isu utama. *Focussed Group Discussion* dilakukan melalui pertemuan langsung dengan seluruh pemangku kepentingan. Hasilnya adalah identifikasi daftar pendek tema-tema isu strategis utama pembangunan Kota Bekasi
- 3) *Focussed Group Discussion* untuk penentuan prioritas permasalahan utama dan isu strategis Kota Bekasi bersama Bappeda Kota Bekasi dan unsur-unsur SKPD.

Hubungan antara permasalahan pembangunan, isu strategis dan langkah-langkah konkrit pembangunan Kota Bekasi yang disusun dalam rangkaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan

Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.1
Skema Penyelarasan Permasalahan, Isu Strategis, Visi-Misi,
Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi

Berdasarkan berbagai macam analisis yakni analisis kondisi daerah dan kemampuan keuangan, analisis kondisi umum daerah, analisis capaian pembangunan, analisis kelemahan-kekuatan-peluang-ancaman (*SWOT analysis*) maka permasalahan pembangunan Kota Bekasi dibagi berdasarkan beberapa aspek strategis.

- 1) Aspek Geografis
- 2) Aspek Demografis
- 3) Aspek Sosial Kemasyarakatan
- 4) Aspek Pendidikan
- 5) Aspek Kesehatan
- 6) Aspek Perekonomian
- 7) Aspek Perindustrian dan Pariwisata
- 8) Aspek Kebudayaan dan Kesenian
- 9) Aspek Kepemudaan dan Olahraga

- 10) Aspek Daya Saing Daerah
- 11) Aspek Infrastruktur dan Sarana Prasarana.
- 12) Aspek Pelayanan Umum

Berikut ini adalah permasalahan daerah berdasarkan aspek-aspek strategis Kota Bekasi:

1. Geografis

Dari aspek geografis, permasalahan yang paling mencolok adalah porsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta jumlah dan luas lokasi banjir. Porsi RTH yang seharusnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RTRW Nasional yaitu 30%. Adapun tabel 2.4 menunjukkan bahwa porsi Ruang Terbuka Hijau terhadap seluruh luasan wilayah Kota Bekasi baru mencapai 24,1%. Hal ini berpengaruh pada daya serap tanah terhadap curah hujan dan aliran air. Porsi RTH ini masih di bawah porsi RTH yang seharusnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RTRW Nasional.

Permasalahan berikutnya adalah jumlah dan luas genangan banjir di Kota Bekasi. Tabel 4.1 menunjukkan jumlah lokasi banjir yang terjadi di Kota Bekasi selama kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2007 dimana terlihat luasan genangan banjir pada tahun 2007 jauh lebih besar dibandingkan luasan genangan banjir pada tahun 2005 dan 2006.

Tabel 4.1
Jumlah Lokasi Banjir, Luas Genangan dan Penyebab Terjadinya Banjir di Kota Bekasi Periode 2005 – 2007

Tahun	Jml Lokasi Banjir	Jml Kecamatan	Luas Genangan (Ha)	Faktor Penyebab
2005	27	8	372	Luapan akibat debit yang mengalir di sungai melebihi kapasitas alur sungai (> 505 m/det), pedangkalan saluran, luapan saluran tersier, Shypon Kalimalang
2006	12	6	103	Hujan lokal yang tidak lancar mengalir ke saluran drainase dan sungai, penyempitan saluran, sumbatan sampah, gorong-gorong tidak berfungsi
2007	67	9	1230	Kontinyuitas + deras hujan (> 18 jam), back water + luapan Kali Bekasi, kerusakan tanggul

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2013.

Selanjutnya sebaran lokasi banjir pada kurun waktu 2013-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.2, dimana pada kurun waktu tersebut wilayah yang mengalami banjir adalah seluas 493,9 Ha.

Penyebab utama terjadinya banjir pada kurun waktu tersebut adalah curah hujan lokal. Bila dibandingkan dengan kondisi wilayah terkena banjir tahun 2013 pada Tabel 2.7 maka terjadi peningkatan luasan wilayah terkena banjir yang sangat signifikan terutama pada siklus banjir lima tahunan yang terjadi di wilayah Jabotabek dimana terjadi peningkatan dua kali lipat luasan wilayah tergenang banjir yang terjadi pada tahun 2007. Dengan luasan genangan sebesar 1230 Ha pada tahun 2007, peristiwa banjir besar yang terjadi pada tahun 2007 setidaknya merendam sekitar 5,84% wilayah Kota Bekasi, sedangkan peristiwa banjir besar yang terjadi di awal tahun 2013 memiliki luasan genangan banjir sebesar 10,07% wilayah Kota Bekasi. Grafik 4.1 menunjukkan peningkatan luas wilayah terkena banjir selama kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2013.

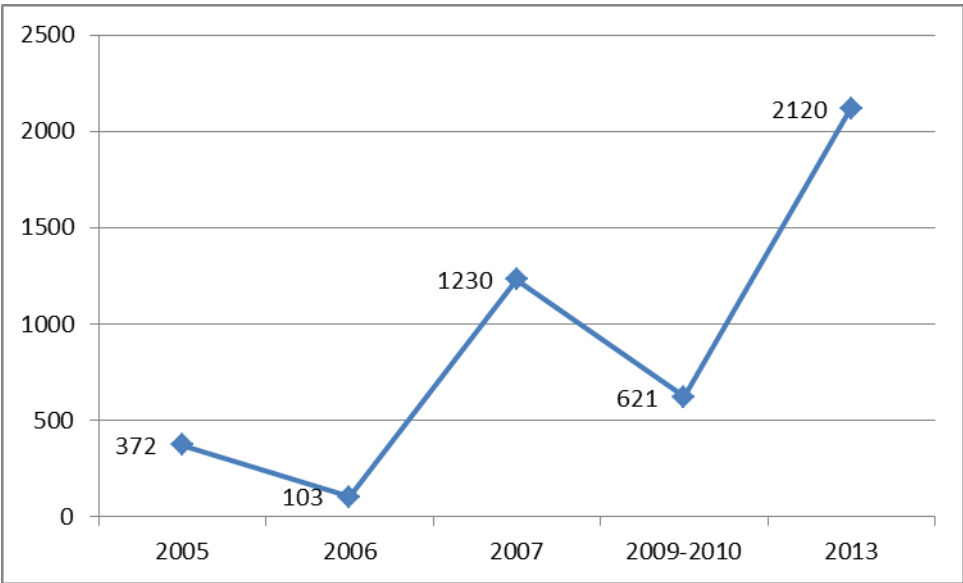
Tabel 4.2
Sebaran Luasan Bencana Banjir di Kota Bekasi Tahun 2009-2014

NO	DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	LOKASI TITIK		KECAMATAN	GENANGAN		
					LUAS (ha)	LAMA	TINGGI
I	KALI CIKEAS	1	Perum Puri Nusa Pala	Jatiasih	0,2	24 jam	0.7 - 1.2 m
		2	Perum Mandosi	Jatiasih	1	24 jam	1 - 1.5 m
		3	Perum Villa Jatirasa	Jatiasih	4	24 jam	1 - 1.5 m
II	KALI BEKASI	4	Perum PGP (Pondok Gede Permai)	Jatiasih	20	28 jam	1.0 - 1.5 m
		5	Perum PPA Jatirasa	Jatiasih	7	24 jam	2.5 - 3 m
		6	Perum Kemang IFI	Jatiasih	12	24 jam	1.0 - 1.7 m
		7	Perum PML (Pondok	Jatiasih	14	12 jam	0.4 - 0.6 m
		8	Perum Jaka Kencana	Bekasi Selatan	5	10 jam	1 - 3 m
		9	Perum Depnaker	Bekasi Selatan	1	10 jam	1- 2.5 m
		10	KEL. SEPANJANG	Rawalumbu	0,6	24 jam	0.8 - 1 m
		11	Pangkalan Bambu	Bekasi Selatan	11	24 jam	0.5 - 1 m
		12.a	RW. 26 KEL.	Bekasi Timur	5,3	24 jam	0.5 - 1 m
		12.b	Teluk Pucung	Bekasi Utara		24 jam	0.4 - 0.6 m
III	KALI CAKUNG	13	Perum Bumi Nasio Indah	Jatiasih	26	22 jam	0.5 - 1.0 m
		14	Perum Graha Indah	Jatiasih	18	18 jam	0.4 - 0.7 m
		15	Perum PHB 2 (Perumahan Harapan	Bekasi Barat		24 jam	0.4 - 0.7 m
IV	KALI JATI	16	Perum Sari Gaferi	Pondok Melati			

NO	DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	LOKASI TITIK		KECAMATAN	GENANGAN		
					LUAS (ha)	LAMA	TINGGI
		17	Perum Candra Lama	Pondok Melati	25	14 jam	0.3 - 0.6 m
		18	Perum Candra Baru	Jatiasih	15	14 jam	0.2 - 0.5 m
		19	Perum Duta Indah	Pondok Gede	3	24 jam	0.5 - 1 m
		20	Perum CKP (Cahaya	Pondok Gede		24 jam	0.5 - 1 m
		21	Perum IKIP	Pondok Gede	20	20 jam	0.8 - 1.5 m
		22	Perum Jatibening Baru	Pondok Gede	4	8 jam	0.2 - 0.6 m
V	KALI BUARAN	23	Perum Antilop	Pondok Gede	9,5	3 jam	0.6 - 1.3 m
VI	KALI BARU	24.a	Komplek AL	Pondok Gede	20	24 jam	0.3 - 0.6 m
		24.b	Pondok Surya Mandala, Taman	Bekasi Selatan		24 jam	0.3 - 0.6 m
VII	KALI BOJONG	25	Perum Bougenville	Bekasi Barat	10	6 jam	0.7 - 1 m
		26	Perum Masnaga	Bekasi Barat	10	6 jam	0.7 - 1 m
		27	Perum Harapan Baru	Bekasi Barat	10	6 jam	0.7 - 1 m
VIII	KALI RAWA TEMBAGA	28	Pondok Timur Mas, Perum Grand Galaxi, Villa Jakasetia,	Bekasi Selatan		24 jam	0.6 - 1 m
		29	Perum BSK (Bumi Satria	Bekasi Selatan	2	24 jam	0.2 - 0.5 m
IX	SALURAN	30	Perumnas 2	Bekasi Selatan	3	24 jam	0.6 - 1.0 m
		31	Kayuringin/Rawa	Bekasi Selatan	2	18 jam	0.6 - 1.0 m
X	SALURAN	32	Perum Jatiluhur &	Bekasi Barat		24 jam	0.6 - 1 m
		33	Perum Fajar Indah	Bekasi Barat	10	5 jam	0.5 - 2 m
XI	KALI KAPUK	34.a	KEL. PEJUANG	Medan Satria	1,1	5 jam	0.5 - 1 m
		34.b	Perum Pondok Sani, Komplek PGRI,	Medan Satria		24 jam	0.6 - 1 m
		35	Perum Harapan Indah	Medan Satria	5	6 jam	0.3 - 1 m
XII	KALI	36	Perum VIP (Villa Indah	Bekasi Utara	10	2 jam	0.5 - 1 m
		37	KEL. PERWIRA	Bekasi Utara	5	6 jam	0.7 - 1 m
XIII	KALI DUREN	38	Perum Duren Jaya	Bekasi Timur	12	6 jam	0.7 - 1 m
		39	Perum Danita	Bekasi Timur	15	6 jam	0.3 - 1 m
XIV	SALURAN	40	Perum Narogong	Rawalumbu	23	24 jam	0.5 - 0.6 m
		41	Perum PHP 2 (Pondok Ulin, Bekasi 2)	Rawalumbu	5	6 jam	0.7 - 1 m
XV	SALURAN	42.a	Perum PHP 1	Rawalumbu	80	24 jam	0.2 - 0.6 m
		42.b	Perum Margahayu	Bekasi Timur		24 jam	0.2 - 0.6 m
XVI	DAS KALI WISMA JAYA &	43	Perumnas 3	Bekasi Timur	91	24 jam	0.5 - 0.8 m
		44	Perum Wisma Jaya	Bekasi Timur	0,2	6 jam	0.7 - 1 m
XVII	SALURAN	45	Rawalumbu Utara	Rawalumbu		20 jam	0.5 - 1.0 m
		46	UNISMA	Bekasi Timur	1	6 jam	0.5 - 1 m
		47	Karang Kitri	Bekasi Timur		24 jam	0.2 - 0.6 m
		48	Kartini	Bekasi Timur		24 jam	0.2 -1.2 m
XVIII	KALI PETE & KALI SILUMAN	49a	Perum (PTI) Pondok Timur Indah	Mustika Jaya		24 jam	0.8 - 1.0 m
		49b	Mutiara Gading Timur	Mustika Jaya		24 jam	0.8 - 1.0 m

Keterangan : Tahun 2011 Tidak Terjadi Banjir
Sumber: Bappeda Kota Bekasi,2013.

Gambar 4.2
Grafik Perkembangan Luas Wilayah Tergenang Banjir Tahun 2015-2013 (Ha)



Keterangan: tahun 2008 dan 2011 tidak terjadi banjir

2. Demografis

Permasalahan utama dalam aspek demografi Kota Bekasi terutama terkait dengan laju pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran angkatan kerja. Laju pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan terbesar bagi Kota Bekasi pada aspek demografi. Laju pertumbuhan penduduk yang sebesar 5,12% selama rentang waktu tahun 2007 hingga tahun 2011 adalah sebuah angka laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, dan sekaligus menunjukkan perkembangan Kota Bekasi. Jumlah penduduk yang semakin besar menuntut penyediaan fasilitas dasar yang juga semakin besar terutama kebutuhan akan tempat hunian dan permukiman.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi lebih didominasi oleh laju pertambahan melalui arus migrasi penduduk dari luar wilayah Kota Bekasi, hal ini juga didorong oleh semakin tumbuhnya sektor industri dan perdagangan di Kota Bekasi

juga peran Kota Bekasi sebagai kota satelit bagi Ibukota DKI Jakarta.

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2008-2012 serta potensi dan pengaruh pertumbuhan penduduk yang lain maka diprediksi angka laju pertumbuhan penduduk hingga 2018 berkisar pada angka 3,24%.

3. Sosial Kemasyarakatan

Permasalahan utama dalam bidang sosial masyarakat Kota Bekasi adalah pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk miskin, dan penyandang masalah penyakit sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi selama ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hal ini ditunjukkan dari capaian IPM Kota Bekasi pada tahun 2009 dan 2010 yang diatas IPM Jawa Barat dan Indonesia. Namun angka IPM yang masih dibawah angka 8 belum bisa membuat kualitas sumber daya manusia Kota Bekasi dapat bersaing di tingkat global.

Walaupun prestasi IPM Kota Bekasi cukup baik di tingkat nasional dan provinsi, jumlah penduduk miskin Kota Bekasi masih cukup tinggi yang tentunya memerlukan perhatian yang serius di masa depan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin hingga tahun 2018. Selain itu jumlah penyandang masalah penyakit sosial (PMKS) di Kota Bekasi yang relatif tinggi menjadi permasalahan tersendiri bagi pembangunan Kota Bekasi

4. Pendidikan

Permasalahan utama dalam bidang pendidikan Kota Bekasi adalah jumlah rataan lama sekolah dibawah 12 tahun serta tingkat kelulusan pada setiap jenjang pendidikan (*gross enrollment ratio*). Permasalahan yang menjadi perhatian terbesar di dalam aspek pendidikan Kota Bekasi adalah rataan lama sekolah yang masih di bawah 12 tahun, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Bekasi tidak

menamatkan jenjang Sekolah Menengah Atas atau hanya menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pada satu sisi, angka rata-rata lama sekolah ini turut mempengaruhi daya saing SDM Kota Bekasi.

Namun Kota Bekasi cukup memiliki prestasi yang baik dari sisi jumlah penduduk melek aksara dimana pada rentang usia 15-44 tahun, 100% penduduk Kota Bekasi telah melek aksara. Hal ini menjadi potensi tersendiri bagi Kota Bekasi terutama dalam pencapaian IPM yang lebih baik di masa depan.

Permasalahan lain pada aspek pendidikan adalah tingkat kelulusan pada setiap jenjang pendidikan. Angka tingkat kelulusan pada setiap jenjang pendidikan atau *gross enrollment ratio* perlu mendapat perhatian karena di masa depan penilaian pada indikator pendidikan ini menjadi salah satu komponen penilaian penentuan IPM.

5. Kesehatan

Permasalahan utama dalam bidang kesehatan Kota Bekasi adalah masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan, kurangnya program kesehatan berbasis kelurahan, angka harapan hidup (AHH), jumlah balita gizi buruk, angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Pada sisi kesehatan, permasalahan yang menjadi hambatan bagi pembangunan Kota Bekasi adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Walaupun AHH Kota Bekasi secara umum lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat, namun pada tingkat global, capaian AHH Kota Bekasi masih jauh dibawah kota-kota besar lainnya. Hal ini secara langsung mempengaruhi capaian IPM Kota Bekasi.

Selain AHH, permasalahan yang terjadi pada aspek kesehatan Kota Bekasi adalah jumlah balita gizi buruk dan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ketiga isu utama

tersebut adalah permasalahan yang perlu mendapat perhatian utama dalam pembangunan Kota Bekasi.

6. Perekonomian

Permasalahan utama dalam bidang perekonomian Kota Bekasi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pendapatan asli daerah, persentase PAD terhadap total pendapatan daerah, dominasi dana perimbangan pusat ke daerah masih tinggi, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat serta pemerataan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yang selama ini menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini menunjukkan masih banyaknya potensi Kota Bekasi yang masih dapat digali lebih lanjut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun selain pertumbuhan ekonomi yang harus ditingkatkan, pemerataan pendapatan masyarakat haruslah mendapat perhatian yang tidak kalah utama, sehingga nilai pendapatan perkapita masyarakat Kota Bekasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat seluruhnya.

Selain permasalahan diatas, permasalahan lainnya pada aspek perekonomian adalah mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana saat ini PAD Kota Bekasi hanya berkisar 23,8% dari total pendapatan daerah yang berarti pendapatan Kota Bekasi masih didominasi oleh dana perimbangan pusat ke daerah.

7. Perindustrian dan Pariwisata

Permasalahan utama dalam bidang perindustrian dan pariwisata Kota Bekasi adalah pertumbuhan industri masih kurang memberi dampak positif daya serap industri terhadap tenaga kerja serta kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Sebagai salah satu kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, sudah seharusnya pertumbuhan industri yang terjadi di Kota Bekasi

memberikan dampak yang positif terhadap daya serap tenaga kerja bagi penduduk Kota Bekasi. Selain itu, sebagai dua sektor dengan kontribusi terbesar bagi PDRB Kota Bekasi, kedua sektor ini perlu mendapat perhatian yang besar sehingga dapat dioptimalkan potensinya bagi pembangunan Kota Bekasi.

Selain daya serap tenaga kerja, permasalahan yang sering terjadi pada sektor industri adalah kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan, dimana bila hal ini terus terjadi, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian Kota Bekasi, juga terhadap pekerja dan perusahaan itu sendiri. Data menunjukkan bahwa kasus perselisihan industri di Kota Bekasi cukup tinggi dan terjadi setiap tahun.

8. Kebudayaan dan Kesenian

Permasalahan utama dalam bidang kebudayaan dan kesenian Kota Bekasi adalah kurang optimalnya optimalisasi potensi budaya dan kesenian yang ada, beberapa bangunan dan monumen bersejarah belum dimanfaatkan mengairahkan kegiatan budaya dan kesenian Kota Bekasi serta program budaya dan kesenian Kota masih kurang. Selain itu terdapat permasalahan di mana belum ada program kesenian dan budaya tahunan yang dikenal secara nasional untuk menonjolkan Kota Bekasi, serta aspek budaya dan kesenian belum diejawantahkan secara maksimal ke dalam keindahan penataan Kota Bekasi.

Sebagai salah satu Kota bersejarah, Kota Bekasi menyimpan begitu banyak potensi budaya dan kesenian yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan Kota Bekasi. Namun di luar hal tersebut, upaya-upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan kesenian asli Kota Bekasi perlu mendapat perhatian yang baik mengingat besarnya arus globalisasi dan modernisasi yang terjadi. Saat ini Kota Bekasi memiliki beberapa bangunan dan monument bersejarah yang

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan wawasan kebudayaan dan kesenian Kota Bekasi.

9. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama dalam bidang kepemudaan dan olahraga Kota Bekasi adalah kurangnya aktifitas rutin kepemudaan dan olahraga di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota serta masih kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di setiap kecamatan. Masalah yang lain adalah terkait optimalisasi penggunaan sarana olahraga yang tersedia masih kurang, prestasi Pemuda Kota Bekasi dalam olahraga di level nasional masih rendah serta belum ada kegiatan tahunan olahraga Kota Bekasi yang dikenal secara nasional.

Tingginya jumlah generasi muda di Kota Bekasi perlu mendapat perhatian yang baik agar hal tersebut dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Kota Bekasi yang lebih baik. Potensi generasi muda Kota Bekasi yang besar perlu diarahkan untuk memberikan kekuatan bagi pembangunan Kota dan meminimalisir potensi-potensi negatif yang dapat timbul dari pergaulan generasi muda. Selain itu pada sisi kepemudaan, bidang olahraga Kota Bekasi yang memiliki potensi yang besar perlu terus dibina sehingga dapat mengangkat potensi dan daya saing Kota Bekasi diantara wilayah-wilayah lain.

10. Daya Saing Daerah

Permasalahan utama dalam bidang daya saing daerah Kota Bekasi adalah terkait dengan proses perijinan yang masih dianggap lambat dan tidak transparan oleh investor serta birokrasi panjang dalam pendirian investasi. Masalah lain yang harus diatasi adalah pungutan daerah yang tidak relevan dengan investasi, pungutan ilegal, gangguan keamanan serta kurangnya insentif atau rangsangan investasi daerah.

Daya saing daerah mencakup faktor-faktor input, output dan outcome. Faktor-faktor utama pembentuk daya saing terdiri dari 5 indikator utama, yaitu (1) lingkungan usaha produktif,

(2) perekonomian daerah, (3) ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia, (4) infrastruktur, sumberdaya alam dan lingkungan, (5) perbankan dan lembaga keuangan. Kinerja perekonomian (output) mencakup produktivitas tenaga kerja, tingkat kesempatan kerja, dan PDRB per kapita. Sedangkan target outcome dari daya saing daerah adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Variabel-variabel yang mempengaruhi daya saing investasi daerah dikelompokkan sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni kedalam 5 (lima) faktor, sebagai berikut: (1) kelembagaan, (2) keamanan politik dan sosial budaya, (3) ekonomi daerah, (4) tenaga kerja dan (5) infrastruktur fisik.

Aspek daya saing daerah menjadi pembeda antara satu Kota dengan Kota lainnya. Kota Bekasi sebagai salah satu Kota dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia harus mampu meningkatkan daya saingnya agar tidak tertinggal dari kota-kota lain. Salah satu permasalahan pada aspek daya saing adalah lamanya proses perijinan usaha di Kota Bekasi yang secara langsung mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bekasi. Selain itu faktor kondusifitas politik dan keamanan menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi daya saing Kota Bekasi. Tingginya angka kriminalitas di Kota Bekasi haruslah mampu dikurangi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di Kota Bekasi dan bagi para investor dan pengusaha yang hendak menanamkan modal di Kota Bekasi.

11. Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Permasalahan utama dalam bidang infrastruktur dan prasarana Kota Bekasi adalah belum meratanya dukungan infrastruktur berkualitas tinggi, masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi, tingginya jumlah titik kemacetan, masalah sampah serta perencanaan yang belum efektif dan realisasi anggaran yang belum maksimal. Sebagai salah satu sektor

yang memiliki alokasi anggaran paling besar, infrastruktur dan sarana prasarana menjadi sektor yang paling strategis dan paling menentukan kemajuan Kota Bekasi. Hanya saja seringkali hal ini terbatas oleh kemampuan anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya lain dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan di Kota Bekasi.

Berikut ini adalah tabel 4.3 rangkuman permasalahan Kota Bekasi yang telah disusun berdasarkan bidang-bidang pembangunan:

Tabel 4.3
Permasalahan Kota Bekasi berdasarkan
Bidang-Bidang Pembangunan

No	Bidang / Aspek Pembangunan	Permasalahan Utama
1	Aspek Geografis	a. Porsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) lebih rendah dari standar nasional 30% b. Jumlah lokasi banjir dan luas genangan
2	Aspek Demografis	a. Laju pertumbuhan penduduk b. Tingkat pengangguran angkatan kerja
3	Aspek Sosial Kemasyarakatan	a. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) b. Jumlah penduduk miskin c. Penyandang masalah penyakit sosial
4	Aspek Pendidikan	a. Jumlah rataan lama sekolah dibawah 12 tahun b. Tingkat kelulusan pada setiap jenjang pendidikan (<i>gross enrollment ratio</i>)
5	Aspek Kesehatan	a. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan b. Kurangnya program kesehatan berbasis kelurahan c. Angka harapan hidup (AHH) d. Jumlah balita gizi buruk e. Angka kematian ibu f. Angka kematian bayi
6	Aspek Perekonomian	a. Tingkat pertumbuhan ekonomi b. Pertumbuhan pendapatan asli daerah masih rendah c. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah d. Dominasi dana perimbangan pusat ke daerah masih tinggi e. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat f. Pemerataan pendapatan masyarakat

No	Bidang / Aspek Pembangunan	Permasalahan Utama
7	Aspek Perindustrian dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan industri masih kurang memberi dampak positif daya serap industri terhadap tenaga kerja b. Kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan
8	Aspek Kebudayaan dan Kesenian	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi potensi budaya dan kesenian yang ada b. Beberapa bangunan dan monumen bersejarah belum dimanfaatkan mengairahkan kegiatan budaya dan kesenian Kota Bekasi c. Peningkatan Program budaya dan kesenian kota d. Program kesenian dan budaya tahunan yang dikenal secara nasional untuk menonjolkan kota Bekasi e. Pengejawantahan aspek budaya dan kesenian ke dalam keindahan penataan kota Bekasi
9	Aspek Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi aktifitas rutin kepemudaan dan olahraga di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota b. Sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di setiap kecamatan c. Optimalisasi penggunaan sarana olahraga yang tersedia d. Prestasi Pemuda Kota Bekasi dalam olahraga di level nasional e. Kegiatan tahunan olahraga Kota Bekasi yang dikenal secara nasional
10	Aspek Daya Saing Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan daerah yang menghambat dunia usaha b. Proses perijinan yang masih dianggap lambat dan tidak transparan oleh investor c. Birokrasi panjang dalam pendirian investasi d. Pungutan daerah yang tidak relevan dengan investasi e. Pungutan ilegal f. Gangguan keamanan g. Kurang insentif atau rangsangan investasi daerah
11	Aspek Infrastruktur dan Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya kualitas dukungan infrastruktur b. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi c. Tingginya jumlah titik kemacetan d. Masalah sampah e. Perencanaan yang belum efektif dan realisasi anggaran yang belum maksimal
12	Aspek Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketidakjelasan standar pelayanan minimal (SPM)

No	Bidang / Aspek Pembangunan	Permasalahan Utama
		<div><div>b. Masih ada ketidakpastian waktu</div><div>c. Masih ada ketidakpastian biaya</div><div>d. Masih ada biaya tinggi</div><div>e. Petugas pelayanan yang kurang ramah</div><div>f. Kurang transparansi metode pengurusan perijinan</div><div>g. Pelayanan tidak online dan sangat manual</div><div>h. Belum adanya jalur atau nomor telepon khusus pengaduan</div><div>i. Untuk jalur atau nomor telepon khusus pengaduan sudah ada bila ditelepon tidak diangkat</div></div>

4.2 Isu Strategis Kota Bekasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi periode 2013-2018 berada pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode kedua dan ketiga dimana RPJP Nasional periode kedua memberikan penekanan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sedangkan RPJP Nasional periode ketiga menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Selain RPJP Nasional dan RPJMD Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi tahap ke dua memberikan arahan bagi pola pembangunan Kota Bekasi Periode 2013-2018 yang berada pada RPJPD Kota Bekasi periode kedua dan ketiga, dimana pada RPJPD Kota Bekasi periode kedua dijelaskan sebagai berikut:

“Tahapan ini pada dasarnya merupakan lanjutan dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan sehat, perluasan akses pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sampai pada jenjang menengah”. Pekerjaan lainnya yang penting dan relevan pada tahapan ini adalah mengarahkan sektor pendidikan untuk merumuskan model yang tepat dalam

membentuk nilai, sikap, dan perilaku kreatif di lingkungan sekolah dan pendekatan pembelajaran yang mampu menumbuhkan perilaku kreatif terhadap siswanya. Lembaga kursus tertentu diarahkan untuk memberikan bekal kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pengembangan potensi usaha perdagangan/jasa kreatif.

Sosialisasi bentuk kegiatan usaha berbasis kreatif mulai dikembangkan di kalangan pelaku usaha UMKM di Kota Bekasi. Pemahaman dan kesadaran masyarakat ditumbuhkan bahwa prinsip perekonomian *knowledge based economy* yang sejalan dengan era globalisasi, juga relevan dengan kepentingan Kota Bekasi untuk mempromosikan kegiatan usaha berbasis kreatif. Norma kehidupan sosial, ekonomi dan tata laksana pemerintahan dibangun dengan nilai, sikap dan perilaku ihsan. Secara umum tahapan ini merupakan tahapan internalisasi nilai, sikap dan perilaku kreatif dan ihsan, berlaku sebagai fondasi dan instrumen dalam membentuk “Bekasi Kota Kreatif Yang Ihsan”.

Sedangkan RPJPD Kota Bekasi tahap ketiga dijelaskan sebagai berikut:

“Tahapan ini pada dasarnya merupakan tahapan aktualisasi nilai, sikap, dan perilaku kreatif dan ihsan, pembentukan daya saing perekonomian daerah, dan pencitraan publik atas profil “Bekasi Kota Kreatif yang Ihsan”. Pemerintah dan kelembagaan sosial masyarakat memberikan apresiasi terhadap nilai, sikap, dan perilaku kreatif dan ihsan yang telah ditampilkan kinerja aparatur, pelaku usaha, maupun warga kota, untuk membentuk pola perilaku dan keteladanan kepada masyarakat.”

Sehingga dapat dilihat bahwa RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018 ini diarahkan untuk menjadi tahapan internalisasi dan aktualisasi menuju profil “Bekasi Kota Kreatif yang Ihsan”. Dimana pada tahap internalisasi, sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia mendapat perhatian yang sangat besar sedangkan pada tahap aktualisasi sektor ekonomi dan daya saing

daerah adalah hal bidang yang menjadi perhatian utama. Untuk itu perhatian dan energi pada pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan harus diarahkan untuk mencapai hal tersebut.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dengan memperhatikan arahan pada dokumen-dokumen perencanaan yang lebih tinggi di atas serta memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan keadaan wilayah dan perkembangan Kota Bekasi selama beberapa tahun di belakang dan dengan memperhatikan potensi pengembangan Kota Bekasi di masa depan maka isu-isu strategis Kota Bekasi selama lima tahun ke depan dirumuskan dalam 7 (tujuh) isu strategis Kota Bekasi yaitu:

Tabel 4.4
Tujuh (Tujuh) Isu Strategis Kota Bekasi

No	Isu Strategis
1	Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik
2	Kapasitas pendanaan pembangunan daerah
3	Tata Kota, Kualitas Pemukiman dan Lingkungan Hidup
4	Transportasi Murah, Cepat, Aman dan Nyaman
5	Kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain
6	Aktifitas Perekonomian dan daya saing Daerah
7	Pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi tahun 2005-2025 maka visi di dalam RPJMD Kota Bekasi tahun 2013-2018 haruslah memiliki keterkaitan terhadap pencapaian visi RPJPD Kota Bekasi tahun 2005-2025. Sebagaimana telah disebutkan di dalam RPJPD Kota Bekasi tahun 2005-2025 bahwa visi jangka panjang Kota Bekasi adalah untuk menjadi “Bekasi Kota Kreatif Yang Ihsan” serta memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018 selama masa kampanye, maka dengan ini dirumuskan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 adalah:

“Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”

Di mana di dalam Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 tersebut terdapat tiga buah gambaran kondisi Kota Bekasi, yaitu Bekasi Maju, Bekasi Sejahtera, dan Bekasi Ihsan. Ketiga kondisi Kota Bekasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan Kota yang maju.

“Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar

pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusahaserta lingkungan fisik, sosial dan religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

“Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik, dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Selanjutnya agar Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 dapat tercapai sesuai dengan harapan besar seluruh masyarakat Kota Bekasi, dibutuhkan serangkaian misi sebagai langkah-langkah untuk mengejawantahkan visi tersebut.

5.2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belumlah sempurna tanpa serangkaian misi yang berfungsi sebagai upaya dalam pewujudan visi tersebut. Sebagai sebuah cita-cita dan gambaran kondisi masa depan Kota Bekasi pada akhir periode pembangunan lima tahun ke depan, Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 haruslah didukung oleh serangkaian Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018. Untuk itu dengan melihat seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Bekasi dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018, berikut ini adalah Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018:

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.
4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.

Misi pertama bermakna bahwa tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas dan tanggung jawab berdasarkan sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; kesetaraan; daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); berorientasi kepada visi; akuntabilitas; pengawasan; efektivitas dan efisiensi; profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja dan penguatan integritas aparatur.

Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga ditujukan untuk mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana yang meningkat dan serasi, untuk memenuhi kehidupan warga kota yang dinamis, inovatif dan kreatif, dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian

dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Misi ketiga memiliki makna bahwa layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi.

Misi keempat memiliki makna upaya untuk meningkatkan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan industri kreatif, peningkatan daya tarik investasi, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang bermuara pada pembentukan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha, terbentuknya daya saing perekonomian kota, dan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Sedangkan misi kelima bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga Kota Bekasi harus diimbangi dengan upaya pengendalian terhadap potensi kerawanan sosial, gangguan ketertiban, penegakan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana serta kesatuan dan ketahanan bangsa, kerukunan hidup dan umat beragama, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Hubungan keterkaitan di dalam Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018 menjadi tulang punggung pembangunan Kota Bekasi selama lima tahun ke depan. Bertolak dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi inilah kemudian dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam jangka menengah.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Pembangunan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang krusial dalam menerjemahkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018 ke dalam langkah-langkah operasional.

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri No. 54/2010 kriteria perumusan yang baik adalah:

1. Dapat dijabarkan lebih operasional menjadi sasaran strategis, dengan memperhatikan Misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan
2. Satu atau beberapa Tujuan, dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan satu Misi
3. Rumusan Tujuan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategik yang ditemukan.
4. Rumusan Tujuan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Pembangunan dirumuskan dari penjelasan Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018 yang kemudian

dijabarkan ke dalam standard kinerja yang harus dicapai pada Sasaran Pembangunan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan setiap sasaran yang akan dicapai agar diikuti dengan penetapan indikator dan target capaian yang terukur setiap tahun untuk mencapai target yang diinginkan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Sasaran ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan. Dengan kata lain, upaya mewujudkan satu Tujuan dapat dilakukan melalui beberapa sasaran. Sasaran yang baik harus memenuhi kriteria SMART yaitu:

1. *Specific* : sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas
2. *Measurable*: sasaran memiliki ukuran yang jelas dan terukur.
3. *Achievable*: sasaran dapat dicapai sesuai kapasitas dan sumberdaya yang ada.
4. *Relevant*: ada keterkaitan (relevan) antara target dengan tujuan.
5. *Time Bond*: ada jadwal waktu/ periode pencapaian sasaran.

Dengan memperhartikan penjelasan Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Misi I

Misi pertama pembangunan Kota Bekasi adalah “Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan dari Misi ini adalah pencapaian kualitas dan kinerja tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang prima. Adapun sasaran operasional yang akan dicapai pada tujuan ini adalah tercapainya peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur sipil negara, meningkatnya efektifitas dan efisiensi anggaran, terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan, serta tersedianya pelayanan publik yang prima.

Tujuan dan Sasaran Misi II

Misi kedua pembangunan Kota Bekasi adalah “Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota“. Tujuan dari Misi ini adalah terciptanya ruang kota yang tertata dengan baik dan berkelanjutan yang didukung infrastruktur perkotaan modern, serta transportasi murah, cepat, aman dan nyaman.

Tujuan Terciptanya terciptanya ruang kota yang tertata dengan baik dan berkelanjutan yang didukung infrastruktur perkotaan modern diturunkan dalam sasaran operasional berupa terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, terpenuhinya kebutuhan utilitas perkotaan yang berkualitas, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas, terciptanya tata ruang kota yang berkelanjutan, terwujudnya pengelolaan sampah yang holistik berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat, berkurangnya ancaman banjir dan tersedianya Ruang Terbuka Hijau perkotaan.

Adapun sasaran operasional dari tujuan transportasi murah, cepat, aman dan nyaman adalah tersedianya multi moda transportasi yang terintegrasi dan meningkatnya kelancaran lalu lintas.

Tujuan dan Sasaran Misi III

Misi ketiga pembangunan Kota Bekasi adalah “Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya“. Tujuan dari Misi ini adalah terciptanya kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain yang berkualitas dan aksesibel. Tujuan tersebut diturunkan dalam sasaran operasional tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial, tersedianya prasarana dan sarana layanan pendidikan sesuai kebutuhan yang berkualitas, tersedianya prasarana dan sarana layanan kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas, tersedianya destinasi pariwisata perkotaan, terpelihara

dan meningkatnya aktivitas seni dan budaya, meningkatnya aktifitas kepemudaan dan meningkatnya prestasi olahraga dan aktifitas olah raga di masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Misi IV

Misi keempat pembangunan Kota Bekasi adalah “Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi serta penciptaan iklim usaha yang kondusif“. Tujuan dari Misi ini adalah perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing.

Tujuan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing diturunkan dalam sasaran operasional tersedianya prasarana dan sarana perdagangan, meningkatnya aktifitas UMKM dan ekonomi lokal berbasis industri kreatif, meningkatnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat, tersedianya kesempatan kerja, meningkatnya investasi dan terkendalinya laju inflasi.

Tujuan dan Sasaran Misi V

Misi kelima pembangunan Kota Bekasi adalah “Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai“.Tujuan dari Misi ini adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban. Tujuan ini diturunkan dalam sasaran operasional meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 5.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018

Visi: “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”					
Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.	1	Pencapaian kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang prima	1	➤ Tercapainya peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur sipil Negara ➤ Terwujudnya perencanaan pembangunan yang

Visi: “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”					
Misi		Tujuan		Sasaran	
					berkualitas dan berkesinambungan <ul style="list-style-type: none">➤ Tersedianya pelayanan publik yang prima➤ Meningkatnya efektifitas dan efisiensi anggaran dan kemampuan pendanaan daerah
2	Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.	2	Terciptanya Ruang Kota yang Tertata Dengan Baik dan Berkelanjutan yang Didukung Infrastruktur Perkotaan Modern	2	<ul style="list-style-type: none">➤ Terpenuhi kebutuhan infrastruktur perkotaan yang berkualitas➤ Terpenuhi kebutuhan utilitas perkotaan yang berkualitas➤ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup➤ Terpenuhi perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas➤ Terciptanya tata ruang kota yang berkelanjutan➤ Terwujudnya Pengelolaan sampah yang holistik berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat➤ Berkurangnya ancaman banjir➤ Tersedianya Ruang Terbuka Hijau perkotaan
		3	Transportasi Murah, Cepat, Aman dan Nyaman	3	<ul style="list-style-type: none">➤ Tersedianya multi moda transportasi yang terintegrasi➤ Meningkatnya kelancaran lalu lintas

Visi: “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”					
Misi		Tujuan		Sasaran	
3	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.	4	Layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain yang berkualitas dan aksesibel	4	<ul style="list-style-type: none">➤ Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial➤ Tersedianya prasarana dan sarana layanan pendidikan sesuai kebutuhan yang berkualitas➤ Tersedianya prasarana dan sarana layanan kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas➤ Tersedianya destinasi pariwisata perkotaan➤ Terpelihara dan meningkatnya aktivitas seni dan budaya➤ Meningkatnya aktifitas kepemudaan➤ Meningkatnya prestasi olahraga dan aktifitas olah raga di masyarakat
4	Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.	5	Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing	5	<ul style="list-style-type: none">➤ Tersedianya prasarana dan sarana perdagangan➤ Meningkatnya aktifitas UMKM dan ekonomi lokal berbasis industri kreatif➤ Meningkatnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat➤ Tersedianya kesempatan kerja➤ Meningkatnya investasi➤ Terkendalinya laju inflasi

Visi: “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”					
Misi		Tujuan		Sasaran	
5	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.	6	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban	6	<div>➤ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</div> <div>➤ Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat</div>

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi Umum

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dari aktifitas yang dibuat oleh manajemen puncak dan harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif langkah-langkah yang berisikan program-program. Dalam hal ini strategi yang dimaksud adalah langkah strategis dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Bekasi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*)

Strategi pembangunan Kota Bekasi selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan

Strategi dengan berorientasi pada pertumbuhan menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Beberapa langkah dalam

mencapai pertumbuhan ekonomi yaitu dengan upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusatkan, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Langkah strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi yaitu pertama dengan melakukan alokasi pembiayaan modal melalui investasi dan penyertaan modal pemerintah pada sektor-sektor strategis daerah dan peningkatan kemampuan dan kapasitas industri kecil dan menengah serta pemanfaatan potensi-potensi unggulan daerah untuk mewujudkan daya saing yang handal.

2. Pemerataan

Strategi pembangunan melalui prinsip pemerataan dilakukan dengan peningkatan peran serta yang sebesar-besarnya dari masyarakat pada proses pembangunan dan melalui rekayasa social (*social enginering*) dengan membuat rencana induk dan paket program terpadu yang dirancang untuk mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang memiliki keunggulan kompetitif. Dengan strategi pemerataan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan yang mungkin akan terjadi akibat pertumbuhan perekonomian yang pesat di Kota Bekasi dan untuk memberikan kesempatan kepada golongan masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya pembangunan.

3. Kemandirian

Strategi pembangunan dengan bertopang pada kemandirian ekonomi. Pemerintah kota Bekasi akan berupaya meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif. Bekasi sebagai salah satu kota yang berada di kawasan dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di Indonesia sehingga pembangunan Kota Bekasi tidak lagi bergantung kepada perkembangan dari daerah-daerah lain di kawasan sekitarnya.

Selain itu strategi pembangunan dengan prinsip kemandirian dilakukan untuk mewujudkan pola pembangunan kota yang teratur dan tertata rapi dengan tetap memperhatikan perencanaan tata ruang regional dan wilayah.

4. Integratif, holistik dan inovatif

Strategi pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya haruslah dilaksanakan secara integratif, holistik dan inovatif dengan mengaitkan seluruh sektor-sektor dan aspek-aspek dalam pembangunan termasuk pengembangan Perguruan Tinggi sebagai *center of excellent* sehingga memberikan dampak pada hasil pembangunan yang optimal pada seluruh sisi kehidupan masyarakat Kota Bekasi.

Melalui keempat strategi pembangunan diatas, diharapkan pembangunan Kota Bekasi yang dilakukan secara konsisten dapat mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kota Bekasi.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi menghubungkan antara strategi pembangunan yang dipilih dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Arah kebijakan selama lima tahun ke depan dijabarkan ke dalam tahapan-tahapan tahunan sebagai berikut:

1. Tahun pertama (Tahun Kelembagaan dan Penataan):

Arah kebijakan pada tahun pertama RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018 atau tahun Kelembagaan dan Penataan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor pembangunan Kota Bekasi sebagai penopang utama pelaksanaan pembangunan di

Kota Bekasi selama jangka waktu lima tahun masa pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018. Penataan seluruh sektor pembangunan dilakukan untuk mempersiapkan seluruh lini pembangunan di Kota Bekasi untuk menghadapi periode pembangunan yang akan berjalan dengan lebih pesat di masa yang akan datang. Penguatan kelembagaan dilakukan tidak hanya pada lembaga pemerintah daerah, namun juga pada kelembagaan sosial masyarakat dan kelembagaan politik yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan pembangunan Kota Bekasi. Keberhasilan dari capaian arah kebijakan tahun pertama ini dapat dilihat dengan semakin tertatanya kelembagaan pemerintah Kota Bekasi dan meningkatnya kapasitas organisasi dan aparatur sipil yang didukung arah kebijakan yang terintegrasi yang melihat melibatkan seluruh stakeholder yang ada.

2. Tahun kedua (Tahun Pelayanan Dasar):

Arah kebijakan pada tahun kedua RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018 atau disebut juga sebagai tahun pelayanan dasar diarahkan untuk mencapai pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan percepatan pembangunan Kota Bekasi di tahun pembangunan selanjutnya. Selain itu pada tahun ke dua pembangunan RPJMD periode 2013-2018 diarahkan untuk dapat memperkuat aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga memberikan jaminan kondusifitas Kota Bekasi di tahun-tahun berikutnya. Keberhasilan dari capaian program tahun kedua ini dapat dilihat dengan semakin baiknya proses pelayanan publik dan tersedianya standar pelayanan minimal diseluruh instansi pemerintah Kota Bekasi.

3. Tahun ketiga (Tahun Infrastruktur dan Utilitas):

Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018 atau tahun Infrastruktur dan Utilitas diarahkan untuk memberikan landasan pembangunan yang bertumbuh pesat melalui penyediaan infrastruktur dan

utilitas perkotaan terutama pada infrastruktur dan utilitas dasar yang menjadi pendorong bagi masuknya modal pihak swasta seperti jaringan jalan, jaringan listrik dan ketersediaan air bersih, dengan didukung oleh peningkatan pelayanan transportasi, serta perumahan dan pemukiman dengan dibarengi pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Keberhasilan dari capaian tahun ketiga dapat dilihat dengan semakin meningkatnya infrastruktur perkotaan, meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman, semakin meningkatnya pengendalian sampah dan banjir yang didukung semakin meningkatnya sistem drainase perkotaan dan semakin meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bekasi.

4. Tahun keempat (Tahun Investasi dan Perekonomian Daerah):

Arah kebijakan pada tahun keempat RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018 atau disebut sebagai tahun investasi dan perekonomian daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas perekonomian Kota Bekasi. Untuk mendorong semakin tingginya minat investasi di Kota Bekasi maka akan diupayakan untuk melakukan perbaikan fasilitas perdagangan, serta memperkuat iklim investasi dengan melakukan penataan perda tentang investasi, sehingga dapat terwujudnya skema *public private partnership* yang menguntungkan semua pihak. Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah pemerintah berupaya untuk meningkatkan para wajib pajak serta pengelolaan PAD secara efektif dan efisien. Beberapa indikator keberhasilan capaian tahun keempat ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor yang masuk ke Kota Bekasi, meningkatnya wajib pajak dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah.

5. Tahun kelima (Tahun Inovasi dan Kreativitas):

Arah kebijakan pada tahun kelima atau tahun terakhir RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018 atau tahun inovasi dan

keaktivitas diarahkan untuk mencapai tata kehidupan masyarakat kota Bekasi yang seimbang pada seluruh aspek dengan menyempurnakan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dengan memperkuat peningkatan potensi masyarakat pada sisi pariwisata, seni, pemuda, dan olahraga serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sehingga terwujud Kota Bekasi yang Ihsan. Adapun beberapa indikator keberhasilan pencapaian kebijakan tahun kelima yaitu meningkatkannya aktifitas pariwisata, seni dan budaya, peningkatan event event kepemudaan dan olahraga.

Table 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018

No	Strategi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
1	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi dan aparatur pemerintah, perencanaan pembangunan serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan pendanaan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam semua sektor pembangunan	Pencapaian kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tercapainya peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur sipil Negara ➤ Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan ➤ Tersedianya pelayanan publik yang prima ➤ Meningkatnya efektifitas dan efisiensi anggaran dan kemampuan pendanaan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong peningkatan PAD ➤ Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. ➤ Peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur untuk mendorong percepatan pelayanan public ➤ Integrasi perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip SMART (specific, measurable, attainable, realistic, time bound) dan visioner yang didukung pengendalian dan evaluasi yang optimal ➤ Peningkatan layanan administrasi kependudukan melalui pembangunan sistem kependudukan berbasis IT ➤ Percepatan proses pelayanan publik

No	Strategi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
2	penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan yang sesuai dengan dinamika pertumbuhan kota dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang kota yang berkelanjutan	Terciptanya Tata Kota, Kualitas Pemukiman dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perkotaan yang berkualitas ➤ Terpenuhinya kebutuhan utilitas perkotaan yang berkualitas ➤ Meningkatnya kualitas lingkungan hidup ➤ Terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas ➤ Terciptanya tata ruang kota yang berkelanjutan ➤ Terwujudnya Pengelolaan sampah yang holistik berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat ➤ Berkurangnya ancaman banjir ➤ Tersedianya Ruang Terbuka Hijau perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan utilitas perkotaan ➤ Perbaikan kualitas perumahan dan pemukiman dengan penyediaan rumah layak huni, rusunawa dan rusunami ➤ Perbaikan kualitas perumahan dan pemukiman dengan penyediaan rumah layak huni, rusunawa dan rusunami ➤ Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 – 2031 ➤ Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai perolehan Adipura

No	Strategi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
3	penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang murah, cepat, aman dan nyaman	Transportasi Murah, Cepat, Aman dan Nyaman	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedianya infrastruktur transportasi perkotaan ➤ Tersedianya multi moda transportasi yang terintegrasi ➤ Meningkatnya kelancaran lalu lintas ➤ Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perbaikan prasarana dan sarana transportasi melalui integrasi moda transportasi, pengendalian kemacetan, dan peningkatan kualitas dan kuantitas rambu
4	peningkatan kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya	Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Sosial Lainnya yang Berkualitas dan Aksesibel	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial ➤ Tersedianya prasarana dan sarana layanan pendidikan sesuai kebutuhan yang berkualitas ➤ Tersedianya prasarana dan sarana layanan kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas ➤ Tersedianya destinasi pariwisata perkotaan ➤ Terpelihara dan meningkatnya aktivitas seni dan budaya ➤ Meningkatnya aktifitas kepemudaan ➤ Meningkatnya prestasi olahraga dan aktifitas olah raga di masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk mendukung pencapaian rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan Kota Bekasi ➤ Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem layanan kesehatan untuk meningkatkan pencapaian indeks kesehatan ➤ Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak untuk mendukung pencapaian

No	Strategi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				kesetaraan gender ➤ Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian pertumbuhan penduduk
5	Pengembangan UMKM, peningkatan prasarana dan sarana perdagangan, serta penataan kebijakan investasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesempatan kerja	Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing	➤ Tersedianya prasarana dan sarana perdagangan ➤ Meningkatnya aktifitas UMKM dan ekonomi lokal berbasis industri kreatif ➤ Meningkatnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat ➤ Tersedianya kesempatan kerja ➤ Meningkatnya investasi ➤ Terkendalinya laju inflasi ➤ Berkembangnya industri yang tertata dengan baik	➤ Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdagangan untuk mendorong laju investasi daerah ➤ Membangun iklim usaha yang kondusif ➤ Peningkatan aktifitas UMKM dan koperasi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi ➤ Perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan perlindungan tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan ➤ Deregulasi kebijakan investasi dan pembentukan kelembagaan pengelola penanaman modal dan perijinan terpadu untuk mendorong peningkatan investasi ➤ Perbaikan dukungan

No	Strategi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
				infrastruktur wilayah industrial Kota Bekasi
6	Membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keamanan ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ➤ Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat ➤ Peningkatan ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan wawasan kebangsaan ➤ Pencegahan dini dan penanggulangan bencana

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan Kota Bekasi tahun 2013 -2018 akan dijabarkan dalam dokumen perencanaan berupa Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Melalui kebijakan umum diperoleh rangkaian strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

7.1 Kebijakan Umum

Kebijakan Umum merupakan kumpulan dari beberapa strategi atau arah kebijakan pembangunan yang dipilih untuk merumuskan program pembangunan daerah agar masing-masing strategi tepat dan inheren. Adapun 26 (dua puluh enam) kebijakan umum pembangunan Kota Bekasi sebagai berikut:

- 1 Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2 Peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur untuk mendorong percepatan pelayanan publik
- 3 Integrasi perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip SMART (specific, measurable, attainable, realistic, time bound) dan visioner yang didukung pengendalian dan evaluasi yang optimal
- 4 Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi untuk menunjang ketersediaan data pembangunan

- 5 Peningkatan layanan administrasi kependudukan melalui pembangunan sistem kependudukan berbasis IT
- 6 Percepatan proses pelayanan publik
- 7 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong peningkatan PAD
- 8 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan utilitas perkotaan
- 9 Perbaikan kualitas perumahan dan pemukiman dengan penyediaan rumah layak huni, rusunawa dan rusunami
- 10 Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 – 2031
- 11 Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai perolehan Adipura
- 12 Perbaikan prasarana dan sarana transportasi melalui integrasi moda transportasi, pengendalian kemacetan, dan peningkatan kualitas dan kuantitas rambu
- 13 Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk mendukung pencapaian rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan Kota Bekasi
- 14 Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem layanan kesehatan untuk meningkatkan pencapaian indeks kesehatan
- 15 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender
- 16 Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian pertumbuhan penduduk
- 17 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan kepemudaan dan pariwisata
- 18 Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdagangan untuk mendorong laju investasi daerah
- 19 Membangun iklim usaha yang kondusif

- 20 Peningkatan aktifitas UMKM dan koperasi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi
- 21 Perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan perlindungan tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan
- 22 Deregulasi kebijakan investasi dan pembentukan kelembagaan pengelola penanaman modal dan perijinan terpadu untuk mendorong peningkatan investasi
- 23 Perbaikan dukungan infrastruktur wilayah industrial Kota Bekasi
- 24 Peningkatan ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan wawasan kebangsaan
- 25 Penanggulangan penyalahgunaan narkoba
- 26 Pencegahan dini dan penanggulangan bencana

Di dalam upaya mencapai visi dan misi kota Bekasi maka pelaksanaan program kebijakan pembangunan Kota Bekasi dijabarkan menjadi 28 (dua puluh delapan) bidang pembangunan yang selengkapnyanya masing masing bidang pembangunan beserta kebijakan program yang disesuaikan untuk masing masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat mutu pendidikan dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan angka kelulusan pada setiap jenjang pendidikan.
- b. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kota Bekasi.
- c. Memberantas buta aksara pada penduduk usia 15 tahun keatas yang masih terjadi di Kota Bekasi.
- d. Memperluas cakupan dan mempermudah bantuan pendidikan kepada masyarakat tidak mampu.

2. Bidang Kesehatan

Arah kebijakan pembangunan pada bidang kesehatan adalah sebagai berikut

- a. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem layanan kesehatan.
- b. Melaksanakan SPM bidang kesehatan secara konsisten untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
- c. Meningkatkan cakupan warga miskin penerima fasilitas jaminan kesehatan.
- d. Menetapkan program bersama “Bekasi Sehat 2017” dimana seluruh rumah tangga Kota Bekasi telah memiliki sanitasi yang baik.

3. Bidang Pekerjaan umum

Arah kebijakan pembangunan pada bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan memelihara infrastuktur jalan, jembatan dan drainase.
- b. Meningkatkan prasarana transportasi terpadu melalui pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian), jalur khusus sepeda, pengembangan *commuter transit parking*, perencanaan *mass rapid transit*, dan perencanaan terminal induk regional.
- c. Menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur pekerjaan umum.
- d. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan pekerjaan umum untuk meminimalisir potensi penyelewengan.

4. Bidang Perumahan rakyat

Arah kebijakan pembangunan pada bidang perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Membatasi perkembangan pembangunan perumahan horizontal dan meningkatkan pengembangan hunian vertikal.
- b. Mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan vertikal (rumah susun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- c. Mengembangkan hunian vertikal di kawasan padat dan kumuh melalui peremajaan kawasan dilengkapi ruang terbuka hijau dan prasarana kawasan yang memadai.
- d. Mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan perumahan.

5. Bidang Penataan ruang

Arah kebijakan pembangunan pada bidang penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan penataan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi tahun 2011-2031.
- b. Mewujudkan luasan Ruang Terbuka Hijau hingga 30% dari wilayah Kota Bekasi.
- c. Menata perijinan penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- d. Memperkuat perencanaan penataan ruang dengan penyusunan RUTRK-RDTRK hingga tingkat kecamatan.

6. Bidang Perencanaan pembangunan

Arah kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan indikator perencanaan pembangunan yang SMART (*specific, measurable, attainable, realistic, time bound*).
- b. Memperkuat peran pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- c. Memperkuat kualitas data dan informasi bagi perencanaan pembangunan.
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur perencanaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

7. Bidang Perhubungan

Arah kebijakan pembangunan pada bidang perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya angkut dan kenyamanan angkutan umum.

- b. Mengembangkan moda transportasi massal yang integral dengan moda transportasi massal di wilayah sekitar Kota Bekasi.
- c. Meningkatkan keamanan di lingkungan terminal, stasiun dan di dalam kendaraan umum.
- d. Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas.

8. Bidang Lingkungan hidup

Arah kebijakan pembangunan pada bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- b. Melakukan upaya meraih kembali Adipura.
- c. Melakukan perluasan cakupan pelayanan air bersih dan perluasan cakupan pengelolaan air limbah.
- d. Melakukan pengendalian terhadap dampak buruk limbah rumah tangga terhadap lingkungan.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai sarana sosial bagi masyarakat.

9. Bidang Pertanahan

Arah kebijakan pembangunan pada bidang pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat sistem administrasi pertanahan.
- b. Menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi

10. Bidang Kependudukan dan catatan sipil

Arah kebijakan pembangunan pada bidang kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penataan administrasi kependudukan.
- b. Meningkatkan cakupan keterdataan penduduk dan tingkat kepemilikan dokumen dasar kependudukan.
- c. Meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui pembangunan sistem kependudukan.

11. Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Arah kebijakan pembangunan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelerasan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
- b. Penguatan kelembagaan bagi perlindungan perempuan dan anak.
- c. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.

12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Arah kebijakan pembangunan pada bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana untuk mengurangi jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1.
- b. Melakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan melibatkan institusi keagamaan untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual.
- c. Melakukan p
- d. endampingan kepada pasangan keluarga baru dan pencerdasan keluarga berencana.

13. Bidang Sosial

Arah kebijakan pembangunan pada bidang sosial adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam kegiatan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
- c. Peningkatan mitigasi bencana melalui peningkatan partisipasi masyarakat.

14. Bidang Ketenagakerjaan

Arah kebijakan pembangunan pada bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya serap tenaga hingga hingga 50.000 tenaga kerja.
- b. Meminimalisir potensi perselisihan industrial antara pekerja dan perusahaan.
- c. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja.

15. Bidang Koperasi dan UMKM

Arah kebijakan pembangunan pada bidang kopersi dan UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kelembagaan koperasi.
- b. Meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dengan membentuk BLUD pengelola dana bergulir.
- c. Pengembangan dan reorientasi UMKM ke arah kreativitas.

16. Bidang Penanaman modal

Arah kebijakan pembangunan pada bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Deregulasi peraturan investasi daerah dan penyederhaan jangka waktu dan biaya pengurusan perijinan.
- b. Membentuk lembaga pengelola penanaman modal dan perijinan terpadu.
- c. Mengembangkan sistem informasi pendaftaran pelaku usaha secara online.

17. Bidang Kebudayaan

Arah kebijakan pembangunan pada bidang kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan promosi budaya (asli) daerah Kota Bekasi.
- b. Meningkatkan jumlah even-even budaya dan kesenian daerah.
- c. Mengembangkan potensi wisata budaya, seni dan sejarah Kota Bekasi.

18. Bidang kepemudaan dan olahraga

Arah kebijakan pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aktualisasi peran pemuda melalui pelibatan organisasi kepemudaan.
- b. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan pelajar daerah.
- c. Meningkatkan prestasi olahraga dan perbaikan fasilitas olahraga.
- d. Meningkatkanpembinaan generasi muda dalam wawasan kebangsaan dan orientasi wirausaha berbasis kreativitas

19. Bidang Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Arah kebijakan pembangunan pada bidang pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat wawasan kebangsaan sebagai cara meningkatkan ketertiban dan ketentraman lingkungan.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda dalam penguatan wawasan berbangsa dan bernegara.

20. Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Arah kebijakan pembangunan pada bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan reformasi birokrasi dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Menyelenggarakan pemerintah daerah dengan memegang teguh 10 prinsip *good governance* secara konsisten.
- c. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi berkesinambungan terhadap hasil kinerja pembangunan daerah.
- d. Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik.

21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Arah kebijakan pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
- c. Mendorong partisipasi kelembagaan dan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- d. Mendorong partisipasi kelembagaan dan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

22. Bidang Kearsipan

Arah kebijakan pembangunan pada bidang kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perawatan dan penyelamatan terhadap arsip daerah khususnya arsip-arsip bersejarah

23. Bidang Komunikasi dan informatika

Arah kebijakan pembangunan pada bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas informasi masyarakat melalui mengembangkan zona-zona layanan internet cuma-cuma dan peningkatan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika.
- b. Meningkatkan kerja sama dengan pihak media massa dalam memperluas informasi perkembangan pembangunan daerah

24. Bidang Perpustakaan

Arah kebijakan pembangunan pada bidang perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan budaya baca masyarakat melalui perbaikan kualitas dan kinerja layanan perpustakaan.
- b. Meningkatkan promosi kunjungan perpustakaan.

25. Bidang Pertanian

Arah kebijakan pembangunan pada bidang pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras.
- b. Menggalakkan promosi penganekaragaman sumber bahan pangan pokok.
- c. Menjaga pasokan bahan pangan khusus buah dan sayuran.
- d. Melakukan pencerdasan kepada masyarakat mengenai sumber bahan pangan alternatif pengganti daging

26. Bidang Pariwisata

Arah kebijakan pembangunan pada bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pariwisata dan budaya yang berorientasi pada konservasi dan kemajemukan budaya melalui penyelenggaraan event wisata secara periodik.

- b. Menggiatkan promosi wisata Kota Bekasi secara luas dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pemrakarsa dan pengelola event dan promosi pariwisata.
- c. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

27. Bidang Perdagangan

Arah kebijakan pembangunan pada bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima.
- b. Mengembangkan sentra-sentra perdagangan rakyat.
- c. Mengembangkan pilot project pasar tradisional modern dan sentra industri kreatif.

28. Bidang Industri

Arah kebijakan pembangunan pada bidang industri adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyerapan dan penerapan teknologi tepat guna oleh industri kecil dan menengah.
- b. Memberikan dukungan pendampingan bagi industri kecil yang baru berkembang.

7.2. Program Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2013-2018 terdiri dari 8 prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahunnya melalui RKPD, adapun ketujuh prioritas tersebut adalah:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Perekonomian
5. Pendidikan;
6. Kesehatan;
7. Kesejahteraan Sosial;
8. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Untuk melaksanakan kedelapan prioritas tersebut maka program pembangunan daerah Kota Bekasi dirumuskan secara

komprehensif berdasarkan sasaran pembangunan daerah yang telah disusun untuk dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan. Program pembangunan daerah disusun berdasarkan janji kampanye Kepala Daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018. Tabel 7.1 memaparkan indikasi program pembangunan daerah berdasarkan Misi dan Prioritas Daerah yang didukungnya, pada table tersebut terdapat 75 program prioritas. Sedangkan Tabel 7.2 memaparkan program pembangunan daerah dengan disertai indikator keberhasilan dan kerangka pendanaan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Sedangkan program prioritas dan pendukung ada pada bab 8 dokumen ini.

Tabel 7.1
Indikasi Program dan Keterkaitan dalam Misi dan Kebijakan Umum
Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2013-2018

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas
1	Menyelenggara kan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Penyelenggara an tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi dan aparatur pemerintah, perencanaan pembangunan serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam semua sektor pembangunan	1	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong peningkatan PAD	1 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
			2	Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
					3 Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah
					4 Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah
					5 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
					6 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
					7 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas	
			3	Peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur untuk mendorong percepatan pelayanan publik	8	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
					9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
			4	Integrasi perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip SMART (specific, measurable, attainable, realistic, time bound) dan visioner yang didukung pengendalian dan evaluasi yang optimal	10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
					11	Program Pengembangan Data dan Informasi
			5	Peningkatan layanan administrasi kependudukan melalui pembangunan sistem kependudukan berbasis IT	12	Program Penataan Administrasi Kependudukan
			6	Percepatan proses pelayanan publik	13	Program peningkatan pelayanan perijinan
14	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan					
2	Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota	2. penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan yang sesuai dengan dinamika pertumbuhan kota dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang kota yang berkelanjutan	7	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan utillitas perkotaan	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
					16	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
					17	Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan
					18	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
			8	Perbaikan kualitas perumahan dan pemukiman dengan penyediaan rumah layak huni, rusunawa dan rusunami	19	Program Pengembangan Perumahan
					20	Program pengelolaan areal pemakaman
					21	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
			9	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 – 2031	22	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
					23	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas
					Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
					24 Program Perencanaan Tata Ruang
					25 Program Pemanfaatan Ruang
			10	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, dan pengendalian pencemaran udara dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai perolehan Adipura	26 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
					27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
					28 Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
					29 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
					30 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
					31 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
					32 Program penyediaan dan pengolahan air baku
					33 Program pengendalian banjir
					34 Program peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU)
		3. penyediaan prasarana dan sarana transportai yang murah, cepat, aman dan nyaman	11	Perbaiki prasarana dan sarana transportasi melalui integrasi moda transportasi,pengendalian kemacetan, dan peningkatan kualitas dan kuantitas rambu	35 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
					36 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya	4. peningkatan kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya	12	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk mendukung pencapaian rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan Kota Bekasi	37 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
					38 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
					39 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					40 Program Pendidikan Anak Usia Dini
					41 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas
					Dasar
					42 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah
					43 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
			13	Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem layanan kesehatan untuk meningkatkan pencapaian indeks kesehatan	44 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
					45 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
					46 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rs, rs jiwa, rs paru, rs mata
					47 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
					48 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
					49 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
					50 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
					51 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
					52 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
					53 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
			14	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender	54 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
					55 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak dan Perempuan
			15	Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian pertumbuhan penduduk	56 Program Keluarga Berencana
					57 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas
			16	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran pemuda dan pariwisata	58 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
					59 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
					60 Program Pengembangan Destinasi Wisata
					61 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
					62 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
					63 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga
4	Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif	5. Pengembangan UMKM, peningkatan prasarana dan sarana perdagangan, serta penataan kebijakan investasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesempatan kerja	17	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdagangan untuk mendorong laju investasi daerah	64 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
			18	Membangun iklim usaha yang kondusif	65 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
			19	Peningkatan aktifitas UMKM dan koperasi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi	66 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
					67 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
					68 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
					69 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
					70 Program Penataan Prasarana dan peningkatan pelayanan pasar
					71 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
			20	Perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas	72 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas	
				Sumber Daya Manusia dan perlindungan tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan	73	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			21	Deregulasi kebijakan investasi dan pembentukan kelembagaan pengelola penanaman modal dan perijinan terpadu untuk mendorong peningkatan investasi	74	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
			22	Perbaiki dukungan infrastruktur wilayah industrial Kota Bekasi	75	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
5	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai	6. Membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai	23	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	76	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
			24	Peningkatan ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan wawasan kebangsaan	77	Program pengembangan wawasan kebangsaan
					78	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
					79	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
					80	Program upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba
			25	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana	81	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

7.2. Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dengan Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 disebutkan bahwa sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka

pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 6 - 8 persen;
2. PDB per kapita mencapai US\$ 7000;
3. Tingkat penurunan kemiskinan berkisar antara 5 – 6 persen;
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5 persen sampai dengan 5,5 persen.

Berdasarkan tema dan sasaran tersebut di atas, dalam RPJMD Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- a. Pengendalian jumlah penduduk;
- b. Reformasi pembangunan kesehatan:
 - 1) Sistem jaminan sosial nasional (*demand and supply*);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
- c. Reformasi pembangunan pendidikan;
- d. Sinergi percepatan.

2. Bidang Ekonomi

- a. Transformasi sektor industri dalam arti luas;
- b. Peningkatan daya saing tenaga kerja;
- c. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi;
- d. Peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi;
- e. Reformasi keuangan

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a. Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Bidang Sarana dan Prasarana

- a. Peningkatan ketahanan air;
- b. Penguatan konektivitas nasional:
 - 1) Keseimbangan pembangunan antar wilayah;

- 2) Pendorong pertumbuhan ekonomi;
- 3) Pembangunan transportasi massal perkotaan.
- c. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar:
 - 1) Peningkatan rasio elektrifikasi nasional;
 - 2) Peningkatan akses air minum dan sanitasi;
 - 3) Penataan perumahan/permukiman.

5. Bidang Politik

- a. Konsolidasi Demokrasi.

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan

- a. Percepatan pembangunan MEF dan almatsus POLRI dengan pemberdayaan industri pertahanan;
- b. Peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri.

7. Bidang Hukum dan Aparatur

- a. Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik;
- b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.

8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang

- a. Pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan;
- b. Pengelolaan risiko bencana;
- c. Sinergi pembangunan perdesaan.

9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

- a. Perkuatan ketahanan pangan;
- b. Peningkatan ketahanan energi;
- c. Percepatan pembangunan kelautan;
- d. Peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota.

7.3. Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dengan Kebijakan Prioritas Provinsi Jawa Barat

7.3.1. Kebijakan Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2015, diarahkan pada pembangunan berbasis sektoral melalui 10 (sepuluh) skenario pembangunan *Common Goals*, pembangunan berbasis tematik kewilayahan, dan pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi. Untuk fokus pembangunan sektoral, dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) strategi yaitu: **Pertama**, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal (*strengthening local actor*); **Kedua**, integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; **Ketiga**, penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasis daerah otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen kewilayahan; **Keempat**, penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan; serta **Kelima**, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan mutu serta akuntabilitas pembangunan. Penjabaran tematik sektoral untuk 10 (sepuluh) *Common Goals* adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- (1) Jabar bebas putus jenjang sekolah,
- (2) Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas,
- (3) Pendidikan berkebutuhan khusus,
- (4) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi,
- (5) Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- (1) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan,

- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak,
- (3) Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa,
- (4) Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat,

3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi,
- (2) Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi,
- (3) Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan,
- (4) Terwujudnya pengembangan Kawasan Industri Terpadu dan pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan,
- (5) Terwujudnya pengembangan energi baru terbarukan
- (6) Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat.

4. Meningkatkan ekonomi pertanian, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya produksi benih/bibit di Jawa Barat,
- (2) Pengembangan agribisnis, *forest business*, *marine business*, dan agro-industri,
- (3) Terwujudnya pengelolaan luas lahan pertanian berkelanjutan dan pengendalian stok pangan serta keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi,
- (4) Terkendalinya Tingkat Kerawanan Pangan dan Kecukupan Gizi Masyarakat,
- (5) Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan.

5. Meningkatkan ekonomi non pertanian, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja,

- (2) Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi,
- (3) Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi,
- (4) Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing,
- (5) Meningkatnya industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda kreatif.

6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung serta berkurangnya luasan lahan kritis,
- (2) Meningkatnya kualitas udara dan air serta pengelolaan sampah terpadu,
- (3) Meningkatnya efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana.

7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan, dan olahraga, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga bertaraf internasional dan kepemudaan,
- (2) Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya,
- (3) Meningkatnya Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya
- (4) Meningkatnya Pengembangan destinasi wisata.

8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- (1) Meningkatnya ketahanan keluarga dan keluarga berencana,
- (2) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengokohan Ekonomi Keluarga,
- (3) Meningkatnya pengelolaan kependudukan.

9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut :

- (1) Menurunnya penduduk miskin,
- (2) Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan sosial,
- (3) Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

10.Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance,
- (2) Meningkatnya pelayanan data informasi kepada masyarakat,
- (3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan,
- (4) Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan,
- (5) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Akuntabilitas Pembangunan,
- (6) Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan.



Gambar 7.1. Common Goal RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018

Kesesuaian misi Kota Bekasi dengan 8 *Development Goals* adalah sebagai berikut:

- Misi I Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan *Development Goals* kedelapan, yaitu modernisasi pemerintahan.
- Misi II Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika pertumbuhan kota, sesuai dengan *Development Goals* ketiga, mengembangkan infrastruktur wilayah dan air baku dan *Development Goals* kelima, meningkatkan penataan, pengendalian, pemanfaatan ruang, dan lingkungan hidup.
- Misi III Meningkatkan kehidupan social masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan social lainnya sesuai dengan *Development Goals* kesatu, meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan dan *Development Goals* kedua, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan.
- Misi IV Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan investasi,

serta penciptaan iklim usaha yang kondusif, sesuai dengan *Development Goals* keempat, meningkatkan ekonomi.

- Misi V Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai, sesuai dengan *Development Goals* keenam, meningkatkan pengelolaan seni, budaya, dan wisata serta kepemudaan dan olahraga dan *Development Goals* ketujuh, meningkatkan ketahanan keluarga, kesejahteraan social, dan keamanan ketertiban masyarakat.

Tabel Keterkaitan Nawacita, Common Goals Provinsi Jawa Barat dan Astha Wiwandha Kota Bekasi ke dalam Misi Kota Bekasi

Nawa Cita		Common Goals Prov. Jawa Barat		Development Goals Kota Bekasi		Misi Kota Bekasi
C2	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	CG10	Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan	CG8	Modernisasi Pemerintahan	Misi I: Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik
C4	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya					
C3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	CG3	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku	CG3	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Air Baku	Misi II: Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota
		CG6	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan	CG5	Meningkatkan Penataan, Pengendalian, Pemanfaatan Ruang, dan Lingkungan Hidup	
C5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	CG1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	CG1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Misi III: Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya
C8	Melakukan revolusi karakter bangsa	CG2	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan	CG2	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan	
C6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	CG4	Meningkatkan Ekonomi Pertanian	CG4	Meningkatkan Ekonomi	Misi IV: Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif
C7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	CG5	Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian			
C1	Menghadirkan kembali negara	CG7	Meningkatkan pengelolaan	CG6	Meningkatkan pengelolaan seni,	Misi V: Mewujudkan

	untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara		seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga		budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga	kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai
C9	Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	CG8	Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan	CG7	Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Sosial, dan Trantibmas	
		CG9	Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan			

Ada 8 (delapan) butir *Development Goals* yang juga menjadi prioritas Kota Bekasi, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
 - a. Kota Bekasi bebas putus jenjang sekolah (sukses wajib belajar 12 th)
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal
 - c. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - d. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik
 - e. Mewujudkan *Link and Match* antara Pendidikan dengan Dunia Kerja
 - f. Peningkatan Peran Swasta dalam Pelayanan Pendidikan
2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan
 - a. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas/pembantu dan jaringannya
 - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjutan di RSUD
 - c. Pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
 - d. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - e. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
 - f. Peningkatan Peran Swasta dalam Pelayanan Kesehatan
3. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dan Air Baku
 - a. Perbaikan infrastruktur perkotaan
 - b. Penanganan kemacetan lalu lintas
 - c. Peningkatan pelayanan angkutan
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan
 - f. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
 - g. Penyediaan dan Pemeliharaan Jaringan Pelayanan Air Bersih
4. Meningkatkan Ekonomi
 - a. Menjamin Keamanan dan Keselamatan Pangan di Kota Bekasi
 - b. Meningkatkan dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan

- c. Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM
 - d. Pengembangan pembiayaan alternative bagi Usaha Mikro dan Kecil
 - e. Pengembangan industri manufaktur berbasis lingkungan
 - f. Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif
5. Meningkatkan Penataan, Pengendalian, Pemanfaatan Ruang, dan Lingkungan Hidup
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan
 - b. Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
 - c. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah
 - d. Penanganan banjir
 - e. Pengendalian Pencemaran Air Tanah & Permukaan
6. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga.
- a. Pelestarian seni budaya tradisional dan Pengembangan Kreativitas Seni Budaya di Kota Bekasi
 - b. Pengembangan Destinasi Wisata dan Cagar Budaya
 - c. Peningkatan Peran Kepemudaan
 - d. Pengembangan Prasarana / Sarana dan Peningkatan Prestasi olahraga
7. Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Sosial, dan Trantibmas
- a. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana
 - b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
 - c. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
 - d. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
 - e. Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat
8. Modernisasi Pemerintahan
- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik
 - b. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan

c. Penerapan e-Government

7.3.2.Prioritas Kewilayahan

Prioritas kewilayahan merupakan sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan di Jawa Barat, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Pembangunan kewilayahan yang dilaksanakan untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan, melalui kebijakan pembangunan kewilayahan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, penetapan delineasi wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan dilakukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah terbangun, dan aktivitas ekonomi. Dielineasi pada tahun 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, dan 2050 dilakukan dengan memproyeksikan hasil delineasi yang didapatkan untuk tahun 2010 ruang lingkup wilayah pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat meliputi:

a. Wilayah **Metropolitan Bodebekkarpur**

Pemilihan kecamatan yang masuk dalam kawasan metropolitan Bodebekkarpur adalah kecamatan-kecamatan yang memnuhi penjelasan berikut:

- Berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta;
- Berbatasan langsung dengan kecamatan yang memenuhi kriteria pada poin (a);
- Berbatasan langsung dengan kecamatan yang memenuhi kriteria pada poin (b) dan seterusnya.

Wilayah metropolitan Bodebekkarpur meliputi:

- Pada tahun 2010 mencakup 82 kecamatan, yaitu: 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok, yakni Kecamatan Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo,

Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, dan Tapos; 6 (enam) kecamatan di Kota Bogor, yakni Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor Barat, Bogor Utara, Bogor Selatan, dan Bogor Timur; 12 (dua belas) kecamatan di Kota Bekasi, yakni Kecamatan Bekasi Utara, Medan Satria, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Jatisampurna, Jatiasih, Pondok Melati, Rawalumbu, Bantargebang, Bekasi Barat, Pondok Gede, dan Mustikajaya; 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Bogor, yakni Kecamatan Bojonggede, Tajurhalang, Parung, Gunung Sindur, Cibinong, Gunung Putri, Sukaraja, Babakan Madang, Siteureup, Cileungsi, Klapanunggal, Kemang, Ciseeng, Dramaga, Ciomas, Ciampea, dan Jonggol; 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Bekasi, yakni Kecamatan Sukawangi, Babelan, Tambun Utara, Tambelang, Tarumajaya, Tambun Selatan, Cibitung, Setu, Serang Baru, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Bojongmangu, Cikarang Pusat, Cibusah, Karangbahagia, Sukatani, dan Cikarang Utara; 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Karawang, yakni Kecamatan Rengasdengklok, Tirtamulya, Kotabaru, Klari, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat, Majalaya, Karawang Timur, Purwasari, Teluk Jambe Barat, dan Cikampek; 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Purwakarta, yakni Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jatiluhur, Pasawahan, Plered, dan Babakancikao.

- Pada tahun 2015 mencakup 83 kecamatan, yaitu 82 (delapan puluh dua) kecamatan cakupan pada tahun 2010 ditambah 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Purwakarta, yakni Kecamatan Sukatani.
- Pada tahun 2020 mencakup 105 kecamatan, yaitu 83 (delapan puluh tiga) kecamatan cakupan pada tahun 2015 ditambah dengan 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bekasi, yakni Kecamatan Muaragembong, Cabangbungin, Sukakarya, dan Pebayuran; 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bogor, yakni Kecamatan Rancabungur, Rumpin, Tamansari, Cijeruk, Sukamakmur, dan Cariu; 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Karawang, yakni Kecamatan Jayakarta, Kutawaluya, Rwamerta, Jatisari, Ciampel,

Pangkalan, Talagasari, dan Lemahabang; 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Purwakarta, yakni Kecamatan Campaka, Cibatu, Pondok Salam, dan Sukasari.

- Pada tahun 2025 mencakup 112 kecamatan, yaitu 105 (seratus lima) kecamatan cakupan pada tahun 2020 ditambah dengan 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Bogor, yakni Kecamatan Pamijahan, Tenjolaya, dan Cibungbulang; 1 (satu) keccamatan di Kabupaten Karawang, yakni Kecamatan Banyusari; 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Purwakarta, yakni Kecamatan Maniis, Darangdan, dan Tegalwaru.
- Pada tahun 2030 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025.
- Pada tahun 2035 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025.
- Pada tahun 2040 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025.
- Pada tahun 2045 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025.
- Pada tahun 2050 mencakup 112 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025.

b. Wilayah **Metropolitan Bandung Raya**

- Pada tahun 2010 mencakup 56 kecamatan, yaitu 30 (tiga puluh) kecamatan di Kota Bandung, yakni Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astanaanyar, Regol, Lengkong, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Gedebage, Cibiru, Panyileukan, Ujung Berung, Cinambo, Arcamanik, Antapani, Mandalajati, Kiaracondong, Batununggal, Sumurbandung, Andir, Cicendo, Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler, Coblong, Sukajadi, Sukasari, dan Cidadap; 3 (tiga) kecamatan di Kota Cimahi, yakni Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan, dan Cimahi Tengah; 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yakni Kecamatan di Parongpong, Ngamprah, Lembang, Batujajar, Padalarang, dan Cihampelas; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Sumedang, yakni Kecamatan Jatinangor; 16

(enam belas) kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni Kecamatan Margaasih, Margahayu, Cileunyi, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Rancaekek, Pameumpeuk, Baleendah, Katapang, Kutawaringin, Ciparay, Solokanjeruk, Majalaya, Banjaran, Cimenyan, dan Soreang.

- Pada tahun 2015 mencakup 61 kecamatan, yaitu 56 (lima puluh enam) kecamatan cakupan pada tahun 2010 ditambah dengan 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni Kecamatan Cilengkrang dan Paseh; 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yakni Kecamatan Cisarua dan Cikalong Wetan; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Sumedang, yakni Kecamatan Sukasari.
- Pada tahun 2020 mencakup 68 kecamatan, yaitu 61 (enam puluh satu) kecamatan cakupan pada tahun 2015 ditambah dengan 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Sumedang, yakni Kecamatan Tanjung Sari dan Cimanggung; 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni Kecamatan Cicalengka, Cikancung, Cangkuang, Arjasari, dan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yakni Kecamatan Cililin.
- Pada tahun 2025 mencakup 73 kecamatan, yaitu 68 (enam puluh delapan) kecamatan cakupan pada tahun 2020 ditambah dengan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni Kecamatan Cimaung; 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Sumedang, yakni Kecamatan Pamulihan dan Sumedang Selatan, 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Kecamatan Cipatat dan Cipeundeuy.
- Pada tahun 2030 mencakup 73 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2025.
- Pada tahun 2035 mencakup 73 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2030.
- Pada tahun 2040 mencakup 73 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2045.
- Pada tahun 2045 mencakup 73 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2040.
- Pada tahun 2050 mencakup 73 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2045.

c. Wilayah Metropolitan Cirebon Raya

- Pada tahun 2010 mencakup 29 kecamatan, yaitu 5 (lima) kecamatan di Kota Cirebon, yakni Kecamatan Harjamukti, Kejaksan, Kesambi, Lemahwungkuk, dan Pekalipuan; 23 (dua puluh tiga) kecamatan di Kabupaten Cirebon, yakni Kecamatan Beber, Dukupuntang, Jamblang, Klangeran, Palimanan, Suranenggala, Astanajapura, Depok Greded, Gunungjati, Kedawung, Lemahabang, Mundu, Plered, Plumbon, Sumber, Talun, Tengah Tani, Weru, Karangsembung, Pangenan, Sedong, dan Susukan Lebak; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kuningan, yaitu Kecamatan Pancalang.
- Pada tahun 2015 mencakup 30 kecamatan, yaitu 29 (dua puluh Sembilan) kecamatan cakupan pada tahun 2010 ditambah dengan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Cirebon, yakni Kecamatan Gempol.
- Pada tahun 2020 mencakup 34 kecamatan, yaitu 30 (tiga puluh) kecamatan cakupan pada tahun 2015 ditambah 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Cirebon, yakni Kecamatan Arjawinangun dan Panguragan; 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Majalengka, yakni Kecamatan Leuwimunding dan Sindangwangi.
- Pada tahun 2025 mencakup 43 kecamatan, yaitu 34 (tiga puluh empat) kecamatan cakupan pada tahun 2025 ditambah dengan 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Cirebon, yakni Kecamatan Ciwaringin, Kapetakan, Gebang, dan Losari; 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Kuningan, yakni Kecamatan Cigandamekar, Cilimus, Mandirancan, dan Pasawahan; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Majalengka, yakni Kecamatan Sumberjaya.
- Pada tahun 2030 mencakup 45 kecamatan, yaitu 43 (empat puluh tiga) kecamatan cakupan di Kabupaten Cirebon, yakni Kecamatan Susukan; 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Indramayu, yakni Kecamatan Sukagumiwang.
- Pada tahun 2035 mencakup 45 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2030.
- Pada tahun 2040 mencakup 45 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2030.

- Pada tahun 2045 mencakup 45 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2030.
- Pada tahun 2050 mencakup 45 kecamatan yang sama dengan cakupan wilayah pada tahun 2030.

d. Wilayah **Pusat Pertumbuhan Pangandaran**

Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran sampai dengan tahun 2050 mencakup 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Pangandaran, meliputi Kecamatan Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, dan Kalipucang.

e. Wilayah **Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu**

Wilayah Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu sampai dengan tahun 2050 mencakup 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Sukabumi, meliputi Kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, dan Ciemas.

f. Wilayah **Pusat Pertumbuhan Rancabuaya**

Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya sampai dengan tahun 2050 mencakup 5 (lima) kecamatan, yaitu 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Garut, yakni Kecamatan Caringin, Cisewu, Bungbulang, dan Mekarmukti; dan 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Cianjur, yakni Kecamatan Cidaun.

Untuk mendorong efektifitas pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan dilakukan pembangunan dan peningkatan pada bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah, serta lintas pemerintahan, dan/atau berimplikasi skala metropolitan, meliputi:

(1) Bidang pemerintahan

Rencana pembangunan dan peningkatan di bidang pemerintahan antara lain:

- a. Tata kelola pemerintahan modern;
- b. Kerjasama multipihak bersama masyarakat global; dan
- c. Bidang pemerintahan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Gubernur.

(2) Bidang ekonomi

Rencana pembangunan dan peningkatan di bidang ekonomi, antara lain:

- a. Kawasan destinasi wisata dunia;
- b. Kawasan industri strategis; dan
- c. Kawasan strategis ekonomi lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Gubernur.

(3) Bidang fisik dan lingkungan hidup

Rencana pembangunan dan peningkatan di bidang fisik dan lingkungan hidup, antara lain:

- a. Perkotaan berkelanjutan yang modern dan berwawasan lingkungan;
- b. Infrastruktur transportasi jalan, meliputi jalan tol dan jalan lintas cepat regional metropolitan; dan
- c. Infrastruktur transportasi perhubungan, meliputi Bandar Udara, Pelabuhan Laut, dan Mass Rapid Transport, diantaranya jalur kereta api dan monorel.
- d. Infrastruktur permukiman dan lingkungan hidup, meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional, Sistem pengolahan air limbah komunal, Pengendalian pencemaran dan instalasi pengolahan limbah industri, rumah sakit, serta pengembangan kawasan dan lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba);
- e. Infrastruktur sistem drainase skala metropolitan;
- f. Infrastruktur energi kelistrikan;
- g. Infrastruktur telekomunikasi; dan
- h. Infrastruktur wilayah strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Gubernur.

(4) Bidang sosial budaya

Rencana pembangunan dan peningkatan di bidang sosial budaya, antara lain:

- a. Kawasan pusat seni budaya;

- b. Kawasan pusat pendidikan dan pelatihan; dan
- c. Kawasan strategis social budaya lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur melalui Peraturan Gubernur.

Rencana pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah strategis di Kawasan Metropolitan Bodebekkarpur, terdiri atas:

- a. Pembangunan dan peningkatan insfrastruktur transportasi jalan, antara lain:
 - 1. Jalan tol Depok – Antasari;
 - 2. Jalan tol Cinere – Jagorawi;
 - 3. Jalan tol Tanjung Priok – Cikarang;
 - 4. Jalan tol Bogor Ring Road Tahap 2 dan Tahap 3;
 - 5. Jalan tol Bekasi – Cikarang – Kampung Melayu;
 - 6. Jalan tol Serpong – Cinere;
 - 7. Jalan tol Cimanggis – Cibitung;
 - 8. Fly over Cibitung, fly over Tegalgede, serta overpass Tegal Danas di Kabupaten Bekasi;
 - 9. Jalan Vertikal Bogor – Depok – Jakarta, yang merupakan bagian dari jalan vertical Palabuhanratu – Jakarta;
 - 10. Jalan poros timur Puncak – Sentul – Kota Bunga dan Simpang Sukamakmur – Cariu;
 - 11. Jalan Sentul – Bojong Gede – Parung;
 - 12. Jalan horizontal poros tengah Purwakarta (Jatiluhur) - Jonggol (Cariu) – Simpang Sukamakmur;
 - 13. Jalan lintas jalur pantai utara Subang – Karawang – Bekasi – Tanjung Priok;
 - 14. Jalan lintas cepat Karawang;
 - 15. Jalan lintas cepat Leuwiliang Kabupaten Bogor; dan
 - 16. Pembangunan jalan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- b. Pambangunan infrastruktur perhubungan, antara lain:
 - 1. Jalur kereta api cepat Jakarta – Bandung – Kertajati – Cirebon;
 - 2. Jalur kereta api Bogor – Sukabumi – Cianjur – Padalarang;

3. Elektrifikasi rel ganda KA antar kota Cikarang – Cikampek;
 4. Rel ganda kereta api perkotaan Manggarai – Cikarang (lintas Manggarai – Jatinegara – Bekasi);
 5. Rel ganda kereta api perkotaan Parung Panjang – Tenjo, rel ganda parsial Purwakarta – Ciganea;
 6. Pelabuhan laut Cilamaya di Kabupaten Karawang;
 7. Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi; dan
 8. Infrastruktur perhubungan strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- c. Pembangunan infrastruktur permukiman, antara lain:
1. TPPAS Regional Nambo di Kabupaten Bogor;
 2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;
 3. Instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal;
 4. Sistem drainase metropolitan;
 5. Hunian vertikal; dan
 6. Pembangunan infrastruktur permukiman strategis lainnya atas dasar kesepakatan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

7.3.3. Pembangunan Tematik Kewilayahan Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Bodebekkarpur yang dikembangkan dengan arah kebijakan sebagai metropolitan mandiri berbasis manufaktur, jasa, keuangan, serta perdagangan, hotel, dan restoran serta pariwisata. Arah kebijakan pengembangan Metropolitan Bodebekkarpur diwujudkan melalui pendekatan Metropolitan Kembar (*Twin Metropolitan*) Bodebekkarpur – DKI Jakarta. Pendekatan Metropolitan Kembar dilakukan dengan mengembangkan Metropolitan Bodebekkarpur sebagai metropolitan level – 1 yang setara dengan DKI Jakarta yang juga merupakan metropolitan level – 1.

Sebagai metropolitan berbasis industri manufaktur, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mendorong kegiatan industri manufaktur di Metropolitan Bodebekkarpur, salah satunya dengan

mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan system angkutan barang (logistic) terutama untuk memenuhi kebutuhan distribusi dan produksi kegiatan industry manufaktur dalam skala besar. Dalam hal ini, perlu dilakukan pembangunan system perkeretaapian barang yang mengakses ke lokasi pelabuhan-pelabuhan skala regional di wilayah ini. Selain itu, perlu dibangun pusat-pusat kegiatan riset dan inovasi teknologi yang dapat mengakselerasi pemanfaatan teknologi tinggi dalam kegiatan industry manufaktur di Metropolitan Bodebekkarpur.

Sebagai metropolitan berbasis jasa dan keuangan, pembangunan cluster kantor pusat perusahaan, perdagangan, perbankan, jasa pelayanan, asuransi, hukum, penelitian, dan pemerintahan perlu segera dikembangkan di Metropolitan Bodebekkarpur. Pembangunan ini tidak dapat terlepas dari pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) cepat yang terintegrasi menghubungkan pusat – pusat kegiatan ekonomi (CBD dan pusat kegiatan lainnya), perumahan, serta simpul-simpul transportasi regional seperti bandara internasional. Hal ini penting karena kegiatan ekonomi berbagai perusahaan multinasional perlu ditunjang oleh kemudahan akses menuju bandar udara internasional.

Sebagai metropolitan berbasis perdagangan, hotel, restoran serta pariwisata, berbagai kawasan komersil yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi (CBD, kawasan industry, dsb) perlu dikembangkan untuk menunjang kebutuhan penduduk Metropolitan Bodebekkarpur. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang berskala global harus ditunjang oleh ketersediaan fasilitas perdagangan, hotel, restoran, serta pariwisata yang berkelas metropolitan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Sebagai salah satu upaya sinkronisasi program, pembangunan tematik kewilayahan Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut:

A. Wilayah Kawasan Kota

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;

- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek direncanakan dengan melakukan penataan koridor jalan utama Kota Bekasi, meliputi:

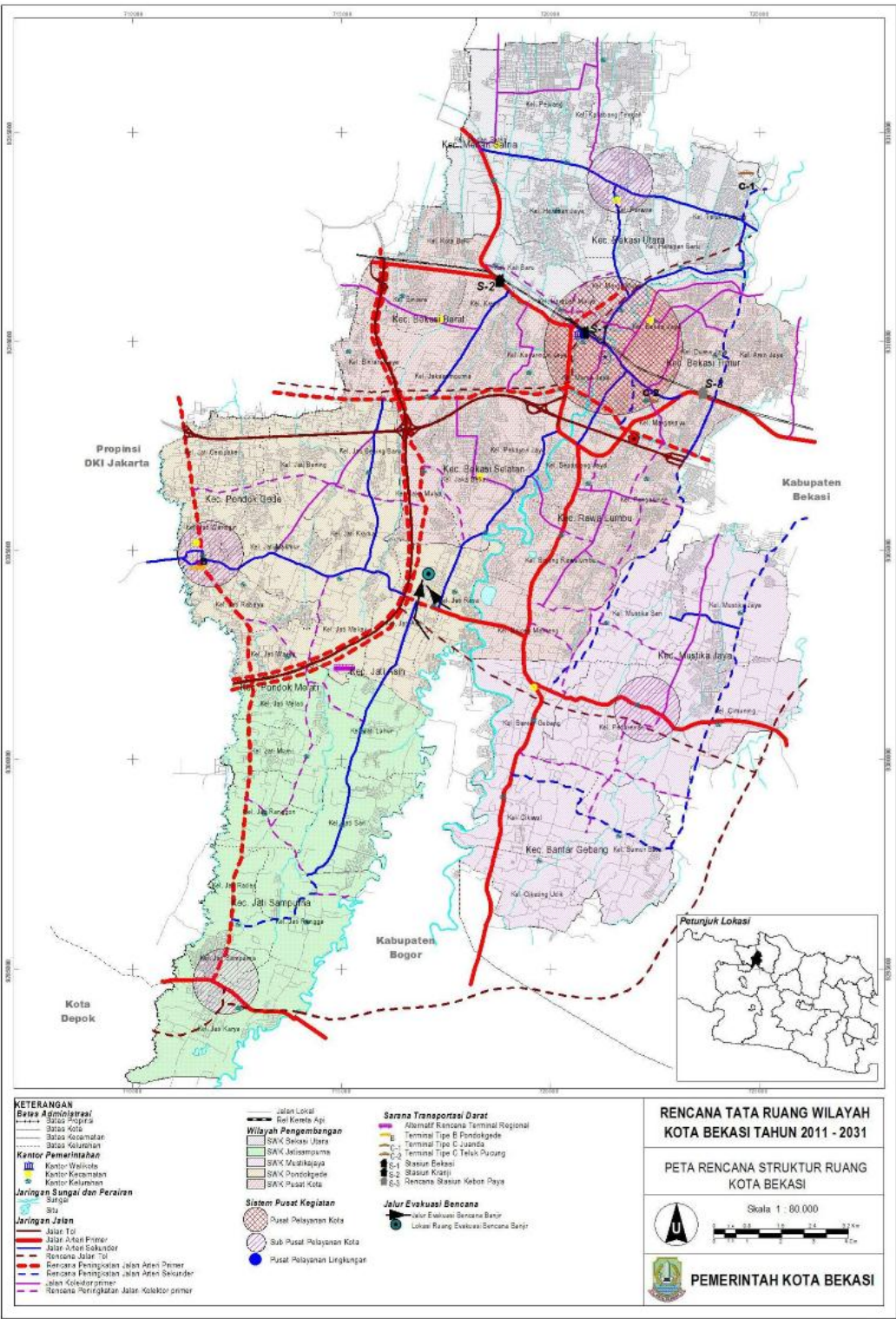
- 1. Koridor Jalan KH. Noer Ali
- 2. Koridor Jalan Ahmad Yani
- 3. Koridor Jalan Cut Meutia,
- 4. Koridor Jalan Juanda

5. Koridor Jalan Sudirman
6. Koridor Jalan Pekayon - Pondok Gede
7. Kajian Jalan Pembentuk Struktur Ruang

B. Pembangunan Infrastruktur Sub Pusat Pelayanan Kota

- a. Penetapan Pusat Pelayanan Kota (PPK), meliputi kawasan Jalan Sudirman – Juanda – Cut Meutia – Achmad Yani.
- b. Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), meliputi:
 - SPPK Pondokgede (pusat Kelurahan Jatiwaringin)
 - SPPK Bekasi Utara (pusat Kelurahan Perwira)
 - SPPK Jatisampurna (pusat Kelurahan Jatikarya)
 - SPPK Mustikajaya (pusat Kelurahan Pedurenan)
- c. Penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
 - PPL Medan Satria (pusat Kelurahan Medan Satria)
 - PPL Rawalumbu (pusat Kelurahan Bojong Rawalumbu)
 - PPL Bekasi Selatan (pusat Kelurahan Jaka Satria)
 - PPL Bekasi Barat (pusat Kelurahan Bintara)
 - PPL Jatiasih (pusat Kelurahan Jatirasa)
 - PPL Pondok Melati (pusat Kelurahan Jatiwarna)
 - PPL Bantargebang (pusat Kelurahan Bantar Gebang)

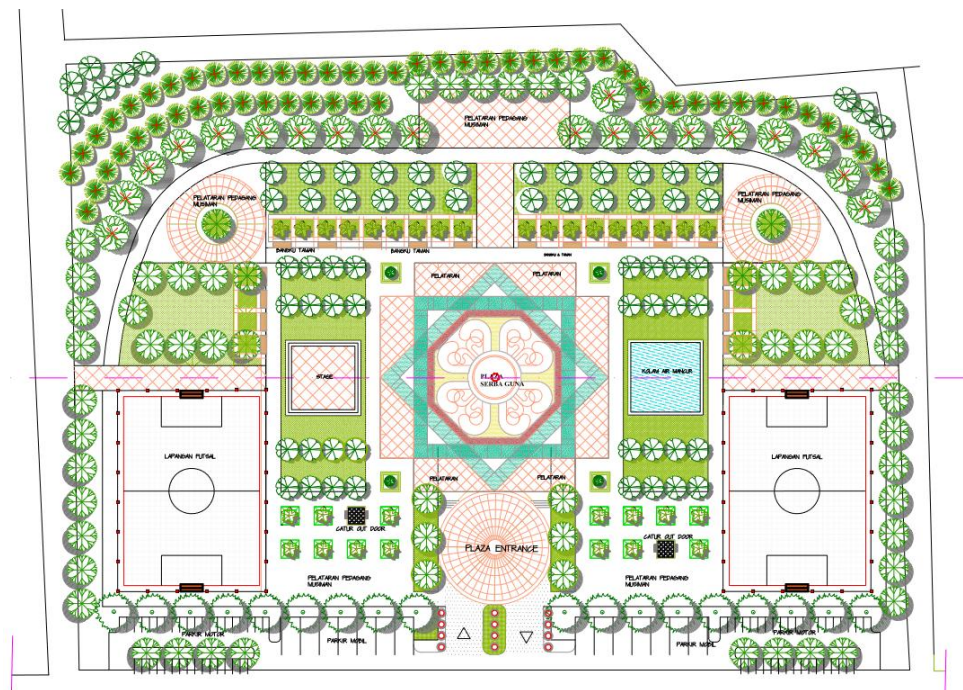
Gambar 7.2.
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bekasi



C. Taman Tematik di Beberapa Kecamatan

- a. Pembuatan Taman di 12 (dua belas) Kecamatan
- b. PSU Perumahan Duren Jaya
- c. Pemanfaatan Fasos Fasum Sebagai Taman Lingkungan

Gambar 7.3. Rencana Penataan Taman Tematik di Kecamatan Mustika Jaya



Gambar 7.4. Rencana Penataan Taman Tematik di Kecamatan Bantar Gebang



Berdasarkan pada uraian arah kebijakan dan program strategis dan keterkaitan dengan kebijakan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, rincian program prioritas RPJMD Kota Bekasi disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 7.2
Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi I
Misi I : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi anggaran dan kemampuan pendanaan daerah	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi dan aparatur pemerintah, perencanaan pembangunan serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam semua sektor pembangunan	Opini BPK terhadap akuntabilitas keuangan daerah	WDP	WTP	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Keuangan	BPKAD, DISPENDA; Setda Ekbang; KLPBJ
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Inspektorat
Tersedianya pelayanan publik yang prima		Indeks Kepuasan Masyarakat	65.26	80	Program peningkatan pelayanan perizinan	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
					Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan
		Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan	N/A*	76.6%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tercapainya peningkatan kapasitas organisasi dan		Pencapaian IKK dalam EKPPD	2.632	3.237	Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Bina Pemerintahan

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8
aparatur sipil negara					Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
					Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
					Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Dewan
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan		Kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen rencana pembangunan	100%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Program Pengembangan Data dan Informasi	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 7.3
Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi II
Misi II :Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	2. penyediaan infrastruktur dan utilitas perkotaan yang sesuai dengan dinamika pertumbuhan kota dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang kota yang berkelanjutan	Panjang jalan dalam kondisi baik	91.05%	96.28%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
					Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
					Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
Terpenuhinya kebutuhan utilitas perkotaan yang berkualitas		Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	50%	70.62%	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
		Pelayanan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)	87.05%	100%	Program peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
Berkurangnya ancaman banjir		Berkurangnya luasan genangan banjir	0%	33,27%	Program pengendalian banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air
Terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas		Rumah layak huni	98.78%	99,33%	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Bangunan dan Permukiman
		Kawasan Kumuh Yang Tertata	8%	48%			
		Rasio kapasitas TPU terhadap Jml penduduk (m2/jiwa)	0.28	0.35	Program pengelolaan areal pemakaman	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU/ Dinas Sosial

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tingkat Tanggap Waktu (Respon Time Rate) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	N/A	100	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Kantor Pemadam Kebakaran
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau perkotaan		Luasan Ruang Terbuka Hijau	7.48%	12%	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Kota/ Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU/ Badan Lingkungan Hidup
Terciptanya tata ruang kota yang berkelanjutan		Penyimpangan pemanfaatan ruang	0.15%	0.15%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Kota
					Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pertanahan	Sekretariat Daerah Bagian Pertanahan
					Program Perencanaan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Kota
					Program Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Kota
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Penegakan hukum lingkungan	100%	100%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Perolehan Adipura	Sertifikat	Adipura	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Status mutu udara ambien ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	230	172.5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Status mutu air (kelas)	4	3	Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cakupan pelayanan Air minum	29.90%	38,2%	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup/PDAM
Terwujudnya Pengelolaan sampah yang holistik berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat		Persentase penanganan sampah	48.44%	69%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan
Tersedianya multi moda transportasi yang terintegrasi	3. penyediaan prasarana dan sarana transportai yang murah, cepat, aman dan nyaman	Ketersediaan Prasarana sarana perhubungan	45%	67%	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
Meningkatnya kelancaran lalu lintas		Ketersediaan prasarana sarana lalu lintas	54%	92%	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dinas Perhubungan

Tabel 7.4

Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi III

Misi III : Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8
Tersedianya prasarana dan sarana layanan pendidikan sesuai kebutuhan yang berkualitas	4. peningkatan kehidupan sosial masyarakat melalui pengembangan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya	Angka Rata-rata lama sekolah	10,70 Thn	11 Thn	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pendidikan	Dinas Bangunan dan Permukiman
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		APM Pendidikan anak usia dini (PAUD)	37.37%	50%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		APM SD/ sederajat	100%	100%	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	90.39%	93.68%			
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	71%	75.28%	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Peningkatan pengunjung perpustakaan daerah per tahun	2569 orang	19000 orang	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Tersedianya prasarana dan sarana layanan kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas		Angka harapan hidup	69.70 Tahun	70.18 Tahun	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan/ Dinas Bangunan dan Permukiman
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rs, rs jiwa, rs paru, rs mata	Kesehatan	RSUD/Dinas Bangunan dan Permukiman
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Angka kematian ibu melahirkan	59/100.000 kelahiran	44/100.000 kelahiran	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Angka kematian bayi	55 /1000 kelahiran	15 /1000 kelahiran			
		Prevalensi balita gizi buruk	0.28%	0.15%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial		Kepemilikan Kartu Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	100%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			100%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Kota Layak Anak (5 cluster 31 Indikator Hak Anak)	N/A	31 indikator	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak dan Perempuan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	BP3AKB
		Partisipasi perempuan di lembaga legislatif tingkat Kota	16,55%	30%	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	BP3AKB
		Persentase Pasangan Usia Subur ber KB	74,67%	81,76%	Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	BP3AKB
		Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	77%	95%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Sosial	Dinas Sosial
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Terpelihara dan meningkatnya aktivitas seni dan budaya		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yg representatif	0	2 Gedung	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
Tersedianya destinasi pariwisata perkotaan		Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Daerah	10,67%	17,70%	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
Meningkatnya aktifitas kepemudaan		Pemuda pelopor yang berprestasi	5 TK, 2 TP,0 TN	5 TK, 2 TP, 1 TN	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
Meningkatnya prestasi olahraga dan aktifitas olahraga di masyarakat		Cabang Olahraga Berprestasi	7	9	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
					Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Bangunan dan Permukiman

Tabel 7.5

Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi IV

Misi IV : Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya investasi	5. Pengembangan UMKM, peningkatan prasarana dan sarana perdagangan, serta penataan kebijakan investasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesempatan kerja	Laju Peningkatan investasi	Rp 3,434,577,781,924	Rp. 7190848422636.35	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penanaman Modal	Sekretariat Daerah Bagian Kerjasama dan Investasi
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih	\$ 829,955,835.97	\$ 1,336,652,173.39	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
					Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Terkendalnya laju inflasi	pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesempatan kerja	Laju inflasi	3.45%	<6%	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan	PERINDAGKOP/ Dinas Perekonomian Rakyat/Setda Ekbang
Meningkatnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat		Koperasi aktif	448	572	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Meningkatnya aktivitas UMKM dan Ekonomi lokal berbasis		UMKM Produktif	1134	1725	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8
industri kreatif					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penanaman Modal	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Tersedianya prasarana dan sarana perdagangan		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	1375	2200	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Perdagangan	Dinas Perekonomian Rakyat
		Pasar Tradisional Modern dan UMKM Center	0	1 PTM	Program Penataan Prasarana dan peningkatan pelayanan pasar	Perdagangan	Dinas Perekonomian Rakyat
			0	1 UMKM Center	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Perindustrian; Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Tersedianya kesempatan kerja		Penyediaan Lapangan Kerja	N/A	50,000	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Angka Pengangguran Terbuka	8.75%	8.20%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7.6

Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi V

Misi V : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai

Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	6	7	8	9
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	6. Membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai	Kasus perselisihan sara dan kelompok masyarakat	4	0	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	KESBANGPOL/ Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial
		Wilayah Tertib K3	400kasus	380kasus	Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Sosial	KESBANGPOL
			10,32%	5%	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	SATPOL PP
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	KESBANGPOL, Kecamatan
		Penanganan bencana alam	85	100	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat	30	40	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kantor Pemberdayaan Masyarakat

BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Penetapan indikasi program pembangunan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. Dalam bagian ini diuraikan hubungan program pembangunan dengan SKPD Terkait. Pada bagian ini pula, akan disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan serta kebutuhan pendanaan program pembangunan. Indikasi program pembangunan RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 disajikan pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Periode 2013-2018 dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD kota Bekasi Periode 2013-2018 dapat tercapai.

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Perubahan Kota Bekasi periode 2013 - 2018 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Walikota – Wakil Walikota terpilih, sebagaimana dipresentasikan di depan DPRD Kota Bekasi menjelang Pemilu lokal secara langsung. Penyusunan RPJMD Perubahan Kota Bekasi periode 2013-2018 telah memperhatikan dasar hukum seperti diatur dalam peraturan perundangan, antara lain yaitu Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan program dan indikator kinerja dalam RPJMD Perubahan Kota Bekasi periode 2013-2018 mengacu pula program-program yang tercantum dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJMN 2015-2019 dan RPJPD Kota Bekasi 2005-2025 serta Perda No. 13 TAHUN 2011 tentang RTRW Kota Bekasi.

RPJMD Perubahan Kota Bekasi periode 2013-2018 menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan tata waktu yang sama yaitu 2013-2018. Disamping itu RPJMD Perubahan Kota Bekasi periode 2013-2018 akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD pada tahun anggaran setelah RPJMD Perubahan Kota Bekasi ditetapkan, yaitu tahun 2016 - 2018. Ada beberapa program dan indikator kinerja yang disesuaikan, diperbaiki dan atau dihilangkan dari dokumen RPJMD sebelum perubahan. Untuk itu, penyusunan RKPD dan Renstra SKPD sebelum tahun ditetapkannya RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2013 – 2018 tetap mengacu kepada RPJMD tahun sebelum perubahan. Adapun program dan indikator RPJMD sebelum perubahan sebagaimana terlampir.

Penyusunan RPJMD Perubahan Kota Bekasi periode 2013-2018 dilaksanakan melalui beberapa tahap konsultasi publik, yaitu

melalui forum Musrenbang RPJMD, dengan harapan program-program yang ada di dalam RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018 sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan proses legislasi dan pembahasan pada DPRD Kota Bekasi.

RPJMD Perubahan Kota Bekasi periode 2013-2018 juga menjadi dasar bagi Walikota dan Wakil Walikota dalam menyusun LKPJ dan LKPJ-AMJ di akhir periode masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota dan dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah. RPJMD Perubahan Kota Bekasi periode 2013-2018 merupakan suatu dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun diharapkan dapat menjadi acuan bagi segenap *stakeholder* pembangunan di Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan daerah tahun 2013-2018.

Mengingat dokumen RPJMD Perubahan Kota Bekasi periode 2013-2018 merupakan penyempurnaan dari RPJMD sebelumnya, maka indikator kinerja dan capaian target yang ditetapkan didalamnya tidak berlaku bagi program dan kegiatan pada tahun sebelum dilakukan perubahan.

10.2 Pedoman Transisi

Sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang **Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**, dokumen RPJMD yang telah disusun, masih berlaku sampai tersusunnya RPJMD perubahan. Dengan demikian, penyusunan RKPD dan penilaian kinerja tahun 2013 – 2015 tetap mengacu pada RPJMD sebelum dilakukan perubahan. Selanjutnya, RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2013-2018 berlaku sejak 2016 dan dijadikan acuan dalam perubahan RKPD 2016 dan penyusunan RKPD tahun berikutnya. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan maka RPJMD Perubahan Kota Bekasi periode 2013-2018 dapat diberlakukan sebagai pedoman sementara dalam penyusunan RKPD tahun 2019.



PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI **Nomor 01 Tahun 2016**

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018



PEMERINTAH KOTA BEKASI
2015

DAFTAR ISI

	Hal
BAB. I PENDAHULUAN	I-3
1.1. Latar Belakang	I-3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I.8
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-11
1.4. Sistematika Penulisan	I-12
1.5. Maksud dan Tujuan	I.14
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
A. Luas Wilayah dan Letak Geografis	II-1
B. Topografi.....	II-2
C. Geologi dan Jenis Tanah.....	II-3
D. Hidrologi dan Klimatologi.....	II-
Error! Bookmark not defined.	
E. Luas dan Sebaran Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya, dan Kawasan Rawan Bencana.....	II-
Error! Bookmark not defined.	
F. Demografi	II-
Error! Bookmark not defined.	
G. Potensi Pengembangan Wilayah	II-
Error! Bookmark not defined.	
2.5. Gambaran Capaian RPJMD Tahun 2008-2013.....	II-
Error! Bookmark not defined.	
BAB. III GAMBARAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAERAH SERTA KETANGKA PENDANAAN	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-
Error! Bookmark not defined.	
A. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III-
Error! Bookmark not defined.	
B. Neraca Daerah	III-9
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Tahun 2008 - 2012	III-
Error! Bookmark not defined.	
A. Proyeksi Pendapatan Kota Bekasi 2013-2018	III-
Error! Bookmark not defined.	

B. Pembiayaan	III-18
BAB. IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-
Error! Bookmark not defined.	
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-
Error! Bookmark not defined.	
4.2. Isu Strategis Kota Bekasi	IV-
Error! Bookmark not defined.	
BAB. V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-
Error! Bookmark not defined.	
5.1. VISI.....	V-
Error! Bookmark not defined.	
5.2. Misi.....	V-
Error! Bookmark not defined.	
5.3.Tujuan dan Sasaran.....	V-
Error! Bookmark not defined.	
BAB. VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	VI-
Error! Bookmark not defined.	
6.1. Strategi Umum	VI-
Error! Bookmark not defined.	
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan	VI-
Error! Bookmark not defined.	
BAB. VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.	VII-
Error! Bookmark not defined.	
7.1. Kebijakan Umum	VII-
Error! Bookmark not defined.	
7.2. Program Pembangunan Daerah.....	VII-
Error! Bookmark not defined.	
BAB. VIII INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN	
PENDANAAN.....	VIII-
Error! Bookmark not defined.	
8.1 Indikator Program Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan	VIII-2
8.2 Program Pembangunan Berdasarkan Belanja LANGSUNG Penunjang Urusan Kota Bekasi	VIII-64
8.3 Program dan Indikator Program Sebelum Review	VIII-84

BAB. IX INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KOTA BEKASI.....	IX-
Error! Bookmark not defined.	
9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Kota Bekasi	IX-2
BAB. X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.....	X-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 2.1 Peta Geografis Kota Bekasi.....	II-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 2.2 Peta Air Limbah Kota Bekasi	II-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bekasi.....	II-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 2.4 Peta Rencana Jaringan Prasarana Kota Bekasi	II-
Error! Bookmark not defined.	

Gambar 2.5 Peta Drainase Kota Bekasi.....	II-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 2.6 Tiga Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat.....	II-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 2.7 Konsep Twin Metropolitan Bodebek Karpur–DKI Jakarta	II-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 3.1 Porsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2008 – 2012	III- Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bekasi.....	III-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 4.1 Skema Penyelarasan Permasalahan, Isu Strategis, Visi-Misi, Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi	IV- Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Luas Wilayah Tergenang Banjir Tahun 2015-2013(Ha)	IV- Error! Bookmark not defined.
Gambar 7.1. Common Goal RPJMD Provinsi Jawa Barat.....	VII-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 7.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bekasi.....	VII-44
Gambar 7.3. Rencana Penataan Taman Tematik.....	VII-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 7.4. Rencana Penataan Taman Tematik di Kecamatan Bantar Gebang	VII-45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Sungai Di Wilayah Kota Bekasi..... II-

Error! Bookmark not defined.

Tabel 2.2 Status Kelas dan Mutu Air Sungai Utama Di Kota Bekasi Tahun 2011 II-

Error! Bookmark not defined.

Tabel 8.1 Indikator Program Pembangunan Dan Kebutuhan Pendanaan

VIII-63 6

Tabel 8.2 Program Pembangunan Berdasarkan Urusan Belanja Langsung

Penunjang Urusan Kota Bekasi VIII-1 6

Tabel 8.3 Program dan Indikator Program Sebelum VIII-1 6

Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Kota Bekasi IX-1 6

Tabel 4.1 Jumlah Lokasi Banjir, Luas Genangan dan Penyebab Terjadinya

Banjir di Kota Bekasi Periode 2005 2007 V-Error! Bookmar

Tabel 4.2 Sebaran Luasan Bencana Banjir di Kota Bekasi Tahun 2009-2014 IV-Error! Bookmark n

Tabel 4.3 Permasalahan Kota Bekasi berdasarkan Bidang-Bidang

Pembangunan IV-Error! Bookmar

Tabel 4.4 Tujuh (Tujuh) Isu Strategis Kota Bekasi IV-Error! Bookmark not defined.

Tabel 8.1 Indikator Program Pembangunan Dan Kebutuhan Pendanaan

VIII-63 6

Tabel 8.2 Program Pembangunan Berdasarkan Urusan Belanja Langsung

Penunjang Urusan Kota Bekasi VIII-1 6

Tabel 8.3 Program dan Indikator Program Sebelum VIII-1 6

Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Kota Bekasi IX-1 6

Tabel 8.1 Indikator Program Pembangunan Dan Kebutuhan Pendanaan

VIII-63 6

Tabel 8.2 Program Pembangunan Berdasarkan Urusan Belanja Langsung

Penunjang Urusan Kota Bekasi VIII-1 6

Tabel 8.3 Program dan Indikator Program Sebelum VIII-1 6

Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Kota Bekasi IX-1 6

Tabel 8.1 Indikator Program Pembangunan Dan Kebutuhan Pendanaan

VIII-63

6

Tabel 8.2 Program Pembangunan Berdasarkan Urusan Belanja Langsung

Penunjang Urusan Kota Bekasi VIII-1

6

Tabel 8.3 Program dan Indikator Program Sebelum VIII-1 6

Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Kota Bekasi IX-1 6

Tabel 8.1 Indikator Program Pembangunan Dan Kebutuhan Pendanaan VIII-63

Tabel 8.2 Program Pembangunan Berdasarkan Urusan Belanja Langsung Penunjang

Urusan Kota Bekasi VIII-1

Tabel 8.3 Program dan Indikator Program Sebelum VIII-1

Tabel 9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Kota Bekasi IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan ... I-

Error! Bookmark not defined.

Gambar 2.1 Peta Geografis Kota Bekasi II-

Error! Bookmark not defined.

Gambar 2.2 Peta Air Limbah Kota Bekasi II-

Error! Bookmark not defined.

Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bekasi	II-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 2.4 Peta Rencana Jaringan Prasarana Kota Bekasi	II-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 2.5 Peta Drainase Kota Bekasi	II-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 2.7 Konsep Twin Metropolitan Bodebek Karpur–DKI Jakarta	II-
Error! Bookmark not defined.	
Gambar 2.6 Tiga Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat	II-
Error! Bookmark not defined.	

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 1

2016

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan adanya harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dalam rangka mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal ke dalam perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk mengoptimalkan pengukuran rencana kinerja pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun/periode tahun 2013-2018.
- (2) Rincian Perubahan Visi, Misi, dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari :

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis;
- e. Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
- g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. Bab : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai VIII Kebutuhan Pendanaan;
- i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. Bab X : Penutup.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Januari 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :**

(8/2016)

MISI III
TUJUAN

Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya
Kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain yang berkualitas dan Aksesibel

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjaw ab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Indeks Pendidikan	1 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					12,025,000,000		13,107,250,000		14,286,902,500		15,572,723,700		16,974,268,800		71,966,145,000	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		SMK Terakreditasi	%	65	66		67		68		69		70		70		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		SMA/MA Terakreditasi	%	70	71		72		73		74		75		75		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		SMP/MTS Terakreditasi	%	70	71		72		73		74		75		75		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		SD/MI Terakreditasi	%	65	66		67		68		69		70		70		Pendidikan	Dinas Pendidikan
Angka Rata-rata lama sekolah.	2 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan					98,115,000,000		107,926,500,000		118,719,150,000		130,591,065,000		143,650,171,500		599,001,886,500	Pendidikan	DISBANGKIM
		Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar yang representatif	%	2752	20.1		19.975		19.975		19.975		19.975		100		Pendidikan	DISBANGKIM
		Tersedianya Prasarana Pendidkan Menengah pertama yang representatif	%	762	19.95		20.20		19.95		19.95		19.95		100		Pendidikan	DISBANGKIM
		Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Atas yang representatif	%	202	20.4		20.4		20.4		19.4		19.4		100		Pendidikan	DISBANGKIM
		Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan yang reperesentatif	%	124	20.5		19.875		19.875		19.875		19.875		100		Pendidikan	DISBANGKIM
Angka Rata-rata lama sekolah.	3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					41,936,200,000		45,710,458,000		49,824,399,200		54,308,595,100		59,196,368,700		250,976,021,000	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Guru SD yang sertifikasi	%	43.5	45		46.50		48		49.50		51		51		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI terhadap bidang studi yang diajarkan	%	47	49		51		53		55		57		57		Pendidikan	Dinas Pendidikan

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjaw ab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
APM Pendidikan anak usia dini (PAUD) 																		

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjaw ab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA /Paket C.		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SD	Rasio	65	54		56		58		60		62		62		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs	%	92.73	93.23		93.94		94.48		95.32		96.00		96.00		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.14	0.13		0.12		0.11		0.10		0.09		0.09		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan	%	90	91.45		92.18		93		93.90		94.50		94.50		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat Pendidikan SMP	%	52	54		56		58		60		62		62		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rasio siswa SMP : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta	Rasio	45	44		43		42		41		40		40		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP	Rasio	1.8	1.70		1.60		1.50		1.40		1.30		1.30		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rerata UN SD/MI	%	7.7	7.80		7.90		8.00		8.10		8.20		8.20		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rerata UN SMP/MTs	%	6.65	6.80		6.95		7.10		7.25		7.40		7.40		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Prestasi yang diraih di tingkat provinsi dan atau nasional	Gelar/ Juara	N/A	10		10		10		10		10		10		Pendidikan	Dinas Pendidikan
	6 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah					16,835,000,000		18,350,150,000		20,001,663,500		21,801,813,200		23,763,976,400		100,752,603,100	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		APK SMA/MA/SMK	%	72.95	73.75		74.18		75.89		76.20		77.70		77.70		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	%	0.48	0.46		0.44		0.43		0.42		0.40		0.40		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Lulusan SMA/SMK/MA melanjutkan ke PT/Akademi	%	0	0		55		60		65		70		70		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di SMA	%	55	56		57		58		59		60		60		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rasio siswa SMA : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta	Rasio	39	39		39		39		38		38		38		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMA	Rasio	2	2		2		2		2		1		1		Pendidikan	Dinas Pendidikan

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di SMK	%	60	62		64		66		68		70		70		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rasio siswa SMK : ruang kelas (SPM 1:32) Negeri+Swasta	Rasio	37	37		36		36		35		35		35		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMK	Rasio	2	2		2		2		2		1		1		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rerata UN SMA	Nilai	7.9	8.00		8.10		8.20		8.30		8.40		8.40		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rerata UN SMK	Nilai	7.8	7.90		8.00		8.10		8.20		8.30		8.30		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Prestasi yang diraih di tingkat propinsi dan atau nasional	Gelar/Juara	N/A	10		10		10		10		10		10		Pendidikan	Dinas Pendidikan
Persentase Peningkatan pengunjung perpustakaan daerah per tahun	7	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan						3,321,556,000		3,100,000,000		3,720,000,000		4,464,000,000			Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Prosentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	2569 Org	30		30		30		30		30		19000 Org		Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Prosentase Perpustakaan Yang Terbina	%	618 Perpustakaan	20		20		20		20		20		20		Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Indeks Kesehatan Angka harapan hidup	8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				200,000,000		145,000,000		1,989,818,000		1,248,400,000		680,400,000		4,263,618,000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	6.5	19		22		25.80		29		32.26		32.26		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase klinik yang berizin	%	N/A	14		37		47		57		67		67		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Sakit yang berizin	%	37	37		38		39		39		40		40		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi (pembinaan, pengawasan dan pengendalian)	%	N/A	1		6		11		16		21		21		Kesehatan	Dinas Kesehatan

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjaw ab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	9	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan larineannva				9,400,000,000		10,810,000,000		12,431,500,000		14,296,225,000		14,296,225,000		61,233,950,000	Kesehatan	Dinas Kesehatan/ DISBANGKIM
		Tersedianya Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Emergensi Dasar (Poned)	Poned	5	6		7		8		9		10		10		Kesehatan	Dinas Kesehatan/ DISBANGKIM
		Tersedianya Puskesmas Pembantu (Pustu) Menjadi Puskesmas	Puskesma s	31	31		31		33		33		34		34		Kesehatan	Dinas Kesehatan/ DISBANGKIM
	10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana				22,105,000,000		40,605,039,593		16,271,576,800		49,746,588,938		15,223,294,223		143,951,499,554	Kesehatan	RSUD/ DISBANGKIM
		Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata																
		Prosentase Terpenuhiya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik (berdasarkan Rencana Strategis Bisnis RSUD tahun 2013-2018)	%	86,11	88,88	22,105,000,000	91,66	31,189,320,804	94,44	5,152,800,399	97,22	7,800,000,000	97,22	7,800,000,000	97,22	74,047,121,203	Kesehatan	RSUD/ DISBANGKIM
		Tersediannya RSUD Kelas D	RSUD	0	0		0	0	0	390,000,000	0	20,360,000,000	2		2	20,750,000,000	Kesehatan	Dinas Kesehatan/Disbang kim
	11	Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit menular				1,270,000,000		1,374,000,000		791,186,000		1,969,695,000		2,813,317,000		8,218,198,000	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjaw ab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia Balita	%	28.42	45		50		55		60		65		65		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita penyakit (pasien baru) TB BTA Positif	%	58.03	62		65		67		70		70		70		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare	%	57.67	65		70		75		80		85		85		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan kasus AIDS yang ditangani (CST)	%	95	82		82		85		90		95		95		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Mikro Filaria Rate (Filariasis)	%	0.9	0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penderita kusta yang selesai berobat/RFT	%	90	85		85		90		90		90		90		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penemuandan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP)	per 100.000 penduduk usia kurang dari 15 tahun	1.3	2		2		2		2		2		2		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					16,600,038,270		4,254,364,000		7,340,000,000		3,387,150,000		12,062,500,000		43,644,052,270	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan puskesmas	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	13 Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					193,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		993,000,000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	%	N/A	70		75		80	0	85	0	85	0	85		Kesehatan	Dinas Kesehatan

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjaw ab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Angka kematian ibu melahirkan Angka kematian bayi		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	68.14	69	154,950,000	70	1,450,000,000	70	710,354,000	70		70	1,060,000,000	70	4,422,084,000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan 14 Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak																	
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	87.16	90		91		92		93		95		95		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan bayi	%	45.26	70		75		80		85		90		90		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani	%	45.1	60		65		70		75		80		80		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	%	97.13	97.20		97.50		97.80		98		98		98		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	%	53.23	70		75		80		85		90		90		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atauTenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	87.42	89		90		90		90		90		90		Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prevalensi Balita Gizi Buruk	Program 15 Perbaikan Gizi Masyarakat					150,000,000		550,000,000		195,000,000		320,407,000		1,009,229,500		2,224,636,500	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0.28	0.26		0.20		0.20		0.20		0.15		0.15		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi balita Gizi Kurang	%	N/A	5		5		5		5		5		5		Kesehatan	Dinas Kesehatan
Kepemilikan Kartu Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Program Upaya 16 Kesehatan Masyarakat					18,961,777,400		20,609,722,100		22,177,217,100		24,515,895,600		26,805,606,900		113,070,219,100	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjaw ab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan oleh sarana kesehatan di Kab/Kota	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	17 Program Kesehatan Penduduk Miskin					34,800,000,000		34,800,000,000		34,800,000,000		34,800,000,000		34,800,000,000		174,000,000,000	Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUD
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUD
Kota Layak Anak (5 cluster/bid)	18 Program Pelayanan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak					4,740,000,000		5,214,000,000		5,735,400,000		6,308,940,000		6,939,834,000		28,938,174,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak dan KB
		Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100		100		100		100		100		100		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak dan KB
		Menurunnya Rasio KDRT	Rasio	430 : 1	437 : 1		450 : 1		460 : 1		465 : 1		470:1		470:1		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak dan KB
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	19 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan					1,833,000,000		2,016,300,000		2,217,930,000		2,439,723,500		2,683,695,300		11,190,648,800	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak dan KB
		Prosentase Pertisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	29,29	29.78		30		30.25		30.55		30.75		30.75		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak dan KB

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjaw ab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	30.75	31.75		32.75		33.75		34.55		35.00		35.00		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Prosentase perempuan di DPRD Kota	%	16	18		18		18		18		18		18		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	37.94	38.14		38.34		38.54		38.74		38.94		38.94		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS)	Program 20 Keluarga Berencana					800,000,000		880,000,000		968,000,000		1,064,800,000		1,171,280,000		4,884,080,000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan Penyediaan Alat/Obat Kontrasepsi dalam memenuhi permintaan masyarakat	%	N/A	30		30		30		30		30		30		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Istrinya dibawah usia 20 Tahun	%	N/A	2.39		2.15		1.90		1.85		1.40		1.40		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	N/A	9.85		8.25		8.00		7.45		6.65		6.65		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Total Fertility Rate (TFR)	%	2.01	3.33		3.18		3.03		2.88		2.73		2.73		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan Anggota Bina Balita (BKB) Ber KB	%	N/A	70		70		70		70		70		70		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB	%	N/A	70		75		80		85		87		87		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjaw ab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Presentase Keluarga Remaja Yang Mengikuti POKTAN	%		20.45		22.53		24.53		26.53		28.53		28.53		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Presentase Keluarga Balita Yang Mengikuti POKTAN	%		17.17		19.17		21.17		23.17		25.17		25.17		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Presentase Keluarga Lansia Yang Mengikuti POKTAN	%		28.45		30.45		32.45		34.45		36.45		36.45		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Presentase Laki-laki dengan Ber KB	%		3.66		3.76		3.86		3.96		4.06		4.06		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Prosentase Peserta KB Baru	%		63.35		64.47		72.53		75.58		78.64		78.64		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Prosentase Kegagalan Penggunaan Alat Kontrasepsi	%		0.4		0.3		0.2		0.1		0		0		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Peningkatan Rata-rata Usia Perkawinan Pertama	Tahun		20 Tahun		20 Tahun		20 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		>21 Tahun		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	21 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya					1,600,000,000		1,900,000,000		2,200,000,000		2,500,000,000		2,800,000,000		11,000,000,000	Sosial	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau Kelompok sosial ekonomi lainnya	%	25	30		34		38		42		47		47		Sosial	Dinas Sosial
	22 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					6,900,000,000		6,455,000,000		6,510,000,000		6,565,000,000		6,620,000,000		33,050,000,000	Sosial	Dinas Sosial

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjaw ab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah	%	30	35		36		37		38		39		39	Sosial		Dinas Sosial
Sarana penyelenggar aan seni dan budaya yang representatif	23 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					3,000,000,000		3,500,000,000		4,000,000,000		4,700,000,000		5,200,000,000		20,400,000,000	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Cakupan cagar budaya, Situs dan Monumen di Kota Bekasi yang dilestarikan	%	47.06	50		60		70		80		100		100		Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Event	7	7		8		9		10		11		11		Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Daerah	24 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					6,750,000,000		7,300,000,000		7,850,000,000		8,600,000,000		9,300,000,000		39,800,000,000	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase kawasan wisata milik Pemerintah Kota Bekasi yang tertata	%	0	10		60		80		90		100		100		Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Usaha / Jasa Kepariwisataan yang Berizin	%	20	20		25		30		35		40		40		Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Pemuda pelopor tingkat nasional	25 Program peningkatan peran serta kepemudaan					5,600,000,000		5,600,000,000		5,600,000,000		5,600,000,000		9,200,000,000		31,600,000,000	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase pemuda putus sekolah yang dibina	%	24	24		30		50		60		70		70		Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	0	0		0		0		100		0		0		Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Prestasi yang dicapai pemuda Tk. Kota, Tk. Provinsi dan Tk.Nasional	Gelar Juara	5TK, 2TP ,0TN	5 TK, 0 TP, 0 TN		5 TK, 0 TP, 0 TN		5 TK, 1 TP, 0 TN		5 TK, 1TP ,1TN		5 TK, 2TP ,1TN		Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjaw ab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Cabang Olahraga Berprestasi	26 Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga					5,900,000,000		6,100,000,000		7,200,000,000		7,450,000,000		8,250,000,000		34,900,000,000	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi dan unggulan	%	50	50		55		60		65		70		75	Kepemudaan dan Olahraga		Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase atlet berprestasi Tk.Provinsi dan Nasional	%	50	50		55		60		65		70		75		Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	27 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga					10,070,000,000		10,570,000,000		11,070,000,000		11,570,000,000		12,500,000,000		55,780,000,000	Kepemudaan dan Olahraga	DISBANGKIM, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Terbangunnya Stadion Mini untuk kecamatan	unit	0	0		2		2		2		2		8		Kepemudaan dan Olahraga	DISBANGKIM, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang representatif (sesuai standar) di tingkat Kota Bekasi	%	20	60		70		80		90		100		100		Kepemudaan dan Olahraga	DISBANGKIM, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Rasio ketersediaan sarana olahraga terhadap jumlah penduduk	1 : 10.000 Penduduk	210	238		250		262		274		286		298		Kepemudaan dan Olahraga	DISBANGKIM, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 8.2
Program Pembangunan Berdasarkan Urusan Belanja Langsung Penunjang Urusan Kota Bekasi
Tahun 2013-2018

Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggungjawab	
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan																	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	1,507,139,000	100	387,480,000	100	415,700,000	100	951,219,200	100	1,087,402,080	100	4,348,940,280	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	0	100	0	100	100,000,000	100	100,000,000	100	0	100	0	100	200,000,000	Dinas Bina Marga dan Tata Air
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	0	100	450,000,000	Dinas Bina Marga dan Tata Air
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	0	100	0	100	0	100	290,700,000	100	0	100	0	100	290,700,000	Dinas Bina Marga dan Tata Air
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	0	100	407,600,000	100	452,600,000	100	490,834,500	100	589,001,400	100	706,801,680	100	2,646,837,580	Kecamatan Bantargebang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	0	100	6,188,000	100	16,188,000	100	30,000,000	100	36,000,000	100	43,200,000	100	131,576,000	Kecamatan Bantargebang
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	0	100	1,624,688,500	100	1,931,288,500	100	2,031,288,500	100	2,437,546,200	100	2,925,055,440	100	10,949,867,140	Kecamatan Bantargebang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	0	100	100,000,000	100	225,700,000	100	280,000,000	100	322,000,000	100	370,300,000	100	1,298,000,000	Kecamatan Bekasi Barat

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	0	100	11,060,000	100	22,000,000	100	22,000,000	100	28,600,000	100	37,180,000	100	120,840,000	Kecamatan Bekasi Barat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	0	100	2,435,339,400	100	2,778,449,500	100	3,121,083,500	100	4,057,408,550	100	5,274,631,115	100	17,666,912,065	Kecamatan Bekasi Barat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	3,500,000,000	100	3,500,000,000	Kecamatan Bekasi Selatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	503,400,000	100	807,950,000	100	810,000,000	100	810,000,000	100	810,000,000	100	3,741,350,000	Kecamatan Bekasi Selatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	23,950,000	100	33,950,000	100	34,000,000	100	34,000,000	100	34,000,000	100	159,900,000	Kecamatan Bekasi Selatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen	100	100	533,602,000	100	675,000,000	100	688,000,000	100	725,000,000	100	0	100	2,621,602,000	Kecamatan Bekasi Timur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persen	100	100	11,000,000	100	20,400,000	100	21,900,000	100	23,400,000	100	0	100	76,700,000	Kecamatan Bekasi Timur
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,075,860,000	100	2,858,699,050	100	2,897,580,725	100	2,987,200,511	100	0	100	10,819,340,286	Kecamatan Bekasi Timur
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	75	100	328,239,000	100	328,239,000	100	622,664,400	100	622,664,400	100	622,664,400	100	2,524,471,200	Kecamatan Bekasi Utara
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	buku	5	100	36,056,000	100	47,058,000	100	51,840,000	100	51,840,000	100	55,000,000	100	241,794,000	Kecamatan Bekasi Utara

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	80	100	2,064,693,600	100	2,603,287,000	100	3,438,131,000	100	3,438,131,200	100	3,438,131,200	100	14,982,374,000	Kecamatan Bekasi Utara
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	550,000,000	100	550,000,000	100	485,000,000	100	580,000,000	100	450,000,000	100	2,615,000,000	Kecamatan Jatisampurna
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	15,000,000	100	25,000,000	100	49,000,000	100	75,000,000	100	30,000,000	100	194,000,000	Kecamatan Jatisampurna
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,161,174,500	100	2,523,380,500	100	2,775,100,000	100	2,953,600,000	100	3,500,000,000	100	13,913,255,000	Kecamatan Jatisampurna
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	0	100	491,520,000	100	437,750,000	100	481,525,000	100	746,127,360	100	2,156,922,360	Kecamatan Jatiasih
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	0	100	22,600,000	100	29,600,000	100	32,560,000	100	34,306,800	100	119,066,800	Kecamatan Jatiasih
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	0	100	2,947,542,000	100	2,897,137,500	100	3,186,851,250	100	4,474,368,756	100	13,505,899,506	Kecamatan Jatiasih
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	0	100	365,731,000	100	365,000,000	100	378,956,000	100	413,956,000	100	452,956,000	100	1,976,599,000	Kecamatan Medan Satria
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4 buku	4960000	100	17,210,000	100	28,000,000	100	43,000,000	100	48,000,000	100	52,000,000	100	188,210,000	Kecamatan Medan Satria
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	0	100	1,473,705,000	100	1,826,655,500	100	2,220,407,000	100	2,280,850,620	100	2,300,000,000	100	10,101,618,120	Kecamatan Medan Satria

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	333,000,000	100	271,300,000	100	320,000,000	100	384,000,000	100	422,400,000	100	1,730,700,000	Kecamatan Mustikajaya
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	17,500,000	100	23,550,000	100	49,000,000	100	72,000,000	100	79,200,000	100	241,250,000	Kecamatan Mustikajaya
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,095,943,500	100	2,767,665,000	100	3,069,675,000	100	3,703,270,000	100	4,073,597,000	100	15,710,150,500	Kecamatan Mustikajaya
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	0	100	18,000,000	100	0	100	0	100	0	100	18,000,000	Kecamatan Pondokgede
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	0	100	2,706,205,500	100	0	100	0	100	0	100	2,706,205,500	Kecamatan Pondokgede
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	0	100	415,390,000	100	0	100	0	100	0	100	415,390,000	Kecamatan Pondokgede
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	226,100,000	100	226,100,000	100	175,000,000	100	175,000,000	100	550,000,000	100	1,352,200,000	Kecamatan Pondok Melati
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	7,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	100	17,000,000	100	38,000,000	100	96,000,000	Kecamatan Pondok Melati
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	1,373,933,500	100	1,394,923,500	100	1,657,275,000	100	1,889,845,000	100	15,000,000	100	6,330,977,000	Kecamatan Pondok Melati
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	16,500,000	100	57,000,000	100	69,000,000	100	85,000,000	100	96,000,000	100	323,500,000	Kecamatan Rawalumbu

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,031,191,500	100	2,653,261,500	100	2,691,261,500	100	2,729,261,500	100	2,767,261,500	100	12,872,237,500	Kecamatan Rawalumbu
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	319,650,000	100	445,000,000	100	965,000,000	100	790,000,000	100	850,000,000	100	3,369,650,000	Kecamatan Rawalumbu
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	81,568,000	100	82,950,000	100	127,573,500	100	157,448,000	100	197,365,200	100	646,904,700	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	1,258,607,050	100	2,208,596,000	100	2,189,076,500	100	3,220,609,120	100	3,741,021,518	100	12,617,910,188	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase	100	100	106,200,000	100	146,700,000	100	162,000,000	100	162,000,000	100	164,000,000	100	740,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	700,115,500	100	1,141,470,500	100	948,500,000	100	950,500,000	100	964,500,000	100	4,705,086,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase	100	100	491,340,000	100	312,410,000	100	342,000,000	100	344,000,000	100	347,000,000	100	1,836,750,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	361,850,000	100	623,850,000	100	629,969,500	100	553,685,000	100	591,850,000	100	2,761,204,500	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	75,000,000	100	90,000,000	100	111,000,000	100	101,000,000	100	99,000,000	100	476,000,000	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,463,743,500	100	2,796,795,000	100	3,448,080,500	100	4,046,700,000	100	3,373,295,000	100	16,128,614,000	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	88,500,000	100	73,571,500	100	83,885,500	100	120,000,000	100	144,000,000	100	509,957,000	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	1,651,870,000	100	1,359,268,000	100	1,479,200,000	100	1,775,040,000	100	2,130,048,000	100	8,395,426,000	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	521,500,000	100	357,200,000	100	465,214,500	100	558,257,400	100	669,908,800	100	2,572,080,700	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	0	100	960,000,000	100	1,095,000,000	100	1,140,000,000	100	1,185,000,000	100	1,210,000,000	100	5,590,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	0	100	215,270,000	100	222,270,000	100	229,270,000	100	237,270,000	100	245,270,000	100	1,149,350,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	3,894,435,460	100	5,360,227,740	100	6,433,688,836	100	7,865,964,370	100	9,759,750,118	100	33,314,066,524	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	400,000,000	100	425,000,000	100	450,000,000	100	475,000,000	100	500,000,000	100	2,250,000,000	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Buku/Dokumen pelaporan rencana /capaian kinerja	6	100	110,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	110,000,000	100	550,000,000	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	860,000,000	100	875,000,000	100	900,000,000	100	925,000,000	100	950,000,000	100	4,510,000,000	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	0	100	535,000,000	100	680,000,000	100	790,000,000	100	680,000,000	100	630,000,000	100	3,315,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	dokume n	0	100	230,000,000	100	340,000,000	100	360,000,000	100	370,000,000	100	390,000,000	100	1,690,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	0	100	2,016,442,000	100	2,213,252,250	100	2,114,542,000	100	2,084,542,000	100	2,066,042,000	100	10,494,820,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	69,386,000	100	90,000,000	100	156,000,000	100	195,000,000	100	120,000,000	100	630,386,000	Dinas Kebersihan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,510,076,502	100	4,105,364,000	100	4,302,700,000	100	5,365,125,000	100	4,671,321,500	100	20,954,587,002	Dinas Kebersihan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	415,464,680	100	596,700,000	100	705,000,000	100	867,500,000	100	1,025,000,000	100	3,609,664,680	Dinas Kebersihan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	122000000	100	350,000,000	100	380,000,000	100	416,000,000	100	522,000,000	100	645,000,000	100	2,313,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	1672817500	100	2,892,235,500	100	3,640,347,000	100	3,888,416,400	100	4,120,500,000	100	3,261,000,000	100	17,802,498,900	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	235000000	100	325,000,000	100	335,000,000	100	402,000,000	100	465,000,000	100	520,000,000	100	2,047,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	55,000,000	100	78,000,000	100	155,000,000	100	130,000,000	100	143,000,000	100	561,000,000	Dinas Kesehatan

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	1,849,940,500	100	2,585,292,500	100	3,231,376,500	100	3,228,700,000	100	3,335,200,000	100	14,230,509,500	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	580,000,000	100	428,700,000	100	520,000,000	100	665,000,000	100	731,500,000	100	2,925,200,000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	121,350,000	100	141,010,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	712,360,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	1,461,098,500	100	3,308,389,500	100	3,163,587,000	100	4,112,663,100	100	5,346,462,030	100	17,392,200,130	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	358,240,000	100	393,200,000	100	1,600,000,000	100	2,080,000,000	100	2,704,000,000	100	7,135,440,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	1,465,000,000	100	1,490,000,000	100	1,510,000,000	100	1,660,000,000	100	0	100	6,125,000,000	Dinas Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	260,000,000	100	260,000,000	100	310,000,000	100	310,000,000	100	0	100	1,140,000,000	Dinas Pendapatan Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	6,631,029,500	100	8,136,739,500	100	7,840,000,000	100	49,575,000,000	100	45,000,000	100	72,227,769,000	Dinas Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	315,000,000	100	350,000,000	100	275,000,000	100	300,000,000	100	400,000,000	100	1,640,000,000	Dinas Pendidikan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	23,713,615,500	100	37,015,151,500	100	39,632,664,500	100	39,960,164,500	100	24,770,115,500	100	165,091,711,500	Dinas Pendidikan

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	665,000,000	100	595,000,000	100	732,500,000	100	925,000,000	100	776,250,000	100	3,693,750,000	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	400,000,000	100	415,000,000	100	450,000,000	100	475,000,000	100	485,000,000	100	2,225,000,000	Dinas Perekonomian Rakyat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	2,359,436,800	100	2,523,355,000	100	3,000,000,000	100	3,500,000,000	100	3,750,000,000	100	15,132,791,800	Dinas Perekonomian Rakyat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	1,002,920,000	100	623,000,000	100	1,000,000,000	100	1,200,000,000	100	1,350,000,000	100	5,175,920,000	Dinas Perekonomian Rakyat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	661,170,000	100	750,000,000	100	750,000,000	100	750,000,000	100	0	100	2,911,170,000	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	70,000,000	100	90,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	0	100	360,000,000	Dinas Perhubungan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	3,840,621,500	100	4,146,421,500	100	4,231,421,500	100	4,261,421,501	100	0	100	16,479,886,001	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	0	100	512,440,000	100	422,184,000	100	457,402,400	100	493,142,640	100	1,885,169,040	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	2	100	0	100	91,220,000	100	100,342,000	100	110,376,200	100	121,413,820	100	423,352,020	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	1,500,642,500	100	1,836,451,500	100	2,040,700,000	100	2,269,600,000	100	2,490,523,200	100	10,137,917,200	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	545,782,000	100	574,365,100	100	602,948,200	100	631,531,300	100	649,280,000	100	3,003,906,600	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	112,500,000	100	127,250,000	100	142,000,000	100	156,750,000	100	142,500,000	100	681,000,000	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	1,467,699,660	100	1,773,985,038	100	1,825,880,416	100	1,879,300,794	100	2,044,889,500	100	8,991,755,408	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	540,000,000	100	675,000,000	100	843,750,000	100	1,012,500,000	100	1,215,000,000	100	4,286,250,000	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	90,000,000	100	108,000,000	100	129,600,000	100	155,520,000	100	186,624,000	100	669,744,000	Dinas Sosial
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	1,275,336,000	100	1,594,170,000	100	1,992,712,500	100	2,490,800,625	100	3,113,500,781	100	10,466,519,906	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	762,054,800	100	800,140,000	100	937,800,000	100	1,179,100,000	100	1,271,020,000	100	4,950,114,800	Dinas Tata Kota
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	61,870,800	100	61,870,800	100	77,500,000	100	79,500,000	100	79,500,000	100	360,241,600	Dinas Tata Kota
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	3,592,609,400	100	4,500,525,000	100	4,028,986,000	100	4,607,775,000	100	4,702,119,000	100	21,432,014,400	Dinas Tata Kota
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	154,000,000	100	179,000,000	100	179,000,000	100	205,850,000	100	232,700,000	100	950,550,000	Dinas Tenaga Kerja

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	1,598,838,000	100	2,019,263,500	100	2,898,107,000	100	3,332,823,050	100	3,767,539,100	100	13,616,570,650	Dinas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	375,000,000	100	421,000,000	100	563,640,000	100	648,186,000	100	732,732,000	100	2,740,558,000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	88,000,000	100	125,000,000	100	148,000,000	100	148,200,000	100	163,420,000	100	672,620,000	Inspektorat Kota
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	1,364,470,000	100	1,629,500,000	100	2,044,700,000	100	2,242,615,000	100	2,421,876,000	100	9,703,161,000	Inspektorat Kota
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	498,000,000	100	1,465,000,000	100	1,405,000,000	100	956,700,000	100	1,462,370,000	100	5,787,070,000	Inspektorat Kota
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen	5	100	28,300,000	100	29,930,000	100	29,930,000	100	29,930,000	100	29,930,000	100	148,020,000	Kantor Arsip Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jenis	0	100	132,003,000	100	125,500,000	100	145,203,000	100	145,203,000	100	145,203,000	100	693,112,000	Kantor Arsip Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	0	100	29,500,000	100	29,500,000	100	34,000,000	100	34,000,000	100	37,000,000	100	164,000,000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	0	100	346,500,000	100	391,250,000	100	437,650,000	100	486,000,000	100	532,300,000	100	2,193,700,000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	291,000,000	100	193,500,000	100	469,000,000	100	319,000,000	100	227,500,000	100	1,500,000,000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	110,000,000	100	130,000,000	100	0	100	0	100	0	100	240,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	13,297,833,000	100	15,455,262,000	100	0	100	0	100	0	100	28,753,095,000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	328	328	100	3,500,000,000	100	5,100,000,000	100	44,100,000,000	100	48,907,879,000	100	43,009,787,000	100	144,617,666,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	100	100	14,445,000,000	100	14,445,000,000	100	14,445,000,000	100	14,445,000,000	100	14,445,000,000	100	72,225,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	100	100	180,000,000	100	180,000,000	100	190,000,000	100	190,000,000	100	190,000,000	100	930,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	23,529,620,000	100	23,531,620,000	100	23,553,620,000	100	23,555,620,000	100	23,557,620,000	100	117,728,100,000	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	75	100	2,185,371,000	100	1,510,371,000	100	2,250,000,000	100	2,350,000,000	100	0	100	8,295,742,000	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	75	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	0	100	1,400,000,000	Sekretariat DPRD
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	75	100	9,125,000,000	100	9,345,000,000	100	10,028,500,000	100	10,724,500,000	100	0	100	39,223,000,000	Sekretariat DPRD

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	0	100	0	100	36,000,000	100	45,000,000	100	80,000,000	100	166,312,800	100	327,312,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	0	100	0	100	605,000,000	100	1,263,870,000	100	1,782,964,000	100	3,267,727,840	100	6,919,561,840	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	0	100	0	100	0	100	325,000,000	100	650,000,000	100	480,009,600	100	1,455,009,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	0	100	0	100	130,000,000	100	135,000,000	100	150,000,000	100	190,000,000	100	605,000,000	Kantor Pemadam Kebakaran
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	0	100	0	100	1,393,040,000	100	6,762,900,000	100	8,365,625,000	100	5,215,000,000	100	21,736,565,000	Kantor Pemadam Kebakaran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	0	100	0	100	771,260,000	100	1,100,000,000	100	1,147,000,000	100	2,285,000,000	100	5,303,260,000	Kantor Pemadam Kebakaran
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0	100	215,270,000	100	222,270,000	100	229,270,000	100	237,270,000	100	237,270,000	100	1,141,350,000	Dinas Bangunan dan Permukiman
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	75,000,000	Dinas Bangunan dan Permukiman
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	0	100	960,000,000	100	1,095,000,000	100	1,140,000,000	100	1,185,000,000	100	1,185,000,000	100	5,565,000,000	Dinas Bangunan dan Permukiman
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	'%	0	100	0	100	30,000,000	100	36,000,000	100	43,200,000	100	51,840,000	100	161,040,000	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	'%	100	100	0	100	1,261,452,000	100	1,683,000,000	100	2,019,600,000	100	2,423,520,000	100	7,387,572,000	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	'%	0	100	0	100	475,000,000	100	475,000,000	100	570,000,000	100	684,000,000	100	2,204,000,000	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	0	100	130,000,000	100	155,000,000	100	170,500,000	100	175,000,000	100	180,000,000	100	810,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	0	100	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	0	100	450,000,000	Dinas Bina Marga dan Tata Air
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kecamatan Bantargebang
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	0	100	0	100	0	100	150,000,000	100	195,000,000	100	253,500,000	100	598,500,000	Kecamatan Bekasi Barat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	0	100	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	450,000,000	Kecamatan Bekasi Selatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	68750000	100	102,320,000	100	105,000,000	100	124,000,000	100	185,000,000	100	205,000,000	100	721,320,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	0	100	0	100	0	100	0	100	50,000,000	100	69,000,000	100	119,000,000	Kecamatan Jatiasih
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	0	100	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	600,000,000	Kecamatan Medan Satria

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	0	100	0	100	56,000,000	100	75,000,000	100	100,000,000	100	231,000,000	Kecamatan Rawalumbu
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	0	100	25,750,000	100	25,750,000	100	27,000,000	100	28,000,000	100	29,500,000	100	136,000,000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	50,000,000	100	115,000,000	100	429,000,000	100	515,000,000	100	539,750,000	100	1,648,750,000	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	112,030,000	100	235,640,000	100	400,750,000	100	502,746,600	100	519,255,030	100	1,770,421,630	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase	100	100	10,000,000	100	17,500,000	100	17,500,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	85,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	60,000,000	100	50,000,000	100	30,000,000	100	90,000,000	100	50,000,000	100	280,000,000	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	39,450,000	100	18,950,000	100	8,000,000	100	9,800,000	100	11,760,000	100	87,960,000	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	0	100	126,000,000	100	136,000,000	100	146,000,000	100	156,000,000	100	166,000,000	100	730,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	200,000,000	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	orang	0	100	90,000,000	100	80,000,000	100	90,000,000	100	120,000,000	100	130,000,000	100	510,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	29,300,000	100	46,500,000	100	70,000,000	100	87,500,000	100	57,000,000	100	290,300,000	Dinas Kebersihan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	0	100	100,000,000	100	120,000,000	100	144,000,000	100	170,000,000	100	75,000,000	100	609,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	60,000,000	100	104,700,000	100	120,000,000	100	0	100	256,657,456	100	541,357,456	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	100,000,000	100	130,000,000	100	169,000,000	100	439,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	75,000,000	100	100,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	0	100	675,000,000	Dinas Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	600,000,000	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	10,000,000	100	5,000,000	100	150,000,000	100	200,000,000	100	250,000,000	100	615,000,000	Dinas Perekonomian Rakyat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	55,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	75,000,000	100	0	100	280,000,000	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	10	100	0	100	30,000,000	100	50,000,000	100	30,000,000	100	50,000,000	100	160,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	35,000,000	100	538,500,000	100	542,000,000	100	545,500,000	100	45,000,000	100	1,706,000,000	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	20,000,000	100	24,000,000	100	28,800,000	100	34,560,000	100	41,472,000	100	148,832,000	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	58,800,000	100	58,800,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	65,000,000	100	312,600,000	Dinas Tata Kota
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	30,000,000	100	32,000,000	100	32,000,000	100	36,800,000	100	41,600,000	100	172,400,000	Dinas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	220,000,000	100	245,000,000	100	245,000,000	100	291,500,000	100	320,650,000	100	1,322,150,000	Inspektorat Kota
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	0	100	32,080,000	100	25,000,000	100	75,000,000	100	90,000,000	100	108,000,000	100	330,080,000	Kecamatan Bantargebang
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	4	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	60,000,000	Kantor Arsip Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	0	100	7,500,000	100	7,500,000	100	7,500,000	100	7,500,000	100	7,500,000	100	37,500,000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	100	100	100,000,000	100	120,000,000	100	0	100	0	100	0	100	220,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	130,000,000	100	205,000,000	100	200,900,000	100	202,850,000	100	282,350,000	100	1,021,100,000	Inspektorat Kota

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	170,000,000	100	196,500,000	100	196,500,000	100	275,000,000	100	215,000,000	100	1,053,000,000	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	430,000,000	100	440,000,000	100	440,000,000	100	440,000,000	100	0	100	1,750,000,000	Dinas Pendapatan Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	0	100	285,000,000	100	300,400,000	100	311,400,000	100	322,400,000	100	333,400,000	100	1,552,600,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	70	100	57,000,000	100	60,000,000	100	81,600,000	100	81,600,000	100	85,000,000	100	365,200,000	Kecamatan Bekasi Utara
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	81,400,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	561,400,000	Kecamatan Bekasi Selatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	71,840,000	100	127,200,000	100	170,000,000	100	204,000,000	100	224,400,000	100	797,440,000	Kecamatan Mustikajaya
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	0	100	70,000,000	100	120,000,000	100	260,000,000	100	338,000,000	100	439,400,000	100	1,227,400,000	Kecamatan Bekasi Barat
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	Persen	100	100	53,400,000	100	115,680,500	100	118,873,500	100	125,267,175	100	0	100	413,221,175	Kecamatan Bekasi Timur
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	0	100	0	100	70,000,000	100	176,000,000	100	176,000,000	100	176,000,000	100	598,000,000	Kecamatan Medan Satria
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	45,310,000	100	87,310,000	100	91,675,500	100	96,041,000	100	86,565,000	100	406,901,500	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	240,000,000	100	350,000,000	100	450,000,000	100	500,000,000	100	0	100	1,540,000,000	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	Set	30	100	18,000,000	100	18,000,000	100	19,800,000	100	19,800,000	100	19,800,000	100	95,400,000	Kantor Arsip Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	100	2,150,000,000	100	2,325,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	100	5,225,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	75	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	0	100	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	60,280,000	100	80,834,000	100	110,000,000	100	160,000,000	100	176,000,000	100	587,114,000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	50,000,000	100	58,417,500	100	225,000,000	100	292,500,000	100	380,250,000	100	1,006,167,500	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	2,275,600,000	100	1,300,000,000	100	0	100	0	100	0	100	3,575,600,000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	123,978,000	100	150,000,000	100	250,000,000	100	312,500,000	100	900,000,000	100	1,736,478,000	Dinas Kebersihan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	Persentase	100	100	39,965,000	100	125,300,000	100	145,300,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	610,565,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	0	100	21,000,000	100	0	100	0	100	0	100	21,000,000	Kecamatan Pondokgede
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	75	100	590,000,000	100	590,000,000	100	590,000,000	100	600,000,000	100	0	100	2,370,000,000	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	54,920,000	100	60,000,000	100	128,950,000	100	148,292,500	100	167,635,000	100	559,797,500	Dinas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100	100	100	1,080,000,000	100	1,135,000,000	100	1,135,000,000	100	1,135,000,000	100	1,135,000,000	100	5,620,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	56,445,000	100	46,380,000	100	123,000,000	100	147,000,000	100	151,200,000	100	524,025,000	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	48,000,000	100	48,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	185,000,000	100	331,000,000	Kecamatan Pondok Melati
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	350,000,000	100	415,000,000	100	480,000,000	100	500,000,000	100	520,000,000	100	2,265,000,000	Dinas Perekonomian Rakyat
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	0	100	0	100	55,000,000	100	105,000,000	100	144,000,000	100	121,132,000	100	425,132,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	0	100	0	100	15,000,000	100	15,000,000	100	360,000,000	100	20,160,000	100	410,160,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	0	100	0	100	265,000,000	100	320,000,000	100	1,570,000,000	100	720,000,000	100	2,875,000,000	Kantor Pemadam Kebakaran
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	0	100	0	100	20,000,000	100	100,000,000	100	120,000,000	100	535,000,000	100	775,000,000	Kantor Pemadam Kebakaran
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	0	100	280,000,000	100	300,400,000	100	311,004,000	100	322,400,000	100	322,400,000	100	1,536,204,000	Dinas Bangunan dan Permukiman

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	'%	0	100	126,000,000	100	136,000,000	100	146,000,000	100	156,000,000	100	156,000,000	100	720,000,000	Dinas Bangunan dan Permukiman
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur		0	100	0	100	34,800,000	100	125,000,000	100	150,000,000	100	180,000,000	100	489,800,000	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0	100	0	100	30,000,000	100	35,000,000	100	42,000,000	100	50,400,000	100	157,400,000	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	178,500,000	100	178,500,000	100	210,000,000	100	250,000,000	100	420,000,000	100	1,237,000,000	Kecamatan Jatisampurna
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	0	100	44,500,000	100	89,000,000	100	97,900,000	100	67,551,000	100	298,951,000	Kecamatan Jatiasih
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	54,000,000	100	109,000,000	100	109,000,000	100	175,000,000	100	200,000,000	100	647,000,000	Kecamatan Rawalumbu
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Disiplin Aparatur	'%	100	100	40,000,000	100	48,000,000	100	57,600,000	100	69,120,000	100	82,944,000	100	297,664,000	Dinas Sosial
#####																	

Tabel 8.1
INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

MISI I : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik
TUJUAN : Pencapaian kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang prima

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Opini BPK terhadap akuntabilitas keuangan daerah	1 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah					15.905.000.000		24.752.028.800		28.410.000.000		36.250.000.000		47.910.000.000		145.877.028.800	Kuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan, KLPBI
		Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	871.275.048.121	8,94	5.300.000.000	39,69	9.350.000.000	15,01	8.500.000.000	13,63	10.200.000.000	11,58	11.450.000.000	Rp 1.933.431.500.000	44.800.000.000	Kuangan	Dinas Pendapatan Daerah
		Prosentase peningkatan dana perimbangan keuangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah	%	1.879.841.819.808	6,00		9,57		3,27		2,92		3,08		Rp 2.392.033.173.164		Kuangan	Dinas Pendapatan Daerah
		Ketepatan waktu penetapan APBD	Grade	-	B	9.205.000.000	B	13.352.028.800	A	17.965.000.000	A	23.650.000.000	A	34.060.000.000	A	98.232.028.800	Kuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	dokumen	1	1		1		1		1		1		1		Kuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Prosentase Kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap neraca Pemerintah Kota	%	80	80				100		100		100		100		Kuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat penyelesaian dokumen DPA-SKPD sesuai jadwal dan akurat	'%	100	100		100		100		100		100		100		Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Prosentase SKPD yang penyerapan dananya sesuai dengan alokasi anggaran	'%	87,7	78,97		90		95		98		100		100		Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Prosentase rata-rata sarana prasarana SKPD sesuai RKBU	%	10,76	-		-		0		74		76		76		Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Prosentase Ketepatan Penyelesaian Pelaporan Kegiatan Pembangunan	%	35 SKPD	40	450.000.000	60	350.000.000	70	500.000.000	80	600.000.000	90	600.000.000	90	600.000.000	Keuangan	Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
		Prosentase Ketersediaan Aparatur memiliki Sertifikat PBJ	%	50 Orang	40	350.000.000	50	400.000.000	60	300.000.000	70	500.000.000	75	500.000.000	75	500.000.000	Keuangan	Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
		Prosentase BUMD dalam kondisi baik	%	4 BUMD	20	100.000.000	40	200.000.000	60	45.000.000	80	100.000.000	100	100.000.000	100	545.000.000	Keuangan	Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
		Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara Elektronik	Paket	30 Paket	60	500.000.000	70	500.000.000	686	500.000.000	700	500.000.000	750	500.000.000	750	500.000.000	Keuangan	KLPBJ
		Prosentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Dilaporkan ke KLPBJ	%	0 Paket	0	-	60	600.000.000	70	600.000.000	80	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	Keuangan	KLPBJ
						5.475.000.000		6.062.000.000		4.460.522.500		6.140.000.000		6.775.000.000		28.912.522.500	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Berjalan	%	80	80		80		80		80		80		80		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat
		Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya	%	-	20		20		100		100		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat
		Prosentase tindak lanjut temua BPKRI tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya	%	N/A	0		0		50		50		50		50		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat
		Prosentase kepatuhan terhadap LHKPN dan LHKASN	%	-	0		0		100		100		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat
		Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP level berkembang	%	N/A	0		0		40		45		50		50		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat
		Persentase SKPD yang menindaklanjuti RTP	%	N/A	0		0		80		90		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat
	3 Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance Inspektorat								425.435.000		470.000.000		520.000.000		1.415.435.000		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat
		Persentase rekomendasi hasil revidu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklanjuti	%	-	0	0	0	0	80		90		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3 Persentase rekomendasi hasil reviu atas Laporan kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang ditindaklaniuti	4 %	5 -	6 0	7	8 0	9	10 70	11	12 75	13	14 80	15	16 80	17	18 Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	19 Inspektorat
	4 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnenawasan					1.200.000.000		1.400.000.000		455.000.000		1.130.000.000		1.185.000.000		5.370.000.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat
		Tersedianya Auditor yang Bersertifikat	%	57	66,67		74,51		0,00		0,00		0		0		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat
		Persentase jumlah Auditor yang mendapat sertifikat	%	-	0		0		100		100		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
		Tingkat / Level Kapabilitas APIP	Level	-	0		0		2		2		3		3		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5 Program peningkatan pelayanan perizinan					1.835.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		2.250.000.000		2.450.000.000		10.635.000.000	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
		Hasil Survey IKM pelayanan perizinan	nilai	80	81,00		82,00		82,05		82,10		82,50		82,50		Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	6 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan					6.502.450.000		7.132.450.000		7.762.450.000		7.762.450.000		7.762.450.000		36.922.250.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kecamatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	70	72		74		76		78		80		80		Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kecamatan
Pencapaian IKK dalam EKPPD	7 Program evaluasi kinerja pemerintahan daerah					600.000.000		675.000.000		750.000.000		825.000.000		900.000.000		3.750.000.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Bina Pemerintahan

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Ketersediaan Dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD, LAKIP Kota Bekasi	Dokumen		3		3		3		3		3		3		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Bina Pemerintahan
	8 Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah					2.495.000.000		2.297.142.400		2.315.279.000		3.445.000.000		3.711.636.575		14.264.057.975	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
		capaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	%	N/A	100		100		100		100		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
	9 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					13.130.782.000		5.527.500.000		5.163.050.000		3.854.200.000		3.967.500.000		31.643.032.000	Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
		Prosentase Pejabat Struktural yang sudah mengikuti Pendidikan sesuai dengan Tingkatan Eselonnya	%	100	100		100		100		100		100		100		Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase Aparatur Sudah Mengikuti Pendidikan sesuai Standar Kompetensi Teknis Fungsional	%	100	100		100		100		100		100		100		Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
	10 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					6.825.000.000		4.360.000.000		6.484.240.000		9.479.600.000		5.950.000.000		33.098.840.000	Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
		Prosentase Penerapan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Berbasis IT	%	100	100		100		100		100		100		100		Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah
		Prosentase Tertatanya Pembinaan Aparatur Serta Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur	%	100	100		100		100		100		100		100		Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	11 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan					2.600.000.000		3.025.000.000		3.550.000.000		3.625.000.000		3.900.000.000		16.700.000.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
		Penyelesaian Jumlah Kasus yang Dihadapi Pemerintah Daerah	%	-	0		0		30		30		40		40		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
		Tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah	Perda/Perkada/kepwal	1.038	1.050		1.062		1.075		1.083		1.095		1.095		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Hukum
	12 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					36.000.000.000		38.000.000.000		40.000.000.000		42.000.000.000		44.000.000.000		200.000.000.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD
		Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD	%	100	100		100		100		100		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	Sekretariat DPRD
	13 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsin Daerah							2.380.000.000		2.700.000.000		3.240.000.000		3.888.000.000		12.208.000.000	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan Arsip SKPD secara baku	%	-	0	0	17		29		41		55		55		Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
	14 Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur					960.000.000		1.095.000.000		1.140.000.000		1.185.000.000		1.185.000.000		5.565.000.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Umum
		Persentase ketersediaan prasarana dan sarana aparatur yang memadai	%	N/A	100		100		100		100		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Umum

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	15 Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran					14.400.000.000		16.560.000.000		44.044.000.000		36.900.600.000		36.900.600.000		148.805.200.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	DISBANGKIM
		Persentase ketersediaan kantor pemerintah daerah yang representatif dan dalam kondisi baik	Unit	N/A	11		22		33		44		56		56		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	DISBANGKIM
		16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					2.620.000.000		2.825.000.000		2.930.000.000		3.040.000.000		315.000.000		14.565.000.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
		Persentase pelayanan keprotokolan	%	-	100		100		100		100		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha
		Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha
		17 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah					250.000.000,00		450.000.000		3.450.000.000		4.400.000.000		3.625.000.000		12.175.000.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
	Nilai LAKIP Pemerintah Kota Bekasi		Nilai	59	0		0		62		64		66		66		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Bina Pemerintahan
	Nilai LPPD Pemerintah Kota Bekasi		Nilai	3	0		0		3,051		3,142		3,237		3,237		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Bagian Bina Pemerintahan

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	18 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					1.660.000.000		1.610.000.000		1.982.582.496		2.320.000.000		2.320.000.000		9.892.582.496	Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah Bagian Humas
		IKM Mengenai Pelayanan Prima Kehumasan SKPD Pemkot Bekasi	%	-	70		75		75		75		80		80		Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah Bagian Humas
	19 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa					2.200.000.000		207.522.240		1.965.222.400		2.200.000.000		2.400.000.000		10.840.444.800	Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah Bagian Humas
		Prosentase Jenis Informasi Publik yang dipublikasikan	%	-	100		100		100		100		100		100		Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah Bagian Humas
	20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi					3.700.000.000		4.340.000.000		6.800.000.000		11.250.000.000		14.920.000.000		41.010.000.000	Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah Bagian Telematika
		Prosentase Pencapaian Road Map E-Government	%	40	0		0		80		95		100		100		Komunikasi dan Informatika	Sekretariat Daerah Bagian Telematika
Kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen rencana pembangunan	21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah					3.354.941.000		3.860.000.000		4.797.385.000		3.800.000.000		4.800.000.000		20.612.326.000	Perencanaan	BAPPEDA
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi	%	-	0		0		0		0		100		100		Perencanaan	BAPPEDA
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota Bekasi	%	-	100		100		100		100		100		100		Perencanaan	BAPPEDA
		Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan RKP	%	74	81		95		95		95		100		100		Perencanaan	BAPPEDA

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan APBD	%	94	95		95		100		100		100		100		Perencanaan	BAPPEDA
	22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					1.675.000.000		730.000.000		1.350.000.000		950.000.000		1.300.000.000		6.005.000.000	Perencanaan	BAPPEDA, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Ekonomi Kota Bekasi	%	1 dokumen	0		0		0		0		100		100		Perencanaan	BAPPEDA, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Ekonomi Kota Bekasi	%	1 dokumen	100		100		100		100		100		100	0	Perencanaan	BAPPEDA, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Ekonomi dengan RKPD	%	1 dokumen	100		100		100		100		100		100	0	Perencanaan	BAPPEDA, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
	23 Program Perencanaan Sosial Budaya					2.400.000.000		1.850.000.000		2.105.000.000		2.350.000.000		2.550.000.000		11.255.000.000	Perencanaan	BAPPEDA
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi	%	-	0		0		0		0		100		100		Perencanaan	BAPPEDA
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Sosial Budaya Kota Bekasi	%	-	100		100		100		100		100		100		Perencanaan	BAPPEDA

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Sosial Budaya dengan RKPD	%	-	100		100		100		100		100		100		Perencanaan	BAPPEDA
	24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam					2.750.000.000		3.785.000.000		4.050.000.000		5.800.000.000		2.700.000.000		19.085.000.000	Perencanaan	BAPPEDA
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota Bekasi	%	-	0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		100,00		Perencanaan	BAPPEDA
		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota Bekasi	%	-	100		100		100		100		100		100		Perencanaan	BAPPEDA
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Prasarana Daerah dan SDA dengan RKPD	%	-	100		100		100		100		100		100		Perencanaan	BAPPEDA
		25 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah					1.123.798.400		700.000.000		0		500.000.000		500.000.000		2.823.798.400	Perencanaan
		Jumlah Aparatur Perencana Yang Memenuhi Kebutuhan, Tuntutan Kompetensi Jabatan dan Peningkatan Produktifitas	Org	57	70		75		0		100		0		0		Perencanaan	BAPPEDA

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab		
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	26 Program Pengembangan Data/ Informasi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						1.325.000.000		2.610.000.000		1.600.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		8.435.000.000			Perencanaan	BAPPEDA
		Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan terbarui	%	-	0		0		70		75		80		80				Perencanaan	BAPPEDA
		Presentase Jumlah Data Sekunder yang tersedia, tervalidasi dan terbarui	%	-	0		0		40		45		50		50				Perencanaan	BAPPEDA
Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	27 Program Penataan Administrasi Kependudukan					12.175.000.000		8.750.000.000		9.125.000.000		9.625.000.000		10.725.000.000		50.400.000.000	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
		Persentase cakupan kepemilikan KTP elektronik	%	88,64	100		100		100		100		100		100		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
		Persentase cakupan kepemilikan Kartu Keluarga	%	N/A	100		100		100		100		100		100		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
		Persentase cakupan kepemilikan akte perkawinan	%	N/A	67,01		70,38		72,79		74,16		74,57		74,57		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
		Persentase cakupan penerbitan Akta Kematian	%	N/A	25,98		31,46		38,10		46,17		55,93		55,93		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
		Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	%	N/A	79,24		82,29		85,45		88,74		92,12		92,12		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
		28 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan					575.000.000		775.000.000		1.150.000.000		800.000.000		4.575.000.000		7.875.000.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	Ketersediaan Data Kependudukan		%	20	20		40		60		80		100		100		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		

- MISI II : Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota
- TUJUAN I : Terciptanya Ruang Kota yang Tertata Dengan Baik dan Berkelanjutan yang Didukung Infrastruktur Perkotaan Modern
- TUJUAN II : Transportasi Murah, Cepat, Aman dan Nyaman

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TUJUAN I : TUJUAN I Ruang Kota yang Tertata Dengan Baik dan Berkelanjutan yang Didukung Infrastruktur Perkotaan Modern																		
Panjang jalan dalam kondisi baik	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					53.166.300.000		58.482.930.000		64.331.223.000		70.764.345.300		77.840.779.830		324.585.578.130	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air
		Rasio panjang jalan baru terhadap panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	3166,787	3169,787		3172,787		3175,78		3178,79		3181,79		3181,79		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air
		Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	12,63	12,96		13,28		13,91		14,23		14,55		14,55		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air
	2 Program Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan dan Jembatan					192.444.945.000		211.689.439.500		232.858.383.450		256.144.221.795		281.758.643.974		1.174.895.633.720	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air
		Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	91,05	92,09		93,14		94,19		95,23		96,28		96,28		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air
	3 Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan					9.971.500.000		10.968.650.000		12.065.515.000		13.272.066.500		14.599.273.150		60.877.004.650	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air
		Persentase Ketersediaan data base pembangunan	%	0	100		100		100		100		100		100		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong					62.385.400.000		68.623.940.000		75.486.334.000		83.034.967.400		91.338.464.140		380.869.105.540	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	70,55	71,09		71,64		72,19		72,73		73,28		73,28		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air
Berkurangnya luasan genangan banjir	5 Program Pengendalian Banjir					4.108.500.000		4.519.350.000		4.971.285.000		5.468.413.500		6.015.254.850		25.082.803.350	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air
		Persentase ketersediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	%		13,31		4,99		4,99		16,64		16,64		56,57		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Tata Air
Pelayanan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)	6 Program peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PIU)					38.860.000.000		35.350.000.000		39.600.000.000		80.000.000.000		120.000.000.000		313.810.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
		Persentase Capaian Target Pemasangan Titik PJU Tahun (n)	%	100	23,790		42,84		61,89		80,95		100		100		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
		Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan umum (PJU)	%	80,54	85,170		88,88		92,59		96,29		100		100		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
		Persentase Titik PJU Dalam Kondisi Baik	%		70		72		72		72		72		72		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
Rumah layak huni.	7 Program Pengembangan Perumahan					10.400.000.000		11.100.000.000		331.696.000.000		771.202.000.000		1.013.658.000.000		2.138.056.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Bangunan dan Permukiman
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	0	20		40		60		80		100		100		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Bangunan dan Permukiman
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	0	20		40		60		80		100		100		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Bangunan dan Permukiman

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kawasan Kumuh Yang Tertata	8 Program Lingkungan Sehat Perumahan					-		96.166.000.000		144.249.000.000,00		192.332.000.000,00		240.415.000.000,00		673.162.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Bangunan dan Permukiman
		Cakupan rumah yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	0	20		40		60		80		100		100		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Bangunan dan Permukiman
Rasio kapasitas TPU terhadap Jml penduduk	9 Program pengelolaan areal pemakaman					5.340.000.000		5.400.000.000		1.800.000.000		10.737.500.000		8.550.000.000		31.827.500.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU, Dinsos
		Ratio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Rasio daya tampung per 1000 penduduk	3,1	3,3	5.040.000.000	3,5	5.100.000.000	17,4	1.500.000.000	18,7	10.437.500.000	20,3	8.250.000.000	20,3	30.327.500.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
		Taman Makam Pahlawan yang di pelihara	area	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.500.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinsos
Tingkat Tanggap Waktu (Respon Time Rate) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	10 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran							1.291.074.501		1.484.735.000		3.600.000.000		3.900.000.000		10.275.809.501	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Kantor Pemadam Kebakaran
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	100	0		34		49		62		80		100		Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Kantor Pemadam Kebakaran
		Tingkat Tanggap Waktu (Respon Time Rate) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	100	0		60		69		76		75		100		Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Kantor Pemadam Kebakaran
Luasan Lahan Terbuka Hijau	11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					8.275.000.000		3.875.000.000		3.300.000.000		7.900.000.000		8.550.000.000		31.720.000.000	Lingkungan Hidup	Distako, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DP3JU
		rasio luas RTH terhadap wilayah kota	%	7,48	11	6.700.000.000	11	1.975.000.000	11	1.250.000.000	11	6.000.000.000	12	6.500.000.000	12	22.245.000.000	Lingkungan Hidup	Dinas Tata Kota / BPLH
		Terwujudnya Keindahan dan Estetika Kota	titik	0	1	1.575.000.000	1	1.900.000.000	1	2.050.000.000	1	1.900.000.000	1	2.050.000.000	5	9.475.000.000	Lingkungan Hidup	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	12 Program penunjang sarana dan prasarana pertamanan, Pemakaman dan PJU					1.321.533.750		1.503.557.125		1.690.065.500		4.500.000.000		6.000.000.000		15.015.156.375	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Petugas DPPPJU	%	3,53		20,44		20,11		19,64		20,13		19,68		100		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU
Penyimpangan pemanfaatan ruang	13 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					5.380.000.000		5.260.000.000		11.650.000.000		8.950.000.000		9.950.000.000		32.690.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Distako, Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU	
		persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	%	0	86	4.480.000.000	87	4.560.000.000	88	9.950.000.000	89	7.400.000.000	90	8.500.000.000	90	26.390.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Kota	
		terkendalinya jumlah titik reklame	%	69,81	75,68	900.000.000	81,94	700.000.000	88,09	1.700.000.000	94,29	1.550.000.000	100	1.450.000.000	100	6.300.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pertamanan, Pemakaman dan PJU	
	14 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					537.579.000.000		970.486.000.000		810.013.450.000		532.420.703.250		749.525.170.575		3.600.024.323.825	Pertanahan	Setda bagian Pertanahan	
		Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan	M2	580914	677507		739840		6266355		477439		556686		3077827			Pertanahan	Setda bagian Pertanahan
		Penanganan Kasus Negara	Kasus	8	8		8		8		8		8		8			Pertanahan	Setda bagian Pertanahan
	15 Program Perencanaan Tata Ruang					5.562.000.000		3.900.000.000		5.720.000.000		13.000.000.000		4.000.000.000		32.182.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Kota	
		Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota	lokasi/ka wasan	0	7	2.900.000.000,00	5	2.500.000.000,00	3	4.720.000.000,00	7	7.250.000.000,00	3	2.000.000.000,00	25	19.370.000.000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Kota	
		jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	lokasi	0	5	2.662.000.000,00	4	1.400.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	5.750.000.000,00	2	2.000.000.000,00	15	12.812.000.000,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Kota	

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	16 Program Pemanfaatan Ruang					81.800.000.000		81.800.000.000		81.800.000.000		81.800.000.000		81.800.000.000		409.000.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Kota
		jumlah penyerahan psu	Bidang	-	-		25		25		25		25		25		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Tata Kota
Penegakan hukum lingkungan	17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					5.142.000.000		2.350.000.000		2.800.000.000		3.200.000.000		3.500.000.000		16.992.000.000	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Cakupan Pengawasan terhadap Penggunaan Air Tanah	%	20,13	30		35		40		45		50		50		Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Persentase Penurunan Kerusakan Lahan dan /atau Tanah untuk Produksi Biomassa	%	0	20		40		60		80		100		100		Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perolehan Adipura	18 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					2.575.000.000		2.450.000.000		2.750.000.000		2.850.000.000		2.850.000.000		13.475.000.000	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Persentase Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis	%	32	40		45		50		55		60		60		Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Perolehan Adipura	Sertifikat	Sertifikat Adipura	Sertifikat Adipura		Sertifikat Adipura		Sertifikat Adipura		Adipura		Adipura		Adipura		Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Status mutu udara ambien	19 Program Peningkatan Pengendalian Polusi					2.000.000.000		1.750.000.000		2.500.000.000		2.900.000.000		3.100.000.000		12.250.000.000	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Usaha dan atau Kegiatan Sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	30	35,00		40		45		50		60		60		Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Persentase lokasi/ wilayah yang dipantau kualitas udara ambien dan diinformasikan mutu udara ambien	%	100	30,00		40		50		60		100		100		Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Status Mutu Air	20 Program peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air					900.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000		1.500.000.000		1.450.000.000		6.850.000.000	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang memenuhi Syarat Administrasi atau Teknis Pencemaran Air	%	30	35		40		45		55		60		60		Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Cakupan pelayanan air minum	21 Program penyediaan dan pengolahan air baku					1.250.000.000		1.700.000.000		900.000.000		2.000.000.000		2.850.000.000		8.700.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bangunan dan Permukiman
		Cakupan Pelayanan Air Bersih Non PDAM	%	N/A	20,00		40		60		80		100		100		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bangunan dan Permukiman
Persentase penanganan sampah	22 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					203.194.700.000		178.563.450.000		152.640.200.000		139.548.690.469		128.249.860.313		802.196.900.782	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan
		Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah Rumah Tangga	%	55,45	58		60		63		66		69		69		Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	persil	0,99	0,96		0,98		0,97		0,97		0,95		4,83		Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengolah Sampah	Kelompok	140	120		130		135		138		140		663		Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan
		Persentase Limbah Yang Terolah	%	17	18,09		19,6		20,36		20,81		21,11		21,11		Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan
		Cakupan Kunjungan/ Patroli truck atau pengangkutan sampah di TPS	ritase	164380	152205		188340		224110		259880		296015		296015		Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan
		Jumlah Teknologi Baru	unit	0	0		1		0		0		1		1		Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan
TUJUAN II : Transportasi Murah, Cepat, Aman dan Nyaman																		
Ketersediaan Prasarana sarana perhubungan	23 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					1.200.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		19.200.000.000	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Prosentase Terpenuhi nya sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	%	2	2		3		3		3		3		3		Perhubungan	Dinas Perhubungan
	24 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					1.800.000.000		1.200.000.000		500.000.000		600.000.000		550.000.000		4.650.000.000	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana pengembangan BRT di Kota Bekasi	%	10	20		25		35		40		50		50		Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Persentase pelayanan angkutan umum yang baik, aman, dan nyaman	%	27	32		40		43		45		47		47		Perhubungan	Dinas Perhubungan
	25 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					1.650.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		7.650.000.000	Perhubungan	Dinas Perhubungan

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Presentase Kendaraan bermotor yang laik jalan	%	97	98		100		100		100		100		100		Perhubungan	Dinas Perhubungan
	26 Program Optimalisasi Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi					2.250.000.000		525.000.000		650.000.000		800.000.000		400.000.000		4.625.000.000	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Persentase Tersedianya pelayanan informasi	%	26	40		56		72		82		90		90		Perhubungan	Dinas Perhubungan
Ketersediaan prasarana sarana lalu lintas	27 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAI					900.000.000		63.833.000.000		1.000.000.000		950.000.000		1.050.000.000		67.733.000.000	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Cakupan fasilitas sarana lalu lintas yang berfungsi baik	%	59	66		73		78		83		86		86		Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Penyelesaian 19 titik kemacetan di kota bekasi	%	25	41		51		59		67		74		74		Perhubungan	Dinas Perhubungan
		28 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas					4.450.000.000		2.550.000.000		2.500.000.000		2.450.000.000		2.500.000.000		14.450.000.000	Perhubungan
Persentase terpasangnya/te rbangunnya sarana lalu lintas pada ruas jalan arteri dan kolektor			%	60	67		73		79		86		92		92		Perhubungan	Dinas Perhubungan

MISI III : Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya
TUJUAN : Kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain yang berkualitas dan Aksesibel

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Indeks Pendidikan	1 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					12.025.000.000		13.107.250.000		14.286.902.500		15.572.723.700		16.974.268.800		71.966.145.000	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		SMK Terakreditasi	%	65	66		67		68		69		70		70		Pendidikan	Dinas Pendidikan
SMA/MA Terakreditasi		%	70	71		72		73		74		75		75		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
SMP/MTS Terakreditasi		%	70	71		72		73		74		75		75		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
SD/MI Terakreditasi		%	65	66		67		68		69		70		70		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
Angka Rata-rata lama sekolah.	2 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan					98.115.000.000		107.926.500.000		118.719.150.000		130.591.065.000		143.650.171.500		599.001.886.500	Pendidikan	DISBANGKIM
		Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar yang representatif	%	2752	20,1		19,975		19,975		19,975		19,975		100		Pendidikan	DISBANGKIM
Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah pertama yang representatif		%	762	19,95		20,20		19,95		19,95		19,95		100		Pendidikan	DISBANGKIM	
Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Atas yang representatif		%	202	20,4		20,4		20,4		19,4		19,4		100		Pendidikan	DISBANGKIM	
Tersedianya Prasarana Pendidikan Menengah Kejuruan yang reperesentatif		%	124	20,5		19,875		19,875		19,875		19,875		100		Pendidikan	DISBANGKIM	
Angka Rata-rata lama sekolah.		3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					41.936.200.000		45.710.458.000		49.824.399.200		54.308.595.100		59.196.368.700		250.976.021.000	Pendidikan
	Guru SD yang sertifikasi		%	43,5	45		46,50		48		49,50		51		51		Pendidikan	Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Angka Rata-rata lama sekolah.		Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI terhadap bidang studi yang diajarkan	%	47	49		51		53		55		57		57		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Guru SMP/MTs yang sertifikasi	%	55,5	57		58,50		60		61,50		63		63		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMP/MTs terhadap bidang studi yang diajarkan	%	72	74		76		78		80		82		82		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi	%	47,5	49		50,50		53		54,50		56		56		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/SMK/MA terhadap bidang studi yang diajarkan	%	76	78		80		82		84		86		86		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
	4 Program Pendidikan Non Formal					2.850.000.000		3.106.500.000		3.386.085.000		3.690.832.650		4.023.007.600		17.056.425.250	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Kualifikasi Tutor Paket A, B, C	%	65	70		75		80		85		90		90		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	%	58	60		62		65		67		70		70		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
	APM Pendidikan anak usia dini (PAUD)	5 Program Pendidikan Anak Usia Dini					6.110.000.000		6.659.900.000		7.259.291.000		7.912.627.200		8.624.763.600		36.566.581.800	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Daya Tampung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini	%	40	42		44		46		48		50		50		Pendidikan	Dinas Pendidikan
Guru PAUD Menenuhi Kompetensi Dasar			%	21	22		23		24		25		26		26		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
Rasio Guru : Siswa PAUD			Rasio	11	10		9		8		7		6		6		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat.	6 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar					19.240.000.000		20.971.600.000		22.859.044.000		24.916.358.000		27.158.830.200		115.145.832.200	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		APK SD/MI	%	112,94	113,44		114,12		114,65		115,22		115,74		115,74		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,13	0,12		0,11		0,10		0,09		0,08		0,08		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B.																			

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA /Paket C.		Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	%	93	93,50		93,66		93,89		94,24		94,88		94,88		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat Pendidikan SD	%	47	50		53		55		58		60		60		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Rasio siswa SD : ruang kelas (SPM 1:32) Negeri+Swasta	Rasio	47	46		45		44		43		42		42		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SD	Rasio	65	54		56		58		60		62		62		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		APK SMP/MTs	%	92,73	93,23		93,94		94,48		95,32		96,00		96,00		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,14	0,13		0,12		0,11		0,10		0,09		0,09		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan	%	90	91,45		92,18		93		93,90		94,50		94,50		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung tingkat Pendidikan SMP	%	52	54		56		58		60		62		62		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Rasio siswa SMP : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta	Rasio	45	44		43		42		41		40		40		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP	Rasio	1,8	1,70		1,60		1,50		1,40		1,30		1,30		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Rerata UN SD/MI	%	7,7	7,80		7,90		8,00		8,10		8,20		8,20		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Rerata UN SMP/MTs	%	6,65	6,80		6,95		7,10		7,25		7,40		7,40		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Prestasi yang diraih di tingkat provinsi dan atau nasional	Gelar/ Juara	N/A	10		10		10		10		10		10		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
	7 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah						16.835.000.000		18.350.150.000		20.001.663.500		21.801.813.200		23.763.976.400		100.752.603.100	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		APK SMA/MA/SMK	%	72,95	73,75		74,18		75,89		76,20		77,70		77,70		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	%	0,48	0,46		0,44		0,43		0,42		0,40		0,40		Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Lulusan SMA/SMK/MA melanjutkan ke PT/Akademi	%	0	0		55		60		65		70		70		Pendidikan	Dinas Pendidikan	

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di SMA	%	55	56		57		58		59		60		60		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rasio siswa SMA : ruang kelas (SPM 1:36) Negeri+Swasta	Rasio	39	39		39		39		38		38		38		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMA	Rasio	2	2		2		2		2		1		1		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di SMK	%	60	62		64		66		68		70		70		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rasio siswa SMK : ruang kelas (SPM 1:32) Negeri+Swasta	Rasio	37	37		36		36		35		35		35		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMK	Rasio	2	2		2		2		2		1		1		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rerata UN SMA	Nilai	7,9	8,00		8,10		8,20		8,30		8,40		8,40		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Rerata UN SMK	Nilai	7,8	7,90		8,00		8,10		8,20		8,30		8,30		Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Prestasi yang diraih di tingkat propinsi dan atau nasional	Gelar/ Juara	N/A	10		10		10		10		10		10		Pendidikan	Dinas Pendidikan
Persentase Peningkatan pengunjung perpustakaan daerah per tahun	8 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan						3.321.556.000		3.100.000.000		3.720.000.000		4.464.000.000			Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Prosentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	2569 Org	30		30		30		30		30		19000 Org		Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Prosentase Perpustakaan Yang Terbina	%	618 Perpustakaa n	20		20		20		20		20		20		Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Indeks Kesehatan Angka harapan hidup	9 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					200.000.000		145.000.000		1.989.818.000		1.248.400.000		680.400.000		4.263.618.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	6,5	19		22		25,80		29		32,26		32,26		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase klinik yang berizin	%	N/A	14		37		47		57		67		67		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Sakit yang berizin	%	37	37		38		39		39		40		40		Kesehatan	Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi (pembinaan, pengawasan dan pengendalian)	%	N/A	1		6		11		16		21		21		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia					50.000.000		50.000.000		127.500.000		79.500.000		80.000.000		387.000.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan Usia Lanjut	%	N/A	70,00		73,00		75		78,00		80,00		80,00		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan laringannva					9.400.000.000		10.810.000.000		12.431.500.000		14.296.225.000		14.296.225.000		61.233.950.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan/ DISBANGKIM
		Tersedianya Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obsterti Neonatal Emergensi Dasar (Poned)	Poned	5	6		7		8		9		10		10		Kesehatan	Dinas Kesehatan/ DISBANGKIM
		Tersedianya Puskesmas Pembantu (Pustu) Menjadi Puskesmas	Puskesmas	31	31		31		33		33		34		34		Kesehatan	Dinas Kesehatan/ DISBANGKIM
	12 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata					22.105.000.000		40.605.039.593		16.271.576.800		49.746.588.938		15.223.294.223		143.951.499.554	Kesehatan	RSUD/ DISBANGKIM

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Prosentase Terpenuhi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik (berdasarkan Rencana Strategis Bisnis RSUD tahun 2013-2018)	%	86,11	88,88		91,66		94,44		97,22		97,22		97,22		Kesehatan	RSUD/ DISBANGKIM
		Tersediannya RSUD Kelas D	RSUD	0	0		0		0		0		2		2		Kesehatan	Dinas Kesehatan/Disbangkim
	13 Program Pemeliharaan, sarana dan prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata									10.000.000.000		15.000.000.000		20.000.000.000		45.000.000.000	Kesehatan	RSUD
		persentase terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit	%						100		100		100		100		Kesehatan	RSUD
	13 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan					133.496.263.477		151.607.425.895		140.823.640.000		#####		185.546.750.000		772.819.079.372	Kesehatan	RSUD/Puskesmas
		Ketersediaan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan RSUD kelas B	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	RSUD
		Kematian pasien ≤ 24 jam di IGD	permil		4		3		2		1		1		1		Kesehatan	RSUD
		Kematian pasien > 48 jam di Ruang Rawat Inap	permil		19		18		17		16		15		15		Kesehatan	RSUD
		Kejadian Infeksi Nosokamial	%		1,5		1,4		1,3		1,2		1,0		1,0		Kesehatan	RSUD
		Terakreditasinya RS (Tingkat Dasar = 1, Tingkat Madya = 2, Tingkat Utama = 3, Tingkat Paripurna = 4)			0		0		0		1		1		1		Kesehatan	RSUD
Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan RSUD Kota Bekasi	Indeks		72		74		76		78		80		80		Kesehatan	RSUD		

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Capaian kinerja keuangan +kinerja operasional + kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat	%		81,5		82		82,5		83		83,5		83,5		Kesehatan	RSUD
		Prosentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas	Indeks						76		77		78		78			Puskesmas
	14 Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit menular					1.270.000.000		1.374.000.000		791.186.000		1.969.695.000		2.813.317.000		8.218.198.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia Balita	%	28,42	45		50		55		60		65		65		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita penyakit (pasien baru) TB BTA Positif	%	58,03	62		65		67		70		70		70		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare	%	57,67	65		70		75		80		85		85		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan kasus AIDS yang ditangani (CST)	%	95	82		82		85		90		95		95		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Mikro Filaria Rate (Filariasis)	%	0,9	0,90		0,90		0,90		0,90		0,90		0,90		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penderita kusta yang selesai berobat/RFT	%	90	85		85		90		90		90		90		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Penemuandan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP)	per 100.000 penduduk usia kurang dari 15 tahun	1,3	2		2		2		2		2		2		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					16.600.038.270		4.254.364.000		7.340.000.000		3.387.150.000		12.062.500.000		43.644.052.270	Kesehatan
	Persentase																	

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Angka kematian ibu melahirkan Angka kematian bayi	16 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masvarakat	ketersediaan obat sesuai kebutuhan puskesmas	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	Dinas Kesehatan
						193.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		993.000.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	%	N/A	70		75		80	0	85	0	85	0	85		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	68,14	69		70		70		70		70		70		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	17 Program Pengawasan Obat dan Makanan					150.000.000		150.000.000		191.019.000		250.000.000		250.000.000		991.019.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Presentase Apotek, Toko Obat, Produk Obat-obatan, IRTP, Produk Pangan dan Jajanan yang Sesuai Standar Kesehatan	%	N/A	15		20		25		25		30		30		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	18 Program Pengembangan Lingkungan Sehat					500.000.000		450.000.000		342.500.000		1.265.000.000		1.365.000.000		3.922.500.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Presentase institusi yang memenuhi standar kesehatan	%	N/A	90		90		90		90		90		90		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan sekolah sehat	%	70	70		70		70		75		75		75		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	19 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak					154.950.000		1.450.000.000		710.354.000		1.046.780.000		1.060.000.000		4.422.084.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	87,16	90		91		92		93		95		95		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan kunjungan bayi	%	45,26	70		75		80		85		90		90		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani	%	45,1	60		65		70		75		80		80		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	%	97,13	97,20		97,50		97,80		98		98		98		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	%	53,23	70		75		80		85		90		90		Kesehatan	Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atauTenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	87,42	89		90		90		90		90		90		Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prevalensi Balita Gizi Buruk	20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat					150.000.000		550.000.000		195.000.000		320.407.000		1.009.229.500		2.224.636.500	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,28	0,26		0,20		0,20		0,20		0,15		0,15		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi balita Gizi Kurang	%	N/A	5		5		5		5		5		5		Kesehatan	Dinas Kesehatan
Prevalensi Balita Gizi Buruk	21 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita					297.665.000,00		223.005.000,00		233.635.000,00		251.955.000,00		272.250.000,00		1.278.510.000,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	20,08	60		70		75		80		90		90		Kesehatan	Dinas Kesehatan
Kepemilikan Kartu Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat					18.961.777.400		20.609.722.100		22.177.217.100		24.515.895.600		26.805.606.900		113.070.219.100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang harus diberikan oleh sarana kesehatan di Kab/Kota	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	23 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin					34.800.000.000		34.800.000.000		34.800.000.000		34.800.000.000		34.800.000.000		174.000.000.000	Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUD

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100		100		100		100		100		100		Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUD
Kota Layak Anak (5 cluster/bid)	24 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak					4.740.000.000		5.214.000.000		5.735.400.000		6.308.940.000		6.939.834.000		28.938.174.000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100		100		100		100		100		100		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Menurunnya Rasio KDRT	Rasio	430 : 1	437 : 1		450 : 1		460 : 1		465 : 1		470:1		470:1		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	25 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan					1.833.000.000		2.016.300.000		2.217.930.000		2.439.723.500		2.683.695.300		11.190.648.800	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Prosentase Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	29,29	29,78		30		30,25		30,55		30,75		30,75		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	30,75	31,75		32,75		33,75		34,55		35,00		35,00		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Prosentase perempuan di DPRD Kota	%	16	18		18		18		18		18		18		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Prosentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	37,94	38,14		38,34		38,54		38,74		38,94		38,94		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS)	26 Program Keluarga Berencana					800.000.000		880.000.000		968.000.000		1.064.800.000		1.171.280.000		4.884.080.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan Penyediaan Alat/Obat Kontrasepsi dalam memenuhi permintaan masyarakat	%	N/A	30		30		30		30		30		30		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Istrinya dibawah usia 20 Tahun	%	N/A	2,39		2,15		1,90		1,85		1,40		1,40		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	N/A	9,85		8,25		8,00		7,45		6,65		6,65		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Total Fertility Rate (TFR)	%	2,01	3,33		3,18		3,03		2,88		2,73		2,73		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan Anggota Bina Balita (BKB) Ber KB	%	N/A	70		70		70		70		70		70		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB	%	N/A	70		75		80		85		87		87		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Presentase Keluarga Remaja Yang Mengikuti POKTAN	%		20,45		22,53		24,53		26,53		28,53		28,53		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Presentase Keluarga Balita Yang Mengikuti POKTAN	%		17,17		19,17		21,17		23,17		25,17		25,17		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Presentase Keluarga Lansia Yang Mengikuti POKTAN	%		28,45		30,45		32,45		34,45		36,45		36,45		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Presentase Laki-laki dengan Ber KB	%		3,66		3,76		3,86		3,96		4,06		4,06		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Prosentase Peserta KB Baru	%		63,35		64,47		72,53		75,58		78,64		78,64		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Prosentase Kegagalan Penggunaan Alat Kontrasepsi	%		0,4		0,3		0,2		0,1		0		0		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
		Peningkatan Rata-rata Usia Perkawinan Pertama	Tahun		20 Tahun		20 Tahun		20 Tahun		21 Tahun		21 Tahun		>21 Tahun		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	27 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnva					1.600.000.000		1.900.000.000		2.200.000.000		2.500.000.000		2.800.000.000		11.000.000.000	Sosial	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau Kelompok sosial ekonomi lainnya	%	25	30		34		38		42		47		47		Sosial	Dinas Sosial
	28 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					6.900.000.000		6.455.000.000		6.510.000.000		6.565.000.000		6.620.000.000		33.050.000.000	Sosial	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah	%	30	35		36		37		38		39		39		Sosial	Dinas Sosial
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	29 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					3.100.000.000		3.125.000.000		3.150.000.000		3.175.000.000		3.210.000.000		15.760.000.000	Sosial	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	%	31	32		34		36		38		40		40		Sosial	Dinas Sosial

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif	30 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					3.000.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000		4.700.000.000		5.200.000.000		20.400.000.000	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Cakupan cagar budaya, Situs dan Monumen di Kota Bekasi yang dilestarikan	%	47,06	50		60		70		80		100		100		Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Event	7	7		8		9		10		11		11		Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Daerah	31 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					6.750.000.000		7.300.000.000		7.850.000.000		8.600.000.000		9.300.000.000		39.800.000.000	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase kawasan wisata milik Pemerintah Kota Bekasi yang tertata	%	0	10		60		80		90		100		100		Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Usaha / Jasa Kepariwisataan yang Berizin	%	20	20		25		30		35		40		40		Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Pemuda pelopor tingkat nasional	32 Program peningkatan peran serta kepemudaan					5.600.000.000		5.600.000.000		5.600.000.000		5.600.000.000		9.200.000.000		31.600.000.000	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase pemuda putus sekolah yang dibina	%	24	24		30		50		60		70		70		Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	0	0		0		0		100		0		0		Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Prestasi yang dicapai pemuda Tk. Kota, Tk. Provinsi dan Tk.Nasional	Gelar Juara	5TK, 2TP ,0TN	5 TK, 0 TP, 0 TN		5 TK, 0 TP, 0 TN		5 TK, 0 TP, 0 TN		5 TK, 1 TP, 0 TN		5 TK, 1TP ,1TN		5 TK, 2TP ,1TN		Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Cabang Olahraga Berprestasi	33 Program Pembinaan dan Pemasarakataan Olahraga					5.900.000.000		6.100.000.000		7.200.000.000		7.450.000.000		8.250.000.000		34.900.000.000	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi dan unggulan	%	50	50		55		60		65		70		75		Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase atlet berprestasi Tk.Provinsi dan Nasional	%	50	50		55		60		65		70		75		Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	34 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga					10.070.000.000		10.570.000.000		11.070.000.000		11.570.000.000		12.500.000.000		55.780.000.000	Kepemudaan dan Olahraga	DISBANGKIM, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Terbangunnya Stadion Mini untuk kecamatan	unit	0	0		2		2		2		2		8		Kepemudaan dan Olahraga	DISBANGKIM, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Persentase Ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang representatif (sesuai standar) di tingkat Kota Bekasi	%	20	60		70		80		90		100		100		Kepemudaan dan Olahraga	DISBANGKIM, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Rasio ketersediaan sarana olahraga terhadap jumlah penduduk	1 : 10.000 Penduduk	210	238		250		262		274		286		298		Kepemudaan dan Olahraga	DISBANGKIM, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

MISI IV : Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif

TUJUAN : Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi	1 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi					3.450.000.000,00		3.550.000.000,00		3.650.000.000,00		3.750.000.000,00		3.850.000.000,00		18.250.000.000,00	Penanaman Modal	Sekretariat Daerah Bagian Kerjasama Dan Investasi
		Peningkatan nilai investasi	%	Rp 3.434.577.781.924	10		10		10		10		10		Rp7.190.848.422.636,35		Penanaman Modal	Sekretariat Daerah Bagian Kerjasama Dan Investasi
PDRB Perkapita	2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.950.000.000		2.000.000.000		9.500.000.000	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Meningkatnya jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	274	10		10		10		10		10		324		Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Laju Peningkatan investasi	3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					1.950.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.600.000.000		8.350.000.000	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Peningkatan Rekomendasi Peijinan yang dikeluarkan	%	2982	5		5		5		5		5		3.806		Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih	4 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor					100.000.000		600.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.200.000.000	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Peningkatan Nilai Ekspor	%	US \$ 829,955,835.97	10		10		10		10		10		US \$ 1,336,652,173.39		Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Laju Inflasi	5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					4.450.000.000		3.450.000.000		3.450.000.000		2.950.000.000		2.750.000.000		17.050.000.000	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Pengawasan Barang yang Beredar di Masyarakat	jenis	52	52	4.350.000.000	52	3.350.000.000	52	3.350.000.000	52	2.850.000.000	52	2.650.000.000	260	16.550.000.000	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Meningkatnya alat UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	10.000	10.000		10.000		150.000		150.000		150.000		470.000		Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Penyelesaian sengketa konsumen	Sengketa	0	0		41		50		60		70		221		Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Terkendalinya Inflasi Kota Bekasi	Laporan	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	500.000.000,00	Perdagangan	Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
	6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					550.000.000		650.000.000		685.000.000		740.000.000		820.000.000		3.445.000.000	Pertanian	Dinas Perekonomian Rakyat
		Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	%	15	11		8		5		3		0		0		Pertanian	Dinas Perekonomian Rakyat
		Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak	%	100	100		100		100		100		100		100		Pertanian	Dinas Perekonomian Rakyat
	7 Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan					5.990.000.000		4.735.200.000		4.190.000.000		4.460.000.000		4.780.000.000		24.155.200.000	Pertanian	
		Produksi pertanian	Ton	59,5	60		61		62		63		64		64		Pertanian	Dinas Perekonomian Rakyat
		Produksi peternakan	Ton	11.846	12.438		13.060		13.713		14.398		15.118		15.118		Pertanian	Dinas Perekonomian Rakyat
		Produksi perikanan	Ton	1.375	1.512		1.663		1.779		1.904		2.094		2.094		Pertanian	Dinas Perekonomian Rakyat
		Ketersediaan Pangan Utama	%	78,99	80		85		90		95		100		100		Pertanian	Dinas Perekonomian Rakyat
		Pusat Promosi Ikan Hias, Rumah Potong Hewan & BPTHH yang representatif	Unit	3	3		3		3		3		3		3		Pertanian	Dinas Perekonomian Rakyat
		Meningkatnya produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Ton	11846	12.438		13.060		13.713		14.398		15.118		15.118		Pertanian	Dinas Perekonomian Rakyat
Koperasi aktif	8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					4.050.000.000		2.050.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000		11.650.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pertumbuhan Koperasi	%	845 koperasi	10		10		10		10		10		1361 koperasi		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Peningkatan Koperasi Aktif	%	448 koperasi aktif (53 % dari seluruh koperasi)	5		5		5		5		5		572 koperasi		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
UMKM Produktif	9 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					4.100.000.000		4.100.000.000		4.200.000.000		4.700.000.000		4.700.000.000		21.800.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Peningkatan jumlah UMKM	Unit	1134	1445		1445		1500		1625		1725		1725		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	10 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					2.350.000.000		2.600.000.000		2.750.000.000		2.900.000.000		3.050.000.000		13.650.000.000	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Pertumbuhan Industri Kecil	%	2418 industri kecil	1		1		1		1		1		2541 Industri Kecil		Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Pertumbuhan Industri Menengah	%	470 industri menengah	1		1		1		1		1		494 Industri Menengah		Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	11 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif					600.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		700.000.000		2.800.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Penyediaan regulasi yang mendukung UMKM	Perda	1	0		1		0		0		0		1 Perda		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	12 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.200.000.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Meningkatnya produk yang bersertifikasi	%	425 pelaku usaha	20		20		20		20		20		1.058		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	13 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan					800.000.000		470.000.000		800.000.000		910.000.000		980.000.000		3.960.000.000	Perdagangan	Dinas Perekonomian Rakyat
		Peningkatan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Tertata	PKL	1375	1.575		1.750		1.900		2.050		2.200		2.200			Perdagangan
Pasar Tradional Modern dan UMKM Center	14 Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan pasar					4.190.000.000		4.760.000.000		5.327.000.000		5.920.000.000		66.475.000.000		86.672.000.000	Perdagangan	Dinas Perekonomian Rakyat
		Pasar Tradisional Modern	Pasar	0	0		0		0		0		1		1		Perdagangan	Dinas Perekonomian Rakyat
		Pasar tradisional yang representatif	Pasar	6	8		9		10		11		12		12		Perdagangan	Dinas Perekonomian Rakyat
		Pasar swasta/lingkungan yang terbina	Pasar	40	40		40		40		40		40		40		Perdagangan	Dinas Perekonomian Rakyat
		Peningkatan retribusi pasar	%	Rp 9.258.777.300	5		5		5		5		5		Rp 11.816.806.759		Perdagangan	Dinas Perekonomian Rakyat
	15 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial											10.000.000.000				10.000.000.000	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
		Tersedianya UMKM Center	unit	0	0	-	0	-	0	-	1		0	-	1		Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Indeks Gini	16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja					2.275.000.000		2.325.000.000		2.375.000.000		2.550.000.000		2.850.000.000		12.375.000.000	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Meningkatnya tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	N/A	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		50.000		Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Angka Pengangguran Terbuka	17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					2.300.000.000		2.150.000.000		2.414.590.000		2.656.049.000		3.054.456.350		12.575.095.350	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Prosentase Pengusaha yang melaksanakan UMK yang telah ditetapkan	%	80	80		90		95		95		100		100		Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungj awab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Menurunnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja	%	102 Sengketa	90		85		80		100		100		100		Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja	%	25	25		30		40		45		47		47		Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	18 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					2.554.000.000		2.086.600.000		2.450.000.000		2.695.000.000		3.099.250.000		12.884.850.000	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian	Orang	N/A	4.090		4.090		4.090		600		750		20.450		Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja

MISI V : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai
TUJUAN : MeningkatkanPeran serta Masyarakat dalam pembangunan dan terpeliharanya keamanan,ketertiban

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan					11.517.061.000		12.674.974.000		14.318.307.025		16.297.239.953		18.423.012.821		73.230.594.799	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat/ Kecamatan
		LPM Berprestasi	LPM		0	6.792.087.500	0	7.000.000.500	6	7.792.087.500	6	8.792.087.500	6	9.792.087.500	6	40.168.350.500	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
		Posdaya Berprestasi	Posdaya	16	0		0		6		6		6		6		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
		PKK Aktif	%		100		100		100		100		100		100		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan
		Jumlah UEP/KUBE	KUBE	30	30		10		52		57		67		77		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
		Jumlah Inovasi TTG	Produk	N/A	2		2		2		2		10		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Kantor Pemberdayaan Masyarakat	
		Posyandu Mandiri	%	N/A	6		7		8		9		10		10		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan
		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	30	35		35		40		40		45		45		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat/ Kecamatan
		Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan	%	60	75	4.724.973.500	85	5.674.973.500	90	6.526.219.525	90	7.505.152.453	90	8.630.925.321	90	33.062.244.299	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan
		Tersedianya monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui	%	50	100		100		100		100		100		100		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggunjab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kasus perselisihan sara dan kelompok masyarakat.	2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					1.290.000.000		2.033.000.000		3.130.000.000		3.685.000.000		3.400.000.000		13.538.000.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	KESBANGPOL
		Persentase Penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	%	0	100		100		100		100		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	KESBANGPOL
	3 Program Pendidikan Politik Masyarakat					550.000.000		400.000.000		1.030.000.000		1.600.000.000		1.650.000.000		5.230.000.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	KESBANGPOL
		Persentase cakupan pembinaan politik daerah	Kegiatan	0	0		2		3		4		5		5		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	KESBANGPOL
	4 Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan											3.941.320.000		5.550.000.000		9.491.320.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial
		Ketersediaan Regulasi yang mengatur Kehidupan Sosial dan Keagamaan	Produk Hukum	0							5		5		5		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial
		Persentase Penyelenggaran Hari-Hari Besar Agama dan Hari Besar Nasional	%								100		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial
	5 Program pengembangan kehidupan demokrasi dalam pemilu					700.000.000		0		0		800.000.000		900.000.000		2.400.000.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	KESBANGPOL

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase cakupan Sosialisasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu di Kota Bekasi	%	0	100		0		0		0		100		100		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	KESBANGPOL
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam PILKADA/PILGUB/PILPRES/PEMILU dengan tertib aman dan lancar															Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	KESBANGPOL
Wilayah Tertib K3	5 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba									950.000.000		950.000.000		1.000.000.000		2.900.000.000	Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	KESBANGPOL
		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba	%	0	0		4		4		4		10		10		Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	KESBANGPOL
	6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal					2.650.000.000		2.975.000.000		3.000.000.000		3.300.000.000		3.400.000.000		14.533.000.000	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	KESBANGPOL / Satpol PP
		Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas	%	0	10	1.850.000.000	10	2.175.000.000	15	2.200.000.000	15	2.300.000.000	15	2.400.000.000	15	10.925.000.000	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	KESBANGPOL / Satpol PP
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3	%	8	9		10		11		12		13		13		Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Satpol PP

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Pos Siskampling yang berfungsi	%	100	75	800.000.000	75	800.000.000	75	800.000.000	80	1.000.000.000	80	1.000.000.000	80	3.608.000.000	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Satpol PP
		Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas	%	2	3		4		5		6		7		7		Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Satpol PP
	7 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					500.000.000		1.250.000.000		1.000.000.000		1.250.000.000		1.900.000.000		5.900.000.000	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Kecamatan
		Persentase Wilayah Tertib K3	%	100	100	0	100	0	100		100		100	0	100		Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Kecamatan
Penanganan bencana alam	8 Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		3.500.000.000	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Dinas Sosial
		Presentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	100	100		100		100		100		100		100		Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah / Dinas Sosial

Indikator Kinerja	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Presentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100		100		100		100		100		100		Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Menurunnya jumlah kasus KDRT.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan jender dalam Pembangunan		Boks	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB	Program pindah ke misi III
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Fasilitasi peningkatan kerja sama antara lembaga dan jaringan kelembagaan penanganan korban kekerasan dan perlindungan anak.	MOU	1	3	1,225,000,000	4	1,300,000,000	5	1,350,000,000	6	1,450,000,000	7	1,500,000,000	25	6,825,000,000	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB	Program sudah tidak sesuai
		Pemetaan Potensi Organisasi Masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Organisasi	0	0		12		12		12		12		48		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB	Indikator sudah tidak dipergunakan
		KIE Kesetaraan dan Keadilan Gender serta KDRT	Bilboard,Binner,Rim	4	4		4		4		4		4		20		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Revitalisasi Dan Rakor Pokja PUG	Orang	0	70		70		70				70		350		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Seminar Dalam Rangka Hari Ibu	Orang	0	200		200		200		200		200		1000		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Pemetaan permasalahan anak berdasarkan kasus di Kota Bekasi	Kelurahan/Kecamatan	12	24		36		42		50		68		220		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Pilot Proyek Kota Layak Anak	Rumah pintar	1	3		3		3		3		3		15		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Fasilitasi peningkatan Pokja Kota layak Anak dalam pengadaan Plang KLA	Unit	5	8		10		12		15		17		62		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan KB	Indikator sudah tidak dipergunakan

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaa n sosial melalui KUBE atau Kelompok sosial ekonomi lainnya	%	6	7	1,100,000,000	10	1,400,000,000	12	1,700,000,000	14	2,000,000,000	16	2,300,000,000	16	8,500,000,000	Sosial	Dinas Sosial	Program dan indikator masih sesuai
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang ditangani	%	30	35	6,400,000,000	36	6,455,000,000	37	6,510,000,000	38	6,565,000,000	39	6,620,000,000	39	32,550,000,000	Sosial	Dinas Sosial	Program dan indikator masih sesuai
		Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	30	31		32		33		34		35		35		Sosial	Dinas Sosial	Indikator sudah tidak dipergunakan
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo,panti rehabilitasi,ru mah singgah	lembag a	68	70	3,100,000,000	72	3,125,000,000	74	3,150,000,000	76	3,175,000,000	78	3,210,000,000	78	15,760,000,000	Sosial	Dinas Sosial	Program masih sesuai, indikator sudah tidak dipergunakan
		Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	31	32		34		36		38		40		40		Sosial	Dinas Sosial	Indikator sudah tidak dipergunakan
		jumlah WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	21	22		23		24		25		26		26		Sosial	Dinas Sosial	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Jumlah Penyandang Cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang menerima jaminan Sosial	%	36	38		40		42		44		46		46		Sosial	Dinas Sosial	Indikator sudah tidak dipergunakan
Penanganan korban bencana alam.	Program penanggulangan bencana alam	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan selama tanggap darurat	%	100	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	5,000,000,000	Sosial	Dinas Sosial	program tidak sesuai, indikator program masih dipergunakan

		Jumlah korban bencana yg dievakuasi dgn menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat	'%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Sosial	Dinas Sosial	Indikator sudah tidak sesuai	
Kasus perselisihan umat beragama.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Layanan Evakuasi Korban Bencana Alam	Persentase	0	85	500,000,000	85	1,250,000,000	90	1,000,000,000	90	1,250,000,000	95	1,900,000,000	95	5,900,000,000	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	Program sesuai, indikator program tidak digunakan
Menurunnya jumlah gangguan kantrantibbm as.		Jumlah Sarana dan Prasarana Evakuasi Korban Bencana	Buah	0	0	2	0	0	0	8	10	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	indikator program tidak dipergunakan					
Menurunnya jumlah pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Deteksi Dini dan Pemantauan	Pemantauan	0	110	1,850,000,000	110	2,175,000,000	115	2,200,000,000	115	2,300,000,000	120	2,400,000,000	120	10,925,000,000	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	Program masih sesuai, indikator program disesuaikan
		Rasio Jumlah Linmas per 10000 penduduk	/10.000 penduduk	8	9	800,000,000	10	800,000,000	11	8,000,000	12	1,000,000,000	13	1,000,000,000	13	3,608,000,000	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP	Indikator sudah tidak sesuai
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K-3	'%	100	75	75	75	80	80	80	80	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP	Indikator sudah tidak sesuai					
		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10000 penduduk	/10.000 penduduk	2	3	4	5	6	7	7	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP	Indikator sudah tidak sesuai						
		Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	/10.000 penduduk	2	3	4	5	6	7	7	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP	Indikator sudah tidak sesuai						

		Terselenggara nya PILKADA/PIL GUB/PILPRES /PEMILU dengan tertib aman dan lancar	%	100	100		100		100		100		100		100		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Satpol PP	Indikator pindah ke program pengembangan kehidupan demokrasi dalam pemilu
Kasus perselisihan sara dan kelompok masyarakat.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Menurunnya Kasus Perselisihan SARA dan Kelompok Sosial Masyarakat	Kasus	0	5	1,400,000,000	4	1,450,000,000	3	1,470,000,000	3	1,500,000,000	2	1,510,000,000	2	7,330,000,000	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	Program dan indikator masih sesuai
menurunnya jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan.																			
	Program pengelolaan areal pemakaman	Taman Makam Pahlawan yang di pelihara	area														Sosial	Dinas Sosial	
				1	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	1,500,000,000			Program pindah misi 3
Menurunnya jumlah gangguan kantrantibbm as.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, serta Walikota	Persentase	0	65	1,400,000,000	0	1,800,000,000	0	1,950,000,000	65	2,350,000,000	65	2,450,000,000	65	9,950,000,000	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	Program masih sesuai, indikator program diganti
Kasus perselisihan umat beragama	Program peningkatan pembinaan Keagamaan	Konflik keagamaan	Konflik	0	0	7,600,000,000	0	7,600,000,000	0	7,600,000,000	0	7,900,000,000	0	7,900,000,000	0	38,600,000,000	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial	Program dan indikator sudah tidak digunakan
Menurunnya jumlah kasus Penyalahguna an Narkoba.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan,Pemb erantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).	Bebas Penyalahguna an Narkoba Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	%	100	100	4,180,000,000	100	4,695,000,000	100	5,195,000,000	100	4,950,000,000	100	5,375,000,000	500	24,395,000,000	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Pelaksana Harian BNK	Program dan indikator sudah tidak digunakan
		Bebas Penyalahguna an Narkoba dikalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Bekasi	%	0	100		100		100		100		100		500		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Pelaksana Harian BNK	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Bebas Penyalahguna an Narkoba di Kalangan Masyarakat Beresiko Tinggi	%	0	50		60		60		65		70		305		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Pelaksana Harian BNK	Indikator sudah tidak dipergunakan

		Jumlah Aktivitas masyarakat dalam Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).	Kegiatan	20	25		27		30		33		35		150		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Pelaksana Harian BNK	Indikator sudah tidak dipergunakan
Menurunnya jumlah gangguan kantrantibbm as.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	%	50	60	6,792,087,500	70	7,000,000,500	80	7,792,087,500	90	8,792,087,500	100	9,792,087,500	100	40,168,350,500	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Program masih digunakan, indikator program diubah
Menurunnya jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan.		Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	%	50	60		70		80		90		100		100		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Jumlah Masyarakat Berpartisipasi dalam Gotong Royong	Orang	280	280		280		280		280		280		1400		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Jumlah Inovasi TTG	Unit	10	10		10		10		10		10		50		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	indikator program masih sesuai
		Jumlah LPM Berprestasi	LPM	3	3		3		3		3		3		15		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	indikator program masih sesuai
		Jumlah UEP/KUBE	Kelompok	11	8		8		8		8		8		40		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	indikator program masih sesuai
		Cakupan Posdaya Binaan	Posdaya	392	392		392		392		392		392		392		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	indikator program masih sesuai
		Jumlah Masyarakat Berpartisipasi dalam TMMD	Orang	80	100		100		100		100		100		500		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Jumlah Binaan KPM	Kelompok	56	56		56		56		56		56		56		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Data Profil Kelurahan Akurat	Kelurahan	22	8		8		8		5		5		34		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu	1506	1525		1527		1530		1535		1540		1540		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Jumlah Posyandu Naik Status	Posyandu	5	5		5		5		5		5		25		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Jumlah Posyantek	Unit	2	2		2		2		2		2		10		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Indikator sudah tidak dipergunakan
		Posdaya Berprestasi	Posdaya	16	20		20		20		20		20		100		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat	indikator program masih sesuai

Tabel 9.1
Indikator Kinerja Pembangunan Kota Bekasi
Tahun 2013-2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS CAPAIAN	KONDISI AWAL 2012	2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISI I : Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik										
SASARAN I : Tercapainya peningkatan kapasitas organisasi dan aparatur sipil negara										
1	Pencapaian IKK dalam EKPPD	Skor	Nilai EKPPD	2,632	2,876	2,962	3,051	3,142	3,237	3,237
SASARAN II : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi anggaran										
2	Opini BPK terhadap akuntabilitas keuangan daerah	Opini	Satus Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
SASARAN III : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan										
3	Kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen rencana pembangunan	%	(Jumlah program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD pada Tahun berkenaan x100%)	100	100	100	100	100	100	100
SASARAN IV : Tersedianya pelayanan publik yang prima										
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks IKM	65.26	72	74	76	78	80	80
5	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	(((% Kepemilikan E–KTP +% Kepemilikan KK+% Kepemilikan Akta Pernikahan + % Kepemilikan Akta Kematian+% Kepemilikan Akta Kelahiran)))/5	N/A	68.8	70.8	72.5	74.5	76.6	76.6
MISI II : Membangun Prasarana dan Sarana yang Serasi dengan Dinamika dan Pertumbuhan Kota										
SASARAN I : Terpenuhiya kebutuhan infrastruktur perkotaan yang berkualitas										
1	Panjang jalan dalam kondisi baik	%	(Panjang jalan dalam kondisi baik)/(Jumlah total panjang jalan) x100%	91.05	92.09	93.14	94.23	95.23	96.28	96.28
SASARAN II : Terpenuhiya kebutuhan utilitas perkotaan yang berkualitas										
2	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	(Drainase dalam kondisi baik)/(Jumlah drainase) x100%	70,55	71,09	71,64	72,19	72,19	73,28	73,28
3	Pelayanan kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)	%	(Jumlah PJU terpasang)/(Jumlah drainase) x100%	87,05	89	91	93	95	100	100
SASARAN III : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup										

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS CAPAIAN	KONDISI AWAL 2012	2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Penegakan hukum lingkungan	%	(Jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani)/(Jumlah kasus hukum lingkungan) x100%	100	100	100	100	100	100	100
5	Perolehan Adipura	Adipura	Piala Adipura	Sertifikat	Sertif adipura	Sertif adipura	Adipura	Adipura	Adipura	Adipura
6	Status mutu udara ambien	µg/m ³	Baku mutu udara (parameter debu)	230	218,5	207	195,5	184	172,5	172,5
7	Status mutu air	kelas	Status mutu air	4	3,8	3,6	3,4	3,2	3	3
8	Cakupan pelayanan Air minum	%	(Jumlah sambungan rumah air minum)/(Jumlah rumah) x100%	29.9	32,7	34	35,4	36,8	38,2	38,2
SASARAN IV : Terpenuhiya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas										
9	Rumah layak huni	%	(Jumlah rumah layak huni)/(Jumlah rumah) x100%	98,78	98,96	99,06	99,16	99,25	99,33	99,33
10	Kawasan Kumuh Yang Tertata	%	(Jumlah kawasan kumuh yang tertata)/(Jumlah kawasan kumuh) x100%	8	16	24	32	40	48	48
11	Rasio kapasitas TPU terhadap Jml penduduk	m ² /jiwa	(Jumlah kebutuhan lahan TPU per orang)/(Jumlah penduduk) x100%	0,28	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,35
12	Tingkat Tanggap Waktu (Respon Time Rate) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	(Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (<1 jam setelah pengaduan))/(Jumlah kejadian kebakaran) x100%	NA	100	100	100	100	100	100
SASARAN V : Terciptanya tata ruang kota yang berkelanjutan										
13	Penyimpangan pemanfaatan ruang	%	(Jumlah ruang yang sesuai dengan perencanaan)/(Luas kota bekasi) x100%	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
SASARAN VI : Terwujudnya Pengelolaan Sampah Yang Holistik Berbasis Teknologi dan Partisipasi Masyarakat										
14	Persentase penanganan sampah	%	(Volume sampah yang ditangani pada tahun bekenaan)/(Volume produksi sampah pada tahun berkenan) x100%	48,44	58	60	63	66	69	69
SASARAN VII : Berkurangnya ancaman banjir										
15	Berkurangnya luasan genangan banjir	%	(Luas Daerah Bebas Genangan / Luas Daerah Rawan Genangan)*100%	0	13.31	4.99	4.99	16.64	16.64	56.57
SASARAN VIII : Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Perkotaan										

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS CAPAIAN	KONDISI AWAL 2012	2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	(Luas ruang terbuka hijau)/(Luas kota bekasi) x100%	7.48	11	11	11	11	12	12
SASARAN IX : Tersedianya Multi Moda Transportasi yang Terintegrasi										
17	Penanganan titik kemacetan di Kota Bekasi	%	(Jumlah titik kemacetan yang tertangani)/(Titik kemacetandi Kota Bekasi) x100%	20	42	51	59	67	74	74
18	Ketersediaan Prasarana sarana perhubungan	%	(Jumlah ketersediaan prasarana sarana perhubungan yang ada)/(Jumah kebutuhan parasarana sarana perhubungan) x 100%	45	49	54	58	63	67	67
SASARAN X : Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas										
19	Ketersediaan prasarana sarana lalu lintas	%	(Jumlah ketersediaan prasarana sarana lalu lintas yang ada)/(Jumah kebutuhan parasarana sarana lalu lintas) x100%	54	67	73	79	86	92	92
MISI III : Meningkatkan Kehidupan Sosial Masyarakat melalui Layanan Pendidikan Kesehatan dan Layanan Sosial Lainnya										
SASARAN I : Tersedianya Prasarana dan Sarana Layanan Pendidikan Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas										
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	Indeks IPM	76.72	76.84	77.16	77.38	77.58	77.72	77.72
2	Indek Pendidikan	Indeks	Indeks Pendidikan	90,34	90,49	90,64	90,79	90,94	91,10	91,10
3	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	(Jumlah lama bersekoah sesuai jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penduduk usia>15 tahun)/(Jumah pendudukusia>15 tahun) x100%	10,70 Thn	10,83 Thn	10,89 Thn	10,92 Thn	10,96 Thn	11 Thn	11 Thn
4	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan anak usia dini (PAUD)	%	(Jumlah anak usia dini yang mengikuti PAUD)/(Jumah anak usia dini) x100%	37,37	42	44	46	48	50	50
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ sederajat	%	(Jml penduduk kel.usia 7 s.d 12 thn yang bersekolah ditingkat@ pend.SD/MI sederajat pada thn berkenaan)/(Jumah penduduk kel.usia 7/12 thn) x100%	100	100	100	100	100	100	100
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	(Jml penduduk kel.usia 13 s.d 15 thn yang bersekolah ditingkat pend.SMP/ MTs Paket B sederajat pada thn berkenaan)/(Jumah penduduk kel.usia 13/15 thn) x100%	90,39	91,40	92	92,64	93,18	93,68	93,68

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS CAPAIAN	KONDISI AWAL 2012	2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	(Jml penduduk kel.usia 16 s.d 18 thn yang bersekolah ditingkat pend. SMA/SMK/MA Paket B sederajat pada thn berkenaan)/(Jumah penduduk kel.usia 13/15 thn) x100%	71	71,94	72,89	73,63	74,8	75,28	75,28
8	Persentase Peningkatan pengunjung perpustakaan daerah per tahun	%	(jml pengunjung tahun n –jumlah pengunjung tahun n–1)/(jumlah pengunjung tahun n–1) x100%	2569 Org	30%	30%	30%	30%	30%	19000 Org
SASARAN II : Tersedianya Prasarana dan Sarana Layanan Kesehatan Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas										
9	Indek Kesehatan	Indeks	Indeks Kesehatan	74,40	74,58	74,76	74,94	75,12	75,21	75,21
10	Angka harapan hidup	Tahun	Angka Harapan Hidup	69,70	69,80	69,89	69,99	70,10	70,18	70,18
11	Angka kematian ibu melahirkan	per 100.000	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan / 100.000 Kelahiran	59	50	49	47	46	44	44
12	Angka kematian bayi	per 1.000	Jumlah Bayi Lahir Mati / 1000 Kelahiran	55	40	35	30	25	15	15
13	Prevalensi balita gizi buruk	%	(Jumlah balita gizi buruk)/(Jumlah balita) x100%	0,28	0,25	0,23	0,20	0,17	0,15	0,15
14	Kepemilikan Kartu Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	%	(Jumlah penduduk miskin memiliki jamkesda dan jamkesmas)/(Jumlah penduduk miskin) x100%	100	100	100	100	100	100	100
SASARAN III : Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial										
15	Kota Layak Anak (5 cluster 31 Indikator Hak Anak)	Indikator	Jumlah indikator hak anak yang telah terpenuhi	N/A	10	15	20	25	31	31
16	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif tingkat Kota	%	(Jumlah perempuan dilembaga legislatif)/(Jumlah anggota di lembaga legislatif@) x100%	16,55	30	30	30	30	30	30
17	Prosentase Pasangan Usia Subur ber KB	%	(Jumlah pasangan usiasuber yang ber KB)/(Jumlah pasangan usia subur) x100%	74.67	75,36	78,68	81,26	81,51	81,76	81,76

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS CAPAIAN	KONDISI AWAL 2012	2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	(Jumlah PMKS miskin yang menerima bantuan)/(Jumlah PMKS miskin) x100%	77	80	82	85	86	95	95
SASARAN IV : Terpelihara dan meningkatnya aktivitas seni dan budaya										
19	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yg representativ	Jumlah	Gedung Outdoor (GO) dan Gedung Indoor (GI)	0	0	0	1 GO	0	1 GI	2 Gedung
SASARAN V : Tersedianya Destinasi Pariwisata Perkotaan										
20	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Daerah	%	(Jumlah pendapatan daerah dari sektor pariwisata)/(total pendapatan asli daerah) x100%	10.67	12.9	13.00	14.41	15.97	17.70	17.70
SASARAN VI : Meningkatnya Aktivitas Kepemudaan										
21	Pemuda Pelopor yang Berprestasi	%	Jumlah pemuda pelopor Tingkat Kota (TK), Tingkat Provinsi (TP) dan Tingkat Nasional (TN)	5TK, 2TP ,0TN	5TK, 2TP ,1TN	5TK, 2TP ,1TN	5TK, 2TP ,1TN	5TK, 2TP ,1TN	5TK, 2TP ,1TN	5TK, 2TP ,1TN
SASARAN VII : Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Aktivitas Olahraga di Masyarakat										
22	Cabang Olahraga Berprestasi	Cabang	Jumlah cabang olahraga	7	7	8	8	9	9	9
MISI IV : Meningkatkan Perekonomian melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peningkatan Investasi, serta Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif										
SASARAN I : Meningkatnya Investasi										
1	Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi	%	(PDRB ADHK Th n–PDRBADHK Th (n–1))/(PDRB ADHK Th n) x100%	7.08	6.00 – 7.00	6.00 – 7.00	5.50 – 6.50	5.50 – 6.50	5.50 – 6.50	6,00-7,00%
2	PDRB perkapita	Rp	(PDRB ADHK Tahun berkenaan)/(Jumlah penduduk tahun berkenaan) x100%	18.175.506	22.354.665	24.372.801	26.573.130	28.972.101	31.587.646	31,587,646
3	Indeks Daya Beli	Indeks	IDB	65.76	65.81	65.95	80.00	81	81.5	81.50
4	Laju Peningkatan investasi	%	(Nilai Investasi tahun n–Nilai Investasi tahun (n–1))/(Nilai Investasi tahun n) x100%	Rp3,434,577,781,924	10	10	10	10	10	Rp7,190,848,422,636.35
5	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih	%	(Nilai ekspor bersih tahun n–Nilai ekspor bersih tahun (n–1))/(Nilai ekspor bersih tahun (n–1)) x100%	US \$ 829,955,835.97	10%	10%	10%	10%	10%	US \$ 1,336,652,173.39

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS CAPAIAN	KONDISI AWAL 2012	2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN II : Terkendalnya Laju Inflasi										
6	Laju inflasi	%	Inflasi	3,45	<6	<6	<6	<6	<6	<6%
SASARAN III : Meningkatnya Peran Kelembagaan Ekonomi										
7	Koperasi aktif	%	(Jumlah koperasi aktif)/(Jumlah koperasi) x100%	448	5%	5%	5%	5%	5%	572
SASARAN IV : Meningkatnya Aktivitas UMKM dan Ekonomi Lokal Berbasis Industri Kreatif										
8	UMKM Produktif	Unit	Jumlah UMKM	1134	1445	1445	1500	1625	1725	1725
SASARAN V : Tersedianya Prasarana dan Sarana Perdagangan										
9	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	PKL	Jumlah PKL yang Dibina	1375	1575	1750	1900	2050	2200	2200
10	Pasar Tradional Modern dan UMKM Center	Unit	Jumlah pasar tradisional modern (PTM) dan jumlah UMKM Center	-	-	-		1 UMKM Center	1 PTM	1 PTM dan 1 UMKM Center
SASARAN VI : Tersedianya Kesempatan Kerja										
11	Tingkat kemiskinan	%	(Jumlah penduduk miskin)/(Jumlah penduduk) x100%	6.12*	5.87	5.72	5,62	5.52	5.37	5.37
12	Indeks Gini		$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana : P _i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q _i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	-	0,3 ≤ G ≤ 0,5	0,3 ≤ G ≤ 0,5	0,3 ≤ G ≤ 0,5	0,3 ≤ G ≤ 0,5	G < 0,3	G < 0.3
13	Penyediaan Lapangan Kerja	Lowongan	Jumlah lowongan kerja baru	N/A	10000	10000	10000	10000	10000	50,000
14	Angka Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jml penganggur usia angkatan kerja}}{\text{Jml koperasi}} \times 100$	8.75	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.2

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS CAPAIAN	KONDISI AWAL 2012	2014	2015	2016	2017	2018	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISI V : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, TenTeram, dan Damai										
SASARAN I : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan										
1	Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	%	(Jumlah Swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat)/(Jumlah Nilai Program Pemberdayaan Masyaarakat) x100%	30	30	33	35	37	40	40
SASARAN II : Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat										
2	Kasus perselisihan sara dan kelompok masyarakat	Kasus	Jumlah kasus	4	0	0	0	0	0	0
3	Wilayah Tertib K3	%	(Jumlah kriminal tertangani dalam 1 tahun)/(Jumlah penduduk) x10.000	10,32	5	5	5	5	5	5
4	Penanganan bencana alam	%	(Jumlah ketepatan waktu penanganan bencana alam (<1 jam setelah pengaduan))/(Jumlah kejadian) x100%	85	80	90	100	100	100	100